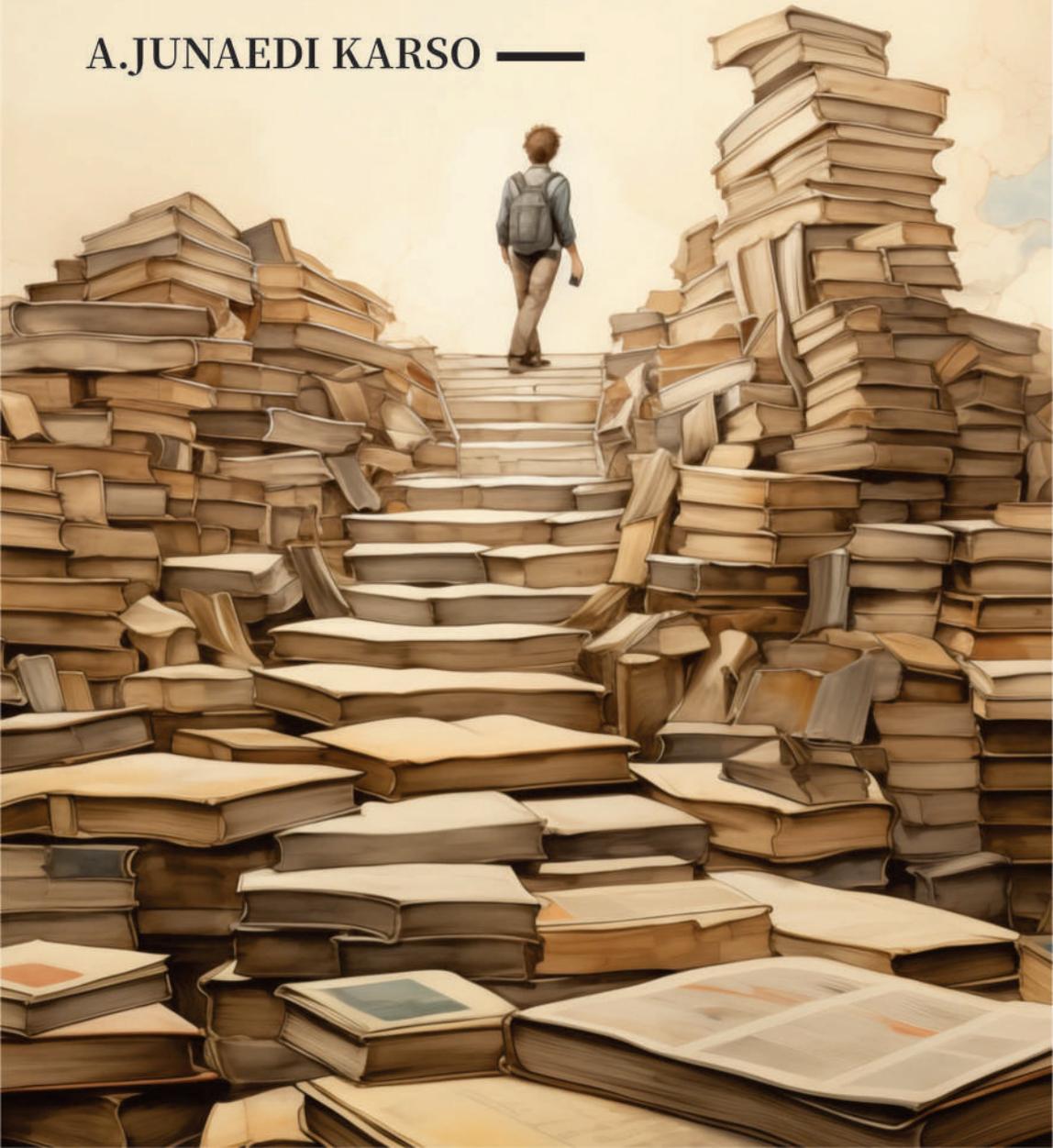




BUKU AJAR

# DASAR - DASAR ILMU POLITIK

A. JUNAEDI KARSO —



# Tentang Penulis

## A. JUNAEDI KARSO —



Junaedi (A. Junaedi Karso) was born in Indramayu, on September 20, 1975. Apart from writing, he is also a Lecturer at the University of Muhammadiyah Makassar. He has been published in national and international journals, so scopus, and many books. Meanwhile, the education and

training Training of Trainer (TOT) at BNSP in 2020, Implementation of Construction Work Contracts at BNSP in 2020, Preparation of Goods/Services Procurement Contracts at BNSP in 2020, International Training of Trainers (TOT) at IPB-KAN in 2021, BNSP Training of Trainers (TOT) at LPKN-Pelatinas in 2021, Management of BNSP Training Institutions at LPKN -Platinas in 2021, BNSP Distance Training Methodology at LPKN-Pelatinas in 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) at Quantum HRM International\_KAN in 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) at Quantum HRM International\_KAN in 2021,



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-356-4



# BUKU AJAR DASAR - DASAR ILMU POLITIK

A. Junaedi Karso



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**BUKU AJAR  
DASAR - DASAR ILMU POLITIK**

**Penulis** : A. Junaedi Karso

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Ayu May Lisa

**ISBN** : 978-623-120-356-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan “Buku Ajar Dasar-Dasar Ilmu Politik”.

Kami mohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan nama, kesalahan referensi, kesalahan dalam kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber terkait buku ini. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga “Allah SWT” membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PERTEMUAN PERTAMA KONSEP DASAR</b>	
<b>ILMU POLITIK .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Ilmu Politik.....	3
C. Konsep Dasar Sistem Politik .....	5
D. Pengertian : Input tuntutan dan Input Dukungan Input : Tuntutan .....	9
E. Input : Dukungan.....	11
F. Mekanisme Dukungan.....	13
G. Budaya Politik.....	16
<b>BAB 2 PERTEMUAN KEDUA SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK .....</b>	<b>28</b>
A. Pendahuluan.....	28
B. Analisa Politik Indonesia Era Orde Lama .....	36
<b>BAB 3 PERTEMUAN KETIGA PARTAI POLITIK DAN KELOMPOK KEPENTINGAN .....</b>	<b>48</b>
A. Partai Politik .....	48
<b>BAB 4 PERTEMUAN KE EMPAT RUANG LINGKUP ILMU POLITIK .....</b>	<b>60</b>
A. Pendahuluan.....	60
B. Tipe-tipe Sistem Pemerintahan .....	61
C. Perkembangan Sistem Politik di Indonesia.....	62
<b>BAB 5 PERTEMUAN KE LIMA RUANG LINGKUP ILMU POLITIK .....</b>	<b>65</b>
A. Pendahuluan.....	65
B. Lingkup Kekuasaan .....	66
C. Sistem Politik Atau Negara .....	67
D. Kesimpulan .....	68
<b>BAB 6 PERTEMUAN KE ENAM PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM POLITIK .....</b>	<b>70</b>
A. Pendahuluan.....	70
B. Analisis Sistem Politik.....	71
C. Kesimpulan .....	74

<b>BAB 7 PERTEMUAN KE TUJUH INPUT, OUTPUT, DAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM POLITIK .....</b>	<b>76</b>
A. Input.....	76
B. Output.....	79
C. Lingkungan .....	80
D. Kritik Terhadap Analisis Sistem Politik David Easton	84
E. Kesimpulan.....	85
<b>BAB 8 PERTEMUAN KE DELAPAN PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL GABRIEL ALMOND.....</b>	<b>86</b>
A. Sistem Politik, Lingkungan, Dan Kapabilitas.....	86
B. Sistem Dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Ekologis.....	89
C. Kapabilitas Sistem Politik.....	92
D. Kesimpulan.....	93
<b>BAB 9 PERTEMUAN KE SEMBILAN ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DALAM SISTEM POLITIK .....</b>	<b>95</b>
A. Pendahuluan .....	95
B. Sosialisasi Politik.....	99
C. Kesimpulan.....	102
<b>BAB 10 PERTEMUAN KESEPULUH POLITIK ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA.....</b>	<b>104</b>
A. Pendahuluan .....	104
B. Islam Politik dalam Konstelasi Politik Nasional .....	106
C. Agenda Islam Politik ke Depan .....	114
D. Kesimpulan.....	115
<b>BAB 11 PERTEMUAN KE SEBELAS POLITIK ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>118</b>
A. Persepsi Responden Jika Ada Larangan Terkait Politik Dinasti di Indonesia.....	118
B. Pemikiran Politik Islam Abad Modern .....	123
C. Pemikiran Politik Kontemporer.....	125
D. Kesimpulan.....	142

<b>BAB 12 PERSEPSI LARANGAN PRAKTIK POLITIK</b>	
<b>DINASTI.....</b>	<b>144</b>
A. Persepsi Responden Jika Ada Larangan Terkait Politik Dinasti di Indonesia .....	144
B. Isu Dinasti Politik Mencuat Jelang Pemilu.....	146
<b>BAB 13 PERTEMUAN KE TIGA BELAS PULAU JAWA</b>	
<b>BATTLEGROUNND, ARENA PERSAINGAN</b>	
<b>POLITIK TERBESAR PEMILIHAN UMUM 2024 .....</b>	<b>151</b>
A. Jawa Jadi Battleground Pemilihan Umum 2024 .....	151
B. Tren Jawasentris Pemilihan Umum 2024 .....	158
C. Basis Pemilih Presiden di Pemilu 2024.....	182
D. Kesimpulan.....	192
<b>BAB 14 PERTEMUAN KE EMPAT BELAS DASRYATNYA</b>	
<b>MONEY POLITIK DALAM PERTARUNGAN</b>	
<b>PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL</b>	
<b>PRESIDEN INDONESIA 2024.....</b>	<b>194</b>
A. Dasryatnya Money Politik Dalam Pemilu 2024 .....	194
B. Politik Uang Menciptakan Peradaban K otor di Pemilu 2024.....	196
C. Teori Pertukaran.....	200
D. Partai Pendukung dan Potensi Kecurangan di Pemilihan Presiden 2024.....	205
E. Gerakan Kekuatan Politik Uang di Area Kekuasaan.....	214
F. Kesimpulan.....	219
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>222</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>231</b>

# BAB

# 1

## PERTEMUAN PERTAMA KONSEP DASAR ILMU POLITIK

### A. Pendahuluan

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan<sup>1</sup>.

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira

---

<sup>1</sup> Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.4-6

dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara- negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke- 18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu. Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahkan pendekatan-

pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun 1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku *Contemporary Political Science* pada tahun 1948.

Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku *The University Teaching of Political Science*. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial (termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda. Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi.

## **B. Konsep Dasar Ilmu Politik**

### **1. Negara**

Dilansir dari Halo Edukasi, Miriam Budiardjo seorang ilmuwan politik, menuturkan bahwa konsep negara bagaikan organisasi yang berada dalam suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi serta ditaati oleh rakyatnya. Selain itu, negara dengan pusat kajian pada lembaga kenegaraannya dan bentuk formalnya disebut oleh ahli yakni

Roger F. Soltau dan J. Barents sebagai inti dari ilmu politik itu sendiri<sup>2</sup>.

Ilmu politik nantinya akan mempelajari bagaimana negara yang dimaksud itu meliputi suatu tujuan, tugas, fungsi, dan implementasinya melalui lembaga kenegaraan, hubungan negara dengan rakyatnya, dan juga hubungan negara dengan negara lainnya.

## 2. Kekuasaan

Kekuasaan dianggap sebagai inti dari ilmu politik itu sendiri oleh sebagian ahli seperti Harold D. Lasswell, A. Kaplan, dan Deliar Noer. Lebih jauh, Miriam Budiardjo menuturkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok sesuai keinginannya dalam upaya memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain.

Konsep kekuasaan yang akan dipelajari dalam ilmu politik meliputi dasar dari kekuasaan, sifat hakikinya, proses kekuasaan, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan tersebut seperti bagaimana dituliskan oleh W.A Robson dalam *The University Teaching of Social Sciences*. Selain itu, dalam ilmu politik nanti kekuasaan secara rinci akan dijelaskan tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan, dipertahankan, diperdebatkan, bahkan diperebutkan untuk mencapai kepentingan pemegang kuasa.

## 3. Pengambilan Keputusan

Konsep selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Menurut Miriam Budiardjo dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, konsep pengambilan keputusan merujuk pada bagaimana setiap keputusan yang diambil dan mengikat seluruh masyarakat secara kolektif.

Dalam Ilmu Politik, kemudian akan dipelajari proses mengambil keputusan yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut tujuan masyarakat atau

---

<sup>2</sup> <https://bakrie.ac.id/> Konsep Dasar Ilmu Politik, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 09.00 WIB.

kebijakan seperti apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan itu.

#### 4. Kebijakan

Konsep berikutnya yang masih erat berkaitan dengan konsep pengambilan keputusan adalah konsep kebijakan. Yaps, karena proses pengambilan keputusan nantinya akan melahirkan suatu kebijakan. Miriam Budiardjo menjelaskan, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik, dalam usahanya mencapai tujuan.

Dalam ilmu politik, konsep kebijakan merujuk pada tujuan bersama yang ingin dicapai melalui usaha bersama dan rencana mengikat yang dituangkan oleh pihak berwenang atau dalam hal ini adalah pemerintah. Konsep ini secara umum kemudian dikenal juga sebagai kebijakan publik atau public policy.

#### 5. Pembagian atau Alokasi

Dalam ilmu politik, konsep pembagian atau alokasi berkaitan erat dengan pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat agar tidak menyebabkan terjadinya konflik. Miriam Budiardjo secara khusus menjabarkan bahwa dalam Ilmu Sosial, value merupakan sesuatu yang berharga, dianggap baik, benar, bersifatnya abstrak dan juga konkret.

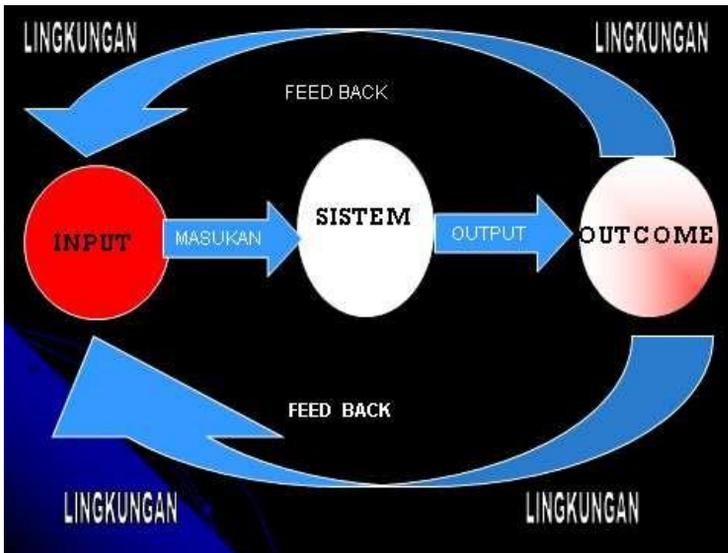
### C. Konsep Dasar Sistem Politik

Sistem politik<sup>3</sup> adalah keseluruhan unit-unit politik yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mempengaruhi proses politik. Bagian-bagian atau unit-unit dari sistem politik terdiri dari input, proses, dan output. Berbagai macam input-input ini lalu kemudian diubah oleh proses-proses yang terjadi di dalam sistem tersebut menjadi output, yang selanjutnya output-output tersebut menimbulkan kembali pengaruh

---

<sup>3</sup> Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.7-13

terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan di mana sistem itu berada. Rumusan ini sangat sederhana akan tetapi cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal seperti input - proses - output. Hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Diagram di bawah ini merupakan suatu model yang sangat sederhana yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari kehidupan politik.



*Sumber: Awang Darumurti (2018)*

Sebagai suatu sistem, tentu saja sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pendekatan ini, berikut ini adalah ciri-ciri utama dari sistem politik.

### 1. Ciri-ciri Identifikasi.

Untuk membedakan sistem politik dengan sistem sosial lainnya, kita harus bisa mengidentifikasikannya dengan menggabarkan unit-unit dasarnya dan membuat garis batas yang memisahkan unit-unit itu dari unit-unit yang ada di luar sistem politik itu.

a. Unit-unit Sistem Politik.

Unit-unit adalah adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sistem. Dalam sistem politik, unit-unit ini bewrwujud tindakan-tindakan politik. Perlu sekali memperhatikan tindakan-tindakan ini karena merekalah yang membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik.

b. Perbatasan.

Sistem politik selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan berupa sistem-sistem lain. Tidak ada sistem yang hidup dalam lingkungan yang kosong. Cara berfungsinya suatu sistem sebagian merupakan perwujudan dari upayanya untuk menanggapi keseluruhan lingkungan sosial, biologis, dan fisiknya.

Suatu sistem politik memiliki perbatasan dalam pengertian yang sama dengan yang dimiliki oleh suatu sistem fisik. Yang termasuk dalam suatu sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat; dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk di dalam sistem politik, sehingga secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal di dalam lingkungan sistem tersebut.

## 2. Input dan Output

Input merupakan tuntutan dan dukungan, sedangkan output merupakan keputusan yang otoritatif atau kebijakan umum yang mengikat seluruh masyarakat.

Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input secara ajeg. Tanpa input sistem tidak akan dapat berfungsi - begitu pula tanpa adanya output kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem tersebut.

David Easton dalam (Afan Gaffar : 1983 : 11), melakukan telaah tegas atas kehidupan politik dalam kaitannya dengan sistem, dan memperkenalkan dua macam

input ke dalam sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan. Klasifikasi di bawah ini akan memberikan gambaran nyata tentang jarak dan variasi dari input tuntutan, yaitu :

- a. Tuntutan untuk memperoleh barang-barang dan pekerjaan seperti upah, jam kerja, pendidikan, fasilitas rekreasi, dan transportasi.
- b. Tuntutan pengaturan tingkah laku seperti jaminan keselamatan, Kontrol atas harga, dan tuntutan akan adanya suatu peraturan yang menyangkut suatu permasalahan sosial.
- c. Tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik seperti, hak pilih, kesempatan untuk menjadi pegawai negeri, dan kesempatan untuk mengorganisir kekuatan politik formal, dan lain- lain.
- d. Tuntutan untuk mendapatkan informasi, dan komunikasi seperti, permintaan keterangan dari pemerintah atas suatu kebijakan umum yang sementara dibuat atau dilaksanakan, dan tuntutan untuk menyatakan aspirasi.

Suatu tuntutan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, derajat, serta intensitas yang berbeda-beda. Sedangkan input dukungan dapat diperinci ke dalam empat bagian besar, yaitu :

- a. Dukungan materi, seperti ketaatan membayar pajak, kesediaan bekerja dalam pelayanan umum.
- b. Kepatuhan pada hukum, dan peraturan perundang-undangan, dan undang-undang.
- c. Dukungan partisipatif, seperti ikut serta menggunakan hak pilih dalam suatu pemilihan umum, diskusi politik, dan semua kegiatan politik lainnya.
- d. Memperhatikan segala sesuatu yang diumumkan oleh pemerintah, hak pemerintah, simbol- simbol kenegaraan, dan perayaan-perayaan nasional.

Jika suatu sistem politik tanggap atas semua tuntutan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dan berupaya untuk memprosesnya secara efektif, maka

dukungan dan peran serta dari masyarakat akan diperoleh. Secara umum dapat dikatakan bahwa tuntutan akan menghasilkan keputusan / kebijaksanaan umum, sedangkan dukungan dari masyarakat akan mempermudah suatu sistem politik untuk membuat output atau kebijakan umum.

### **3. Diferensiasi Dalam Suatu Sistem**

Input merupakan energi bagi suatu sistem politik dan juga sekaligus merupakan sumber informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan politik. Input-input ini lalu kemudian diproses menghasilkan jenis output yang berbeda dengan input yang diperolehnya dari lingkungannya. Pekerjaan mengubah input menjadi output yang berbeda-beda dalam waktu yang terbatas membuat struktur suatu sistem politik harus mengenal diferensiasi minimal seperti pembagian kerja bagi anggota-anggotanya, dan menyediakan suatu struktur yang bervariasi sehingga dapat menampung pekerjaan yang berbeda-beda dan harus diselesaikan pada saat yang sama.

### **4. Integrasi Dalam Suatu Sistem**

Bila suatu sistem ingin mempertahankan dirinya dari kehancuran, sistem tersebut harus memiliki suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan (menyatukan) atau bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerjasama walaupun dalam kadar minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan- keputusan yang otoritatif.

## **D. Pengertian : Input tuntutan dan Input Dukungan Input : Tuntutan**

Input tuntutan ini pada dasarnya merupakan bahan baku, dan sekaligus merupakan informasi yang berharga bagi sebuah sistem politik yang berasal dari masyarakat untuk mengambil suatu keputusan/kebijakan umum. Tuntutan berasal dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat yang merasa tidak puas dengan keadaan yang ada.

Ketidakpuasan tersebut dapat berupa kelangkaan akan sebagian besar hal-hal atau benda-benda yang bernilai tinggi.

Beberapa dari tuntutan akan nilai-nilai yang relatif langka itu tidak pernah masuk ke dalam sistem politik sebelum dipenuhi melalui perundingan-perundingan pribadi. Input tuntutan itu dapat berupa: pendidikan, lapangan kerja, gaji, fasilitas kerja, harga-harga, suplai kebutuhan pokok, lingkungan hidup, masalah kegamaan, gender, moral, kebudayaan dan lain-lain.

Input tuntutan dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu tuntutan eksternal dan tuntutan internal :

1. Tuntutan eksternal.

Tuntutan eksternal adalah tuntutan yang berasal dari luar sebuah sistem politik. Lingkungan sistem politik ini terdiri dari sistem-sistem lain seperti ekonomi, kebudayaan, ekologi, pribadi-pribadi, dan demografi. Masing-masing sistem tersebut merupakan suatu kumpulan besar variabel-variabel yang membantu atau mempengaruhi pembentukan jenis tuntutan yang masuk ke dalam sistem politik.

2. Tuntutan internal.

Jenis tuntutan ini berbeda dengan pengertian tuntutan eksternal, yaitu sebuah tuntutan yang berasal dari luar sistem politik.. Sangat perlu bagi kita untuk membedakan tuntutan internal dengan tuntutan eksternal oleh karena tuntutan internal bukanlah input yang dimasukkan ke dalam sistem politik, akan tetapi merupakan suatu jenis tuntutan yang timbul dari dalam sistem itu sendiri atau disebut juga dengan *withinput*.

Bagaimana agar tuntutan-tuntutan tersebut dapat diubah menjadi isu-isu politik dan faktor apa yang menentukan sehingga suatu tuntutan dapat menjadi suatu masalah yang dapat menimbulkan diskusi politik yang serius, atau tetap merupakan sesuatu yang harus diselesaikan secara pribadi oleh anggota masyarakat tersebut ?

Timbulnya suatu tuntutan, baik internal maupun eksternal tidak begitu saja akan menjadi sebuah isu politik yang mendapat perhatian para pengambil keputusan. Banyak tuntutan yang hilang begitu saja begitu diajukan kepada pembuat keputusan / pembuat kebijakan umum, ataukah proses pengajuannya seret dan bertele-tele hanya karena didukung oleh anggota masyarakat yang kurang berpengaruh dan tidak pernah bisa masuk ke dalam tingkat pembuatan keputusan, sedangkan yang lain mungkin menjadi isu politik. Isu politik merupakan suatu tuntutan yang oleh anggota-anggota masyarakat ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang penting untuk dibahas melalui saluran-saluran yang diakui dalam sistem itu.

Bila kita ingin memahami proses perubahan tuntutan menjadi isu, maka kita harus mendapatkan data yang cukup seperti ; (a) mengetahui hubungan antara suatu tuntutan dengan lokasi dari pencetusnya atau pendukungnya dalam struktur kekuasaan pada masyarakat tersebut, (b) pentingnya kerahasiaan jika dibandingkan dengan publisitas atau keterbukaan dalam mengajukan tuntutan tersebut, (c) masalah waktu diajukannya tuntutan tersebut, (d) kecakapan dan pengetahuan politik, (e) penguasaan saluran komunikasi, (f) sikap dan suasana pemikiran masyarakat, dan (g) gambaran yang dimiliki oleh pencetus tuntutan itu mengenai cara kerja sistem politik tertentu. Jawaban terhadap masalah-masalah ini mungkin akan merupakan suatu indeks pengubahan atau konversi yang mencerminkan probabilitas bagi suatu kumpulan tuntutan untuk bisa diubah menjadi sebuah isu politik yang hidup.

#### **E. Input : Dukungan**

Untuk dapat tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya, suatu sistem politik juga memerlukan energi dalam bentuk dukungan. Bentuk-bentuk dukungan itu berupa tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan ataukah merintangai sistem politik. Jadi input

dukungan berfungsi untuk merintang ataukah memajukan suatu pengambilan keputusan atau kebijakan umum. Jenis input ini disebut juga dengan support inputs.

Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa terpenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan. Jika sebuah tuntutan ingin mendapatkan tanggapan, kelompok kepentingan yang memperjuangkan satu tuntutan menjadi sebuah keputusan/kebijakan umum yang mengikat, maka kelompok kepentingan tersebut harus mampu memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain yang ada di dalam sistem politik tersebut.

Menurut David Easton dalam (Mas' oed dan MacAndrews : 2000 : 12), tingkah laku mendukung ada dua macam; (a) Tindakan-tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain yang mungkin berwujud memberikan suara yang mendukung, membela, atau mempertahankan tindakan tersebut. tindakan mendukung dalam bentuk tindakan nyata dan terbuka ini disebut juga dengan istilah over action.

Sebaliknya, tingkah laku mendukung ini mungkin tidak berwujud tindakan yang nampak nyata dari luar, tetapi merupakan bentuk-bentuk tingkah laku "batiniah" yang kita sebut pandangan atau suasana pemikiran. Suasana pemikiran yang mendukung (supportif) merupakan kumpulan sikap-sikap atau kecendrungan-kecendrungan yang kuat, ataukah suatu kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Dalam tahap ini, memang tidak ada tindakan nyata atau terbuka akan tetapi implikasinya jelas bahwa seseorang mungkin akan melakukan suatu tindakan yang searah dengan sikapnya. Bila seseorang yang kita anggap memiliki suasana pemikiran tertentu ternyata tidak bertingkah laku atau tidak bertindak sesuai dengan suasana pemikiran tersebut, maka kita berasumsi bahwa kita tidak cukup dalam memahami dan menyelami perasaan yang sebenarnya dari orang tersebut dan hanya memperhatikan sikap yang tampak dari luar saja.

## F. Mekanisme Dukungan

Tidak ada satu sistem politik yang dapat menghasilkan output berupa keputusan-keputusan yang otoritatif jika dukungan, di samping tuntutan tidak memperoleh jalan masuk ke dalam sistem politik. Dukungan merupakan input yang penting bagi suatu sistem politik. Dukungan bagi suatu sistem haruslah dipelihara dan dikelola menjadi suatu arus dukungan yang tetap oleh karena tanpa arus dukungan yang tetap dan ajeg suatu sistem tidak akan bisa menyerap energi yang cukup memadai untuk mengubah tuntutan menjadi keputusan. Terdapat berbagai sarana yang bisa digunakan oleh unit-unit politik untuk dapat menyalurkan dukungan pada suatu sistem politik.

### 1. Output-output Sebagai Mekanisme Dukungan

Output dari suatu sistem politik dapat berwujud pada suatu keputusan atau kebijakan umum. Salah satu cara untuk memperkuat ikatan antara warga negara dengan sistem politiknya adalah dengan cara menciptakan atau membuat keputusan-keputusan yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan warga dari sebuah sistem politik. Output yang berwujud keputusan atau kebijakan umum merupakan pendorong khas bagi anggota-anggota dari suatu sistem politik untuk memberikan dukungannya.

Sifat dukungan ada dua, bisa positif juga sebaliknya bisa negatif. Bila dukungan itu negatif, ada kemungkinan dukungan itu diberikan oleh karena pemberi dukungan takut terhadap hukuman. Sehingga dukungan yang diberikan sebagiannya hanyalah merupakan akibat dari ketakutan akan sanksi-sanksi atau karena paksaan.

### 2. Politisasi Sebagai Mekanisme Dukungan

Begitu seorang individu lahir dan tumbuh dalam suatu masyarakat, maka pada dasarnya ia hidup dengan anggota masyarakat lainnya dalam suatu jaringan ganjaran dan hukuman (network of rewards and Funishment), berkomunikasi dengannya, dan menanamkan berbagai jenis tujuan dan norma yang telah melembaga dalam masyarakat,

ilmu sosiologi menamakannya dengan istilah proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi ini seorang individu belajar untuk memainkan berbagai peranan sosialnya. Sebagian dari tujuan-tujuan dan norma-norma ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik yang dianggap bermanfaat dari masyarakat tersebut. Mengenai cara dan bagaimana anggota masyarakat mempelajari pola-pola politik ini, disebut dengan istilah politisasi politik.

Proses politisasi masyarakat, pada awalnya dimulai ketika seorang anak meningkat dewasa harus menyerap berbagai orientasi dan sikap terhadap masalah-masalah politik yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang dalam masyarakat tersebut. Bila harapan-harapan anggota masyarakat mengenai cara bagaimana seharusnya setiap orang bertingkah laku dalam situasi-situasi politik tertentu berbeda jauh, maka tidak mungkin dilakukan tindakan bersama dalam membuat keputusan- keputusan yang mengikat.

Agar suatu sistem politik dapat tetap berfungsi dengan tertib dan tidak hancur, anggota- anggota sistem tersebut harus memiliki harapan dasar yang sama dalam hal patokan-patokan atau ukuran-ukuran yang harus diterapkan untuk membuat penilaian politik, cara seorang berpikir tentang berbagai masalah politik, dan cara anggota-anggota sistem memandang dan menafsirkan gejala politik.

Mekanisme yang dipakai selama proses belajar ini, dan yang sangat relevan dengan proses politisasi adalah yang pertama, proses belajar atau politisasi bagi individu tidak pernah berhenti yang dimulai dari masa kanak-kanak. Kedua, politisasi melibatkan suatu jaringan ganjaran dan hukuman. Dengan menyelaraskan diri dengan masyarakat kita akan mendapatkan keuntungan karena dihormati, kekayaan, kesempatan-kesempatan yang lebih baik. Akan tetapi kalau kita mengingkari masyarakat di luar batas, kita akan ditolak, tidak dihargai, dan seringkali menderita kerugian material. Ketiga, komunikasi yang berulang-ulang

mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada seluruh anggota masyarakat melalui mitos, doktrin, dan filsafat politik dalam rangka menanamkan suatu penafsiran tertentu mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada setiap generasi. Unsur-unsur yang sangat menentukan dalam proses penanaman dan pewarisan nilai-nilai tersebut adalah orang tua, saudara, teman sepergaulan, guru, organisasi dan pemimpin masyarakat, serta lambang-lambang negara seperti bendera, upacara-upacara yang dipenuhi makna politik.

Bila keterikatan (attachment) politik itu menjadi mengakar dan sangat kuat melembaga ditengah masyarakat, sistem politik tersebut telah memiliki legitimasi yang tinggi. Dengan demikian, politisasi secara efektif bisa membentuk jalan dengan mana ukuran-ukuran legitimasi diciptakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya dalam sistem politik tersebut. secara empiris terbukti bahwa suatu sistem politik dapat bertahan hidup lama disebabkan oleh dukungan yang ditumbuhkan dan dipelihara oleh keyakinan yang mendalam akan legitimasi pemerintahannya. Keyakinan yang mendalam tersebut diperoleh melalui proses politisasi.

Budaya Politik, Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik Budaya politik<sup>4</sup> merupakan pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerika Serikat yaitu Gabriel A. Almond dan Sydney Verba. Hasil penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka Budaya Politik, yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sampai dengan 1970 atas 5000 responden yang tersebar di 5 negara: Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat.

---

<sup>4</sup> Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.14-17

Budaya politik berarti kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dalam pendekatan budaya politik, individu merupakan subyek kajian yang utama dan bersifat empiris, dalam arti pendapat orang per oranglah yang membangun kesimpulan penelitian. Ini berbeda dengan pendekatan filsafat politik, misalnya, yang lebih bersifat abstrak oleh sebab pendapat dibangun oleh seseorang tanpa terlebih dahulu melihat fakta lapangan, atau paling tidak, melalui serangkaian penelitian yang melibatkan orang banyak.

Sementara itu, sosialisasi politik merupakan instrumen yang berupaya melestarikan sebuah sistem politik. Melalui serangkaian mekanisme dalam sosialisasi politik, individu dari generasi selanjutnya dididik untuk memahami apa, bagaimana, dan untuk apa sistem politik yang berlangsung di negaranya masing-masing berfungsi untuk diri mereka.

## **G. Budaya Politik**

Budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.

Orientasi/kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi 3, yaitu :

### **1. Orientasi Kognitif**

Pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara.

### **2. Orientasi Afektif**

Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

### **3. Orientasi Evaluatif**

Keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya tampak saat pemilu.

Orientasi kognitif adalah pengetahuan. Bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa, merupakan contoh dari orientasi kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling individu.

Orientasi afektif berbeda dengan orientasi kognitif, oleh sebab orientasi afektif ini bergerak di dalam konteks perasaan. Perasaan-perasaan seperti diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya, kerap lebih menentukan ketimbang faktor pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis (sifatnya populer) untuk mendongkrak aspek afektif warga negara. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai, Askeskin, Pembagian Kompor Gas, dan sejenisnya bertujuan demi mengubah orientasi afektif warga negaranya. Tujuan akhirnya adalah, agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pimpinan politik, dan mereka akan memilih para pemberi bantuan di kemudian hari.

Orientasi Evaluatif merupakan campuran antara orientasi kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan/tindakan. Misalnya, setelah mengetahui bahwa partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang mereka inginkan, individu memilih mereka di dalam suatu pemilu. Atau, sekelompok individu menggelar unjuk rasa untuk mendukung seorang calon yang tengah 'diserang' oleh lawan politiknya, semata-mata karena mereka merasa kenal dan sedikit tahu akan jatidiri si politisi termaksud. Orientasi Evaluatif muncul akibat adanya pengaruh dari orientasi kognitif dan afektif.

## **1. Tipe-tipe Budaya Politik**

Menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe-tipe tersendiri. Melalui hasil penelitian mereka di 5 negara, keduanya menyimpulkan bahwa terdapat 3 budaya politik yang dominan terdapat di tengah individu. Tipe budaya politik sendiri berarti jenis kecenderungan individu di dalam sistem politik. Tipe-tipe budaya politik yang ada adalah : Budaya Politik Parokial; Budaya Politik Subyek Budaya Politik Partisipan

## **2. Budaya Politik Parokial**

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik di mana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Di dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, ataupun daerah mereka.

Budaya politik parokial kentara misalnya, di dalam budaya masyarakat yang masih nomaden. Misalnya ini terjadi di kafilah-kafilah badui jazirah Arabia, suku-suku pedalaman Indonesia seperti Kubu, Dani, Asmat, Anak Dalam, dan sejenisnya. Contoh tersebut dalam pengertian fisik. Namun, dapat pula kita kembangkan parokialisme dalam pengertian lebih luas. Misalnya, dapat kita sebut bahwa sebagian warga Aceh yang hendak memisahkan diri dari Republik Indonesia sebagai menganut budaya politik parokial, oleh sebab mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai warga negara Republik Indonesia.

## **3. Budaya Politik Subyek**

Budaya politik subyek adalah budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dari parokial oleh sebab individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu

negara. Individu yang berbudaya politik subyek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif. Mereka kerap mengikuti berita-berita politik tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman oleh sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Di ujung yang lain, saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Budaya politik subyek banyak berlangsung di negara-negara yang kuat (strong government) tetapi bercorak otoritarian atau totalitarian. Misalnya, budaya ini banyak terjadi di Indonesia di saat pemerintah Presiden Suharto (masa Orde Baru). Di masa tersebut, orang jarang ada yang berani membicarakan masalah politik secara bebas, terlebih lagi mengkritik presiden ataupun keluarganya. Gejala seperti ini juga terjadi di Cina, Korea Utara, Kuba, atau sebagian negara makmur seperti Arab Saudi, Singapura, ataupun Malaysia, yang sistem politiknya belum sepenuhnya demokrasi.

#### **4. Budaya Politik Partisipan**

Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya ketimbang subyek. Dalam budaya politik partisipan, individu mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang punya sejumlah hak maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan di sisi lain kewajiban untuk, misalnya, membayar pajak.

Dalam budaya politik partisipan, sering dan merasa bebas mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa bahwa, hingga tingkatan tertentu, dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan negara. Mereka pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah. Jika tidak mendirikan organisasi politik, mereka pun banyak bergabung ke dalam

organisasi sukarela baik bersifat politik maupun tidak. Saat mengikuti pemilu mereka cukup berbangga hati.

Budaya politik partisipan utamanya banyak terjadi di negara-negara dengan tingkat kemakmuran dan keadilan yang cukup tinggi. Jarang budaya politik partisipan terdapat di negara-negara yang masih bercorak otoritarian, totaliter, ataupun terbelakang secara ekonomi. Atau, jika tidak makmur secara ekonomi, maka budaya politik partisipan muncul dalam sistem politik yang terbuka seperti Demokrasi Liberal.

## **5. Sosialisasi Politik**

Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan dua orang yang memperkenalkan teori sosialisasi politik melalui buku mereka Pengantar Sosiologi Politik. Dalam buku tersebut, Rush dan Althoff menerbitkan terminologi baru dalam menganalisis perilaku politik tingkat individu yaitu sosialisasi politik<sup>5</sup>.

Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja berupa input politik, output politik, maupun orang-orang menjalankan pemerintahan. Fungsi sosialisasi menurut Rush dan Althoff adalah : Melatih Individu

## **6. Memelihara Sistem Politik**

Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Misalnya di Indonesia menganut ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberlakukan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau

---

<sup>5</sup> Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.18

melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum.

Selain itu, sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya suatu negara atau bangsa jika warga negaranya tidak tahu warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri? Mereka akan menjadi warga negara tanpa identitas, tentunya.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rush dan Althoff menyuratkan terdapat 3 cara, yaitu: Imitasi. Melalui imitasi, seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya. Misalnya, Gus Dur adalah anak dari K.H. Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Asy'ari. Gus Dur sejak kecil akrab dengan lingkungan pesantren dan budaya politik Nahdlatul Ulama, termasuk dengan kiai-kainya. Budaya tersebut mempengaruhi tindakan-tindakan politiknya yang cenderung bercorak Islam moderat seperti yang ditampakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama secara umum.

Instruksi. Cara melakukan sosialisasi politik yang kedua adalah instruksi. Gaya ini banyak berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk apa. Cara instruksi ini juga terjadi di sekolah-sekolah, dalam mana guru mengajarkan siswa tentang sistem politik dan budaya politik yang ada di negara mereka.

Motivasi. Cara melakukan sosialisasi politik yang terakhir adalah motivasi. Melalui cara ini, individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain. Dapat saja seorang individu yang besar dari keluarga yang beragama

secara puritan, ketika besar ia bergabung dengan kelompok-kelompok politik yang lebih bercorak sekular.

Misalnya ini terjadi di dalam tokoh Tan Malaka. Tokoh politik Indonesia asal Minangkabau ini ketika kecil dibesarkan di dalam lingkungan Islam pesantren, tetapi ketika besar ia merantau dan menimba aneka ilmu dan akhirnya bergabung dengan komintern. Meskipun menjadi anggota dari organisasi komunis internasional, yang tentu saja bercorak sekular, ia tetap tidak setuju dengan pendapat komintern yang menilai gerapak pan islamisme sebagai musuh. Namun, tetap saja tokoh Tan Malaka ini menempuh cara sosialisasi politik yang bercorak motivasi.

## **7. Agen Sosialisasi Politik**

Dalam kegiatan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen. Agen inilah yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff menggariskan terdapatnya 5 agen sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu:

**Keluarga.** Keluarga merupakan primary group dan agen sosialisasi utama yang membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah lembaga sosial yang paling dekat. Peran ayah, ibu, saudara, memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu. Tokoh Sukarno misalnya, memperoleh nilai-nilai penentangan terhadap Belanda melalui ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunya, yang merupakan keluarga bangsawan Bali menceritakan kepahlawanan raja- raja Bali dalam menentang Belanda di saat mereka tengah berbicara. Cerita-cerita tersebut menumbuhkan kesadaran dan semangat Sukarno untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya yang terjajah oleh Belanda.

**Sekolah.** Selain keluarga, sekolah juga menempati posisi penting sebagai agen sosialisasi politik. Sekolah merupakan secondary group. Kebanyakan dari kita mengetahui lagu kebangsaan, dasar negara, pemerintah yang ada, dari sekolah. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional

selalu tidak terlepas dari pantauan negara oleh sebab peran pentingnya ini.

Peer Group. Agen sosialisasi politik lainnya adalah peer group. Peer group masuk kategori agen sosialisasi politik Primary Group. Peer group adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sebaya tentu sangat mempengaruhi beberapa tindakan kita, bukan ? Tokoh semacam Moh. Hatta banyak memiliki pandangan-pandangan yang sosialisitik saat ia bergaul dengan teman-temannya di bangku kuliah di Negeri Belanda. Melalui kegiatannya dengan kawan sebaya tersebut, Hatta mampu mengeluarkan konsep koperasi sebagai lembaga ekonomi khas Indonesia di kemudian hari. Demikian pula pandangannya atas sistem politik demokrasi yang bersimpangan jalan dengan Sukarno di masa kemudian.

Media Massa. Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Tidak perlu disebutkan lagi pengaruh media massa terhadap seorang individu. Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio, yang berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi kita. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung 'berlebihan.'

Pemerintah. Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, di mana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga, secara tidak langsung, melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui

tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini mempengaruhi budaya politiknya.

Partai Politik. Partai politik adalah agen sosialisasi politik secondary group. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada.

#### **8. Partisipasi politik.**

Dalam komunikasi politik partisipasi<sup>6</sup> yang dilakukan dalam sebuah sistem politik adalah perilaku anggota khalayak yang aktif yang tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pemimpin politik, tapi juga menanggapi dan bertukar pesan dengan para pemimpin itu. James Rosenau meminta kita memperhatikan dua perangkat warga negara yang merupakan khalayak dalam komunikasi politik. Pertama, terdiri atas orang-orang yang sangat memperhatikan politik. Kedua, bahwa ada partisipasi dari orang-orang yang tidak hanya memperhatikan dan menilai, namun diharapkan umpan balik yang dihasilkan akan mengakibatkan adanya tindakan pertukaran pesan dengan pemimpin pemerintahan.

Individu mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda dalam tiga hal atau dimensi: gaya umum partisipasi, motif, yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.

Gaya partisipasi mengacu pada apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukannya. Dibagi menjadi tujuh gaya berpartisipasi, yaitu:

---

<sup>6</sup> Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h..21

- a. Langsung/wakilan, melibatkan diri sendiri dengan hubungan yang dilakukan terus menerus dengan figur politik misalnya dengan cara menelpon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor
- b. Pemerintah. Ataupun dengan ambil bagian dengan cara turut merasakan dengan hanya mengetahui informasi atau pesan politik (cara wakilan).
- c. Kentara/tak kentara, seseorang dengan gaya seperti ini mengutarakan opini publiknya mempunyai tujuan meningkatkan perolehan keuntungan material. Gaya ini melibatkan keuntungan yang kentara dan instrumental. Ada partisipasi yang kurang instrumental dan kurang kentara serta lebih evaluatif.
- d. Individual/kolektif, tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak adalah pada gaya individual bukan pada memasuki kelompok terorganisasi atau pada demonstrasi memberikan tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan.
- e. Sistematis/acak, beberapa individu bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan melalui berdasarkan perhitungan; pikiran perasaan dan usul mereka melakukan sesuatu yang konsisten, tidak berkontradiksi, berkesinambungan dan teguh, dan intensitasnya tidak berubah-ubah.
- f. Terbuka/Tersembunyi, orang yang mengungkapkan opini secara terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukannya.
- g. Berkomitmen/tak berkomitmen, warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan atau program bertindak dengan bersemangat dan antusias.
- h. Derita/kesenangan, seseorang menaruh perhatian kepada politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang

menyenangkan. Yang lain ingin mencapai sesuatu yang lebih jauh dari politik melalui partisipasi.

Motif partisipasi menyangkut faktor yang meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Dibagi menjadi lima motif, yaitu:

- a. Sengaja/tak sengaja, beberapa warga negara mencari informasi dan peristiwa politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bisa menjadi berhasrat berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijakan pejabat pemerintahan. Yang menyebabkan mereka berpartisipasi adalah keadaan, bukan dengan sengaja.
- b. Rasional/emosional, orang yang mempunyai tujuan tertentu, teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan dan hasilnya, disebut bermotivasi rasional. Sementara beberapa orang bertindak tanpa berpikir, semata-mata karena dorongan hati, kecemasan, kekhawatiran, frustrasi, kecenderungan, praduga, harapan, cita-cita, dan perasaan lain yang ditentukan.
- c. Partisipasi Emosional.
  - 1) kebutuhan psikologi/sosial, menggunakan politik untuk memproyeksikan kebutuhan psikologis dan meningkatkan persahabatan sosial, mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang statusnya diinginkan, atau meningkatkan posisi kelompok sosialnya dengan kelompok sosial lain.
  - 2) Diarahkan dari dalam/luar, partisipasi politik yang diarahkan dari dalam diri pribadi dan dari luar erat kaitannya dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk partisipasi politik. Orang yang diarahkan oleh dirinya sendiri adalah orang yang beraksi sendiri, yaitu orientasi dan kecenderungannya diperoleh dari bimbingan orang tuanya. Sebaliknya, orang yang diarahkan dari luar lebih kosmopolitan, menanggapi

berdasarkan orientasi yang diperoleh dari lingkungan yang jauh lebih luas ketimbang dari orang tua.

- 3) Berpikir/tidak berpikir, setiap orang berbeda dalam menyusun tingkat kesadaran ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi itu terhadap dirinya dan orang lain.

Konsekuensi Partisipasi menyangkut interpretatif seseorang sehingga menimbulkan konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik. Dibagi kedalam tiga konsekuensi, yaitu:

- a. Fungsional/disfungsional, tidak setiap bentuk partisipasi memajukan tujuan seseorang.
- b. Sinambung/terputus, partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung dan apabila sebaliknya maka konsekuensinya terputus.
- c. Mendukung/menuntut, melalui beberapa tindakan, orang menunjukkan dukungan terhadap rezim politik yang ada. Misalnya dengan memberikan suara pada Pemilu, membayar pajak, mematuhi hukum, dan lain-lain. Namun ada juga yang mengajukan tuntutan kepada pejabat pemerintahan.

# BAB 2

## PERTEMUAN KEDUA SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK

### A. Pendahuluan

Dalam sebuah sistem politik, terdapat dua struktur politik yang menjalankan sistem politik di sebuah negara. Dua struktur politik tersebut adalah supra struktur politik dan infra struktur politik. Untuk lebih jelasnya masing masing struktur tersebut akan dibahas berikut ini:

#### 1. Infra Struktur Politik

Infrastruktur politik<sup>7</sup> sering disebut sebagai bangun bawah politik atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan-kesamaan lainnya. Pengelompokan infrastruktur politik yang palig nyata dalam kehidupan modern, misalnya :

- a. Partai Politik, merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional, seperti melalui pemilihan umum.

---

<sup>7</sup> Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.25

- b. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial, dan budaya, organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum.
- c. Kelompok Kepentingan (Interest Group), merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, kelompok ini tidak ikut dalam pemilihan umum.
- d. Kelompok Penekan( Pressure Group) ,merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara persuasi, propaganda, atau cara-cara lain yang dipandang lebih efektif. Mereka antara lain, industriawan, dan asosiasi lainnya.
- e. Kelompok Tokoh Masyarakat (Opinion Leaders), merupakan kelompok dari tokoh- tokoh masyarakat, baik tokoh-tokoh agama, masyarakat adat, dan budaya.
- f. Media Massa (Pers), yaitu media massa dalam arti sempit, yang meliputi surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin pada kantor, maupun media massa dalam arti luas, yang meliputi media cetak, audio, audio visual, dan media elektronik

Kelompok infrastruktur politik tersebut sangat penting artinya dalam sistem politik karena secara nyata merekalah yang menggerakkan sistem politik, memberikan input, terlibat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik, mengartikulasikan kepentingan politik, melakukan sosialisasi politik, melakukan seleksi kepemimpinan politik, dan menyelesaikan sengketa politik yang terjadi diantara berbagai pihak didalam dan diluar serta mempunyai daya ikat baik secara ke dalam maupun ke luar.

## 2. Supra Struktur Politik

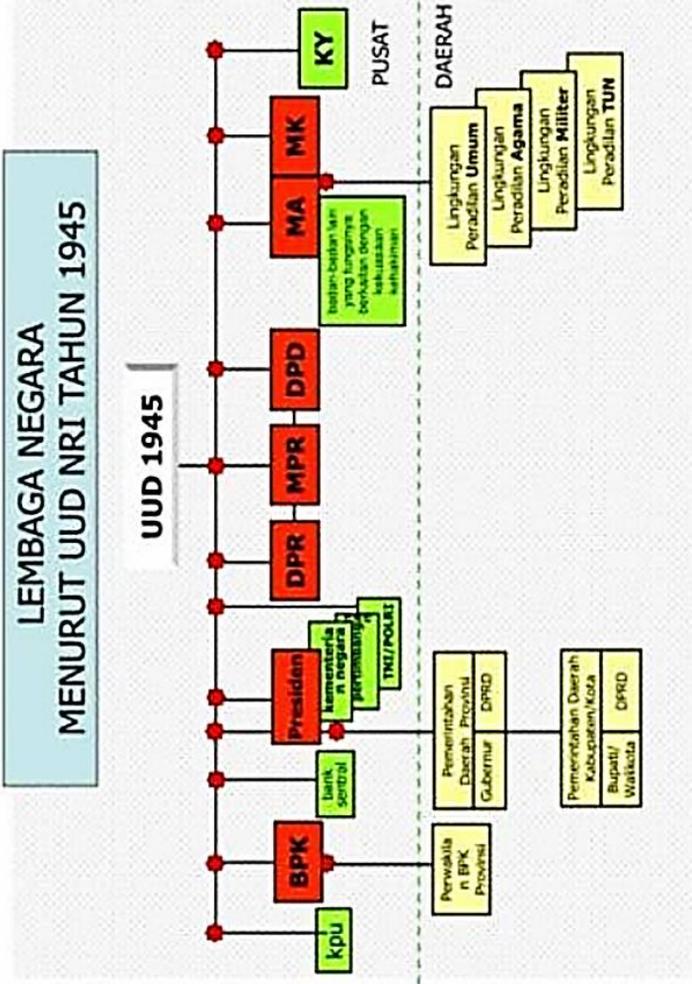
Supra struktur politik<sup>8</sup> sering disebut sebagai bangunan atas politik atau mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah, lembaga-lembaga tersebut bertugas mengkonversi inputs yang terdiri dari tuntutan, dukungan, dan sikap masa bodoh menjadi output yang berupa ganjaran, deprivasi dan kebijakan-kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut dapat diberi nama yang berbeda-beda Montesquieu memberi nama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan menurut teori dikotomi dikenal sebagai lembaga pembuat keputusan dan pembuat pelaksana keputusan.

Lembaga yang masuk dalam supra struktur politik adalah lembaga - lembaga negara yang berhak atau mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan atau peraturan. Pasca amandemen UUD 1945, di Negara Indonesia terdapat beberapa perubahan terkait dengan banyaknya lembaga negara. Ada lembaga yang dihapus, tetapi juga ada lembaga baru yang dimunculkan. Salah satu lembaga yang dibubarkan adalah DPA, sedangkan lembaga baru yang muncul adalah KPK. Berikut adalah lembaga - lembaga negara yang ada di Indonesia.

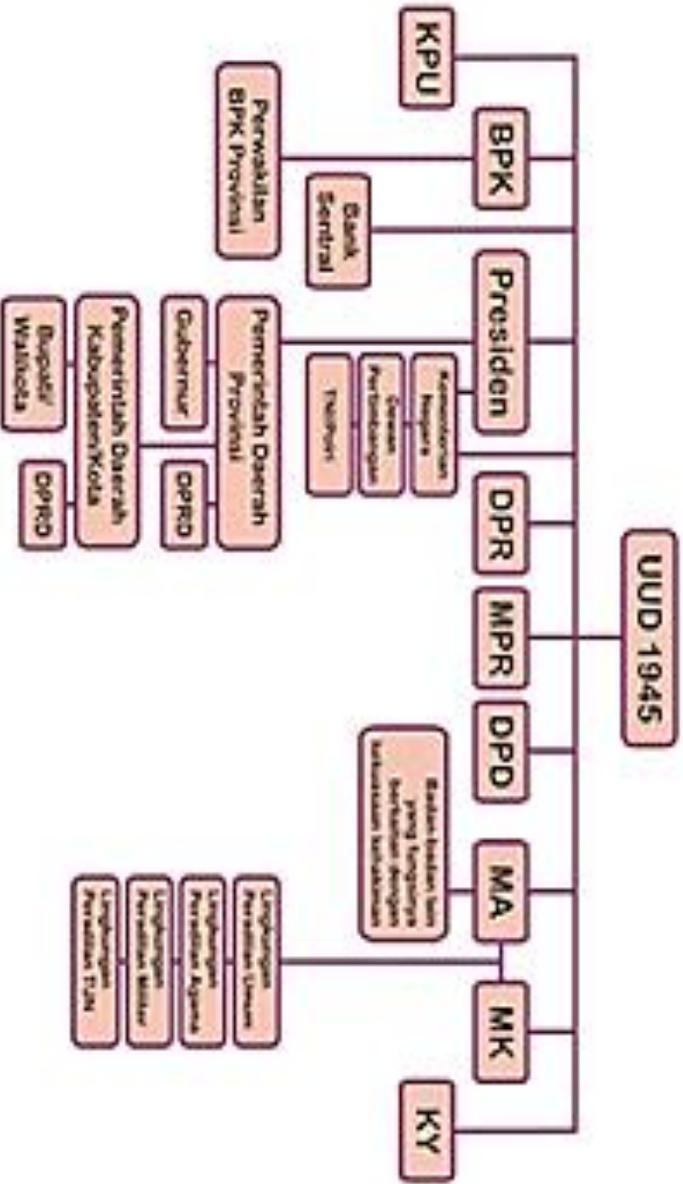
- a. Representation bodies: Merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat
  - b. Governing Bodies : Merupakan Lembaga Eksekutif
  - c. Support Bodies : Merupakan lembaga pendukung
  - d. Judiciary Bodies : Merupakan Lembaga Yudikatif
  - e. Election Bodies : Merupakan lembaga Pemilihan umum
  - f. Monetary Body : Merupakan lembaga moneter
  - g. Auditing Body : Merupakan lembaga Audit
  - h. Independent Body : Merupakan lembaga independen
- Struktur lembaga negara adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.27



Sumber: <https://www.google.co.id> Lembaga-Negara-Indonesia (2024)



Sumber: <https://2.bp.blogspot.com/lembaga-negara1.gif> (2024)

Masing masing lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi masing masing. Sesuai dengan amandemen UUD 1945, beberapa lembaga juga mengalami perubahan Tupoksi. Salah satu lembaga yang mengalami perubahan tugas pokok dan fungsi adalah MPR. Bahkan Kedudukan MPR pun mengalami perubahan dari lembaga tertinggi negara, setelah ada amandemen UUD 1945 menjadi lembaga tinggi negara. Berikut tugas pokok fungsi dan kewenangan masing masing lembaga :

- a. Representation Bodies : Lembaga nya adalah MPR, DPR, DPRD, DPD. Tugas dan kewenangan masing masing lembaga adalah sebagai berikut
  - 1) MPR: Mengubah dan menetapkan UUD, Melantik Presiden dan Wapres
  - 2) DPR: Legislasi, Budgeting, Monitoring
  - 3) DPRD: Menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain terkait pelaksanaan otonomi daerah
  - 4) DPD: Legislasi ( Mengajukan RUU ), Monitoring Otda
  - 5) Kedudukan DPD merupakan Check and Balance dalam kekuasaan Lembaga legislatif
  - 6) Konstitusi tidak memberikan ketentuan yang tegas mengenai tugas dan kewenangan DPD
- b. Governing Bodies : Lembaga lembaganya adalah Presiden dan Wapres, Dewan penasehat presiden, Kementerian negara, Pemerintah Daerah  
Presiden dan Wakil presiden, Kewenangannya:  
Eksekutif: Hankam (Kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU, meyakini keadaan darurat, perang, dll), Hubungan internasional (mengangkat duta dan Konsul), Kebijakan politik (memberikan amnesti, dll)  
Legislasi: Menetapkan PP, Mengajukan RUU,  
Menetapkan Perpu  
Yudikasi: Memberikan grasi dan rehabilitasi

Realisasi dari kewenangan ini terbentuk beberapa lembaga tinggi negara

Dewan pertimbangan presiden, kewenangannya:

Memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden

Kementerian negara: Membidangi urusan tertentu dalam negara

Pemerintah daerah, provinsi, kota: Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali yang dijalankan oleh pemerintah pusat

- c. Support Bodies : Lembaganya adalah TNI dan POLRI  
TNI ( AU, AD, AL ), Kewenangannya: Mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangannya: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

- d. Judiciary Bodies : Lembaganya adalah MA, MK dan Badan lainnya

MA, Kewenangannya: Mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

MA membawahi 4 lembaga peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer.

MK, Kewenangannya: Menguji UU terhadap UUD, Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus atas perselisihan hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wapres.

Istilah yang diberikan untuk MK adalah Penjaga Konstitusi (The Guardian of Constitution) Badan2 lainnya kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah bagian dari Criminal Justice System. Maka badan yang terkait adalah:

- Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga pemasyarakatan, dan lembaga lain yang terkait dengan hukum semisal KPK.
- e. Election Bodies : Lembaganya adalah Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu  
KPU, kewenangannya menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wapres, Legislatif Bawaslu kewenangannya mengawasi jalannya pemilu  
KPU bersifat nasional, mandiri dan tetap Di daerah ada KPUD dan Panwaslu.
  - f. Monetary Body : Lembaganya adalah Bank Sentral (Bank Indonesia ) BI punya kewenangan dalam bidang moneter. BI punya spesifikasi khusus dalam bidang moneter, untuk itu harus independen dan terpisah dari lembaga tinggi lainnya.  
Namun BI punya kewajiban melakukan laporan terbuka terhadap masyarakat melalui media tentang rencana dan pelaksanaan kebijakan moneter setiap awal tahun. Wajib lapor secara tertulis kepada Presiden dan Wapres tentang pelaksanaan kebijakan moneter.
  - g. Auditing Body : Lembaganya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kewengannya: Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK mempunyai fungsi audit terhadap pengelolaan keuangan negara  
Kedudukannya yang independen dan diatur dalam konstitusi memberikan kedudukan yang kuat dan harus terpisah dari governing bodies
  - h. Independent Body : Lembaganya adalah Komisi Yudisial (KY)  
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim  
KY berada dalam Bab kekuasaan kehakiman. Namun dari kewenangan yang diberikan, KY tidak termasuk dalam Judiciary Bodies

## **B. Analisa Politik Indonesia Era Orde Lama**

Analisa Sistem Politik<sup>9</sup> Indonesia setiap periode atau rezim yang berkuasa akan menggunakan aspek-aspek: Penyaluran input, Pemeliharaan nilai, Kapabilitas, Integrasi vertikal, Integrasi horisontal, Gaya politik, Kepemimpinan, Partisipasi massa, Keterlibatan militer, Aparat negara, Stabilitas sistem. Dengan demikian analisa sistem politik Indonesia dari Era Orde lama sampai dengan pemerintahan saat ini ( Era kepemimpinan SBY ) menggunakan analisa aspek yang sama. Meskipun memakai aspek analisa yang sama, akan tetapi bisa dipastikan hasil analisa dari setiap aspek akan memperoleh hasil yang berbeda karena setiap rezim mempunyai karakter kepemimpinan yang berbeda pula. Analisa SPI Era Orde Lama di fokuskan mulai dari implementasi demokrasi liberal/Parleментар tahun 1945-1959 dan Demokrasi terpimpin 1960-1965.

### **1. Demokrasi Liberal/ Parleментар**

- a. Penyaluran input: Tinggi, tapi sistem belum memadai. Aspirasi rakyat melalui partai politik ( Sistem multi partai ), dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem belum stabil, Sistem Parleментар di Indonesia tidak stabil ( Masa kerja kabinet rata-rata hanya 8 Bulan.
- b. Pemeliharaan Nilai: Penghargaan HAM Tinggi. Penggunaan UUDS 1950 dianggap sebagai penghormatan atas Hak Asasi Manusia karena UUDS 1950 disusun berdasarkan Universal Declaration of Human Right 1948. The four freedoms versi Franklin D Roosevelt: Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, Kebebasan beragama, Kebebasan dari ketakutan, Kebebasan dari kemlaratan.  
Kapabilitas: Baru sebagian yang digunakan, kebanyakan masih potensial.  
Ekstraktif: Penyerapan SDM berjalan bagus melalui partai politik, penyerapan SDA kurang maksimal.

---

<sup>9</sup> Awang Darumurti (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.27-37

- Distributif: Tidak seimbang, Parlemen terlalu kuat dibandingkan Presiden  
 Regulatif: Pada tataran Undang-Undang Dasar berjalan dengan baik  
 Simbolik: Diperankan sangat bagus oleh Soekarno  
 Responsif: Justru cenderung reaktif
- c. Integrasi Vertikal: Dua arah (Top Down, Bottom Up). Ir. Soekarno sebagai “arsitek” integrasi nasional (Top Down), sementara itu rakyat juga merespon dengan kepercayaan yang baik (Bottom Up)
  - d. Integrasi Horizontal: Solidarity Maker (Soekarno) dan Administrator (Hatta)
  - e. Gaya Politik: Ideologis. Cerminan Ideologis yang kental dapat dilihat dari variasi ideologi yang ada di parlemen, antar ideologi sangat berjarak
  - f. Kepemimpinan: Angkatan Sumpah Pemuda 1928
  - g. Partisipasi Massa: Sangat Tinggi, bahkan muncul kudeta
  - h. Keterlibatan Militer: Militer dikuasai oleh sipil
  - i. Aparat Negara: Loyal kepada kepentingan kelompok atau partai politik
  - j. Stabilitas: Instabilitas

## 2. Demokrasi Terpimpin ( 1959 - 1965 )

- a. Penyaluran input: tinggi, tapi tidak tersalurkan karena ada Front Nasional. Soekarno ( nasionalis ) sebagai pusat kekuatan politik memiliki otoritas yang tinggi untuk menilai input dari rakyat, apakah akan diterima atau tidak
- b. Pemeliharaan nilai: Penghargaan HAM rendah. Four freedoms tidak berjalan dengan baik  
 Kapabilitas: Cenderung Abstrak, Simbolik, ekonomi tidak maju  
 Ekstraktif: Penyerapan SDM dan SDA tidak berjalan dengan baik  
 Regulatif: Kekuatan Presiden diatas segalanya, bahkan UUD 1945 bisa dilanggar  
 Distributif: Trias politika tidak berjalan

Simbolik: Soekarno masih sangat bagus memainkan aspek ini

- c. Integrasi Vertikal: Atas bawah ( Top Down ). Hal ini terjadi karena peran partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat “dikebiri”, sehingga kekuatan rakyat dari bawah ( Bottom Up ) tidak punya kekuatan
- d. Integrasi Horizontal: Solidarity maker yang berperan sangat besar
- e. Gaya politik: Ideolog, NASAKOM
- f. Kepemimpinan: Tokoh Kharismatik dan paternalistik
- g. Partisipasi Massa: dibatasi, konsekuensi logis dari dibatasinya peran Partai Politik dan DPR adalah rendahnya partisipasi massa ( dalam artian substantif)
- h. Keterlibatan Militer: militer masuk ke pemerintahan
- i. Aparat negara: Loyal kepada negara
- j. Stabilitas: stabil

### **Analisa Politik Era Orde Baru**

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah:

1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS\$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS\$1.000
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi buta huruf

Sedangkan kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah:

1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata
3. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
4. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

5. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel

Menurut Liddle dalam artikel "Warisan Buruk Orde Baru" (hal 92), mengatakan bahwa Sistem politik Orde Baru dibangun atas dasar otoriterisme. Lembaga-lembaga legislatif, partai, pemilu, ormas, pers, dan hampir semua organisasi yang berpotensi mengancam kedudukan pemerintah dikuasai dan dikekang oleh Presiden Soeharto dan bawahan-bawahannya.

1. Penyaluran input: Rendah, banyak pembatasan yang dilakukan oleh Rezim Orba
2. Pemeliharaan nilai: banyak terjadi pelanggaran HAM. Beberapa yang terpublikasi: Peristiwa Malari, DOM Aceh, Kasus di Timor timur, 27 Juli, dll
3. Kapabilitas sistem: Yang paling menonjol adalah kapabilitas simbolik dan regulatif

Ekstraktif: Penyerapan SDM tidak berjalan dengan baik, mengingat hanya orang-orang di sekitar Soeharto yang bisa masuk ke lingkaran kekuasaan negara. SDA dieksploitasi secara masif atas nama pembangunan

Distributif: Trias politika tidak berjalan, Eksekutif ( Soeharto) terlalu dominan, lembaga Legislatif dan Yudikatif merupakan kepanjangan tangan Soeharto

Regulatif: Regulasi dibuat hanya untuk membatasi potensi ancaman yang akan menggoyang sistem politik yang dibangun oleh Rezim Orde Baru

Sistem Politik Orde Baru di sokong oleh 5 UU Politik : UU Pemilu (UU NO 1/1975), UU tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU NO 2/1975), UU tentang partai politik dan Golkar (UU NO 3/1975), UU tentang referendum (UU NO 5/1985), dan UU tentang ormas (UU NO 8/1985).

Konsep Dwifungsi ABRI oleh Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto. Birokrasi/PNS Berpolitik

Simbolik: The smiling general, Bapak pembangunan Responsif: Responsif "by design"

Kelima paket undang-undang ini sebenarnya tidak dibuat dalam waktu bersamaan. Tiga yang pertama-UU Pemilu, UU Kedudukan DPR/MPR, dan UU Parpol Golkar-dibuat di awal Orde Baru; dan dua yang terakhir-UU Referendum dan UU Keormasan di tahun 1985. Menurut Buyung dan Machfud, di awal Orde Baru memang dibutuhkan satu pemerintahan yang kuat. Karena itu, undang-undangnya sengaja dibuat selltralistis kendati disadari juga bahwa itu bakal kontroversial. Selama masa darurat, hukum besi ini memang menjadi alternatif yang baik. Tapi, tidak lagi setelah keadaan beranjak

Pada tahun 1971 atau enam belas tahun setelah Pemilu pertama.. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Golkar yang menjadi alat kekuasaan pemerintah pada waktu itu menjadi pemenang pemilu. Untuk memenangkan Golkar, seluruh pegawai negeri sipil diharuskan menyalurkan aspirasinya melalui partai ini. Soal sistem pemungutan suara (distrik atau proporsional) dan perihal jumlah anggota yang akan diangkat. Yang terakhir ini, presiden ingin anggota legislatif yang diangkat sampai 50 persen. Sementara itu, partai politik mengatakan cukup lima persen. Akhirnya, pembahasan deadlock, yang membuat pemilihan umum diundur. Kemudian terjadi kompromi: yang diangkat 22 persen saja dan konsesi bagi partai politik adalah sistem distrik ditiadakan.

Pada tahun 1975 melalui UU No 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. UU Pemilu pada masa Orde Baru mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia dimana Presiden sekaligus sebagai lembaga pembina politik.

Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan

kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.

Keberadaan pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Keberadaan Ormas ( Organisasi massa ) yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri.

1. Integrasi vertikal: Atas bawah

Berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah pada waktu itu mematikan aspirasi dari bawah yang bersifat kritis.

2. Integrasi horisontal: Dikendalikan oleh Eksekutif, dengan demikian terjadi integrasi yang semu

3. Gaya politik: intelektual, pragmatik, pembangunanisme

4. Kepemimpinan: Teknokrat dan ABRI

5. Partisipasi massa: Awalnya bebas terbatas, namun kemudian sangat dibatasi

6. Keterlibatan militer: Merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI

Mengenai susunan keanggotaan DPR dan MPR. Menurut Machfud ada dua hal yang perlu dipersoalkan pada masa ORBA:

**Pertama:** porsi anggota yang diangkat terlalu besar untuk ukuran sebuah negara demokrasi. Kedua: kerancuan anggota

**Kedua:** lembaga itu. Terkadang tak ada kriteria, tergantung presiden saja. "Terserah presiden saja. Kalau presiden menghendaki, dari golongan tukang becak pun bisa," ujarnya.

Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen. Presiden

sebagai pengendali utama peran militer sehingga kelompok militer diupayakan sebagai kelompok pendukung suharto

Hal ini tampak pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru. Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya.

Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok Nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam. Contohnya adalah Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.

1. Aparat negara: Loyal kepada negara
2. Birokrasi yang terstruktur secara sistematis dengan dikendalikan secara penuh oleh pemerintah pusat membuat aparat negara mau tidak mau harus taat pada negara
3. Stabilitas sistem: Stabil

### **Analisa Politik Era Reformasi**

Semenjak Soeharto lengser dari kekuasaannya, lebih dari 13 tahun yang lalu, Indonesia telah memasuki apa yang dikenal dengan sebutan "Masa Reformasi". Dalam khasanah ilmu

politik sendiri, masa ini disebut sebagai masa transisi dari rejim otoritarianisme ke sebuah pembentukan rejim yang lebih demokratis. Untuk membangun momentum demokratis yang dimaksud, diperlukan adanya beberapa perubahan mendasar pada sistem politik, yang hanya dapat terwujud melalui serangkaian tindakan. Termasuk diantaranya adalah amandemen konstitusional.

Isu-isu pokok yang diangkat untuk dikaji dan direformasi adalah:

1. Reformasi konstitusional dan perundang-undangan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendukung transisi demokrasi
2. Otonomi daerah untuk menjamin partisipasi politik yang inklusif dan administrasi publik yang efektif serta terselenggaranya pembangunan di seluruh Indonesia
3. Mendefinisikan kembalihubungan sipil-militer untuk menjamin supremasi badan-badan perwakilan yang pilih
4. Memberdayakan peran masyarakat sipil baik sebagai pengawas maupun sebagai penggerak pemerintahan demokratis
5. Meningkatkan partisipasi aktif para perempuan dalam politik dan masyarakat
6. Membicarakan tentang kesenjangan fundamental dan kegelisahan di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pergolakan sosio-ekonomi dan kecurigaan antar agama.
7. Menjamin bahwa Konstitusi dan semua hukum yang disusun sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional
8. Indonesia harus meratifikasi semua konvensi internasional tentang hak asasi manusia
9. Menjamin bahwa Prinsip-Prinsip Arah Kebijakan Negara dan Piagam tentang Hak- Hak dan Kewajiban Mendasar Negara dan Warga Negara diikutsertakan dalam Konstitusi
10. Menjamin bahwa hak-hak tersebut tidak dipersingkat kecuali dalam kondisi-kondisi
  - a. Penyaluran input: tinggi dan terpenuhi
  - b. Pemeliharaan nilai: Penghargaan HAM tinggi

c. Kapabilitas sistem:

Ekstraktif: Penyerapan SDA dan SDM mengikuti semangat otonomi daerah

Distributif: Trias politika berjalan lebih bagus, Legislatif mempunyai kekuatan

Fenomena Sistem politik Indonesia masa orde Baru yaitu memiliki ciri-ciri lembaga eksekutif yang kuat yang didukung oleh lembaga legislatif yang lemah. Hal ini disebabkan oleh adanya anggota-anggota yang di angkat dari kalangan militer dan golongan-golongan fungsional yang lebih memperjuangkan kepentingan eksekutif daripada kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Hal ini menyebabkan hilangnya kontrol institusional terhadap lembaga eksekutif. Konsep Perubahan adalah dipusatkan di sekitar komposisi lembaga legislatif yang paling cocok bagi Indonesia, dimana legislatif bisa mendapatkan kekuasaan untuk membuat aturan perundang- undangan disamping juga berfungsi sebagai pengawas tindakan lembaga eksekutif serta institusi- institusi pemerintah lainnya. Keseimbangan diantara legislatif yang berdaya dan lembaga eksekutif yang efektif.

Fenomena Sistem Politik Orde Baru : Secara efektif Indonesia memiliki suatu sistem parlemen unikameral. Fungsi legislatifnya dijalankan lebih banyak , tapi tidak seluruhnya oleh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang dipilih. Sementara itu majelis penuh yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang terdiri dari anggota yang dipilih di tambah dengan anggota yang diangkat, berperan sebagai suatu institusi pemilihan yang memilih Presiden, membentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara dan meratifikasi amandemen. Mengubah parlemen menjadi dua kamar (Bikameral)

Dasarnya adalah adanya perwakilan daerah yang menjamin tersalurnya kepentingan dan aspirasi daerah-daerah di dalam lembaga legislatif nasional. Dengan kondisi keterwakilan seperti itu, diharapkan akan memperkuat pula integrasi nasional.

Selain itu, kamar yang kedua ( perwakilan daerah ) akan menjadi suatu institusi yang berguna untuk menarik keluar daerah dari hanya sekedar perhatian kewilayahannya, menjadi berpartisipasi dan turut bertanggungjawab dalam mengelola bersama seluruh bangsa ini. Lembaga legislatif harus hanya terdiri dari wakil-wakil yang dipilih. Wakil dari TNI di dalam lembaga legislatif harus dihapuskan. Lembaga legislatif membuat semua perundang-undangan, mengambil inisiatif merancang perundang-undangan kepemimpinan, meratifikasi perjanjian dan mengkaji kontrak internasional

Lembaga legislatif harus melakukan pengawasan terhadap militer menyangkut:

1. Perencanaan anggaran militer
2. Pengangkatan perwira senior
3. mobilisasi militer
4. fungsi dinas intelijen pada militer

Lembaga legislatif mengawasi akuntabilitas lembaga eksekutif pada hal-hal yang berkaitan dengan:

1. pengeluaran anggaran publik
2. pengangkatan pejabat senior
3. kinerja lembaga eksekutif

Lembaga legislatif diberdayakan agar dapat mengkaji kebijakan publik Mendefinisikan kekuasaan, tugas dan fungsi Presiden dalam Konstitusi, terdiri dari :

Kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan dan aturan-aturan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sesuai dengan panduan dan maksud yang tertera dalam statuta tentang kekuasaan. Berkewajiban untuk berkonsultasi dengan parlemen dan Gubernur Bank Sentral untuk menjamin bahwa kebijakan fiskal dan perencanaan ekonomi dapat sesuai satu dengan lainnya. Berkewajiban untuk memerintah berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, menjalankan kekuasaannya dengan transparan dan dibawah aturan hukum.

Hal Ini memerlukan : i) Pengangkatan pejabat publik, badan badan, komitekomite para-statal harus dilakukan secara terbuka dan dipilih lewat proses pengangkatan yang kompetitif ; ii) tender untuk penyediaan barang-barang dan jasa bagi operasional negara harus transparan Berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada parlemen dan kepada badan-badan konstitusional lain seperti badan Ombudsman dan badan Pengawasan Umum

Disyaratkan untuk patuh kepada ketentuan bertindak yang ditetapkan oleh parlemen Menghapus DPA dari konstitusi mendatang Responsif: Aspirasi masyarakat diapresiasi lewat sistem multi partai Simbolik: Kekuatan sistem politik sangat dipengaruhi kharisma tokoh ( Mulai dari Era Gusdur, Megawati, SBY ) Regulatif: Amandemen UUD 1945, perubahan sistem pemilihan umum, Reformasi hukum dan badan peradilan

1. Integrasi vertikal: Atas-bawah, bawah-atas, diperkuat dengan pelaksanaan otonomi daerah
2. Integrasi horisontal: Awal reformasi terjadi euforia ( legislatif heavy), selanjutnya bisa sesuai konsep trias politika. Konflik elit politik sering terjadi
3. Partisipasi massa: Tinggi
4. Gaya politik: Pragmatis, koalisi di parlemen sangat cair, mudah terjadi perpecahan, elit "hobby" mendirikan partai politik baru
5. Kepemimpinan: Purnawirawan, politisi, sipil
6. Keterlibatan militer: dibatasi
7. Aparat negara: Loyal kepada negara
8. Stabilitas sistem: Tidak stabil

### **Analisa Politik Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono**

1. Penyaluran input: Tinggi, tetapi belum banyak yang bisa terakomodasi dengan baik
2. Pemeliharaan nilai: Dari sisi demokrasi ( kebebasan berbicara dan berpendapat ) masih terpelihara, namun dari sisi keamanan dan ekonomi masih kurang maksimal

3. Kapabilitas sistem

Ekstraktif: SDA dan SDM masih mengikuti semangat otonomi daerah

Distributif: Kekuasaan dibangun dengan melakukan koalisi besar dengan parlemen ( trias Politika menjadi kurang bermakna )

Regulatif : Sisi kelemahannya terletak pada politik transaksional dalam pembuatan kebijakan di DPR

Responsif: Negara kadang kurang cepat dalam merespons tuntutan masyarakat Simbolik : Menjadi kekuatan utama untuk stabilitas sistem politik

4. Integrasi vertikal : atas bawah, bawah atas ( namun politik pencitraan memegang peranan penting )

5. -Integrasi horisontal: Dibangun dengan melakukan koalisi besar, dibentuk Setgab.

6. Partisipasi massa : Tinggi, dengan cacatan lebih banyak tuntutan daripada dukungan

7. Gaya politik : Pragmatis, koalisi dibangun atas dasar kepentingan ( bukan visi misi atau ideologi )

8. Kepemimpinan: Pengusaha, politisi

9. Keterlibatan militer: dibatasi

10. Aparat negara : loyal dengan negara

11. Stabilitas sistem: Kurang stabil

# BAB 3

## PERTEMUAN KETIGA PARTAI POLITIK DAN KELOMPOK KEPENTINGAN

### A. Partai Politik

#### 1. Pengertian Partai Politik

Carl friedrich dalam (Surbakti : 1999 : 116), memberi batasan mengenai partai politik , yaitu sekelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan idiil kepada para anggotanya. Sementara itu, Soltau dalam (Surbakti : 1999 : 116), juga memberikan definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Dari uraian tersebut di atas dapat kita rumuskan pengertian partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan

kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

## **2. Fungsi Partai Politik**

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis).

Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun ketiga kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan / atau eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Dalam sistem politik totaliter walaupun dilaksanakan maka pemilihan umum lebih berfungsi sebagai sarana pengesahan calon tunggal yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh partai tunggal. Namun, partai politik baik dalam sistem politik demokrasi maupun dalam sistem politik totaliter, juga melaksanakan sejumlah fungsi lain. Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi lain tersebut.

### **a. Sosialisasi Politik**

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung

dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni : pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

- 1) Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai- nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pemahaman nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik.
- 2) Indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap oleh pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Indoktrinasi politik ini dilakukan melalui berbagai forum pengarahan yang penuh dengan paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin.

b. Rekrutmen Politik.

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala suatu partai merupakan mayoritas di dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup suatu sistem politik akan terancam berakhir.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga negara.

#### d. Pemadu Kepentingan

Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan kadang kala saling bertentangan seperti antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah tapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisiensi dan penerapan teknologi yang canggih tetapi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, dan kehendak untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan; antara kehendak untuk mencapai dan mempertahankan mutu pendidikan tinggi dengan jumlah penerimaan mahasiswa yang lebih sedikit, dan kehendak masyarakat untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi; antara kehendak menciptakan dan memelihara kestabilan politik dan kehendak berbagai kelompok seperti mahasiswa, intelektual, pers, dan kelompok agama untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas.

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda dan bahkan sering bertentangan itu maka partai politik dibentuk. Menurut Almond dan Powel dalam (Surbakti :1999: 119), yang dimaksud dengan fungsi pemadu kepentingan adalah kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi berbagai alternatif kepentingan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Sebagaimana dikemukakan di atas, fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi. Karena dalam sistem politik totaliter, kepentingan dianggap seragam maka partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi pemaduan kepentingan. Alternatif kebijakan umum yang diperjuangkan oleh partai tunggal

dalam sistem politik totaliter lebih banyak merupakan tafsiran atas ideologi doktriner. Dalam sistem politik demokrasi, ideologi digunakan sebagai cara memandang permasalahan dan perumusan penyelesaian permasalahan.

e. Komunikasi Politik

Pendapat Lucyan W. Pie dalam (Surbakti :1999: 119), bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Kedua fungsi ini dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi.

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskannya sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikan) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian segala kebijakan pemerintah yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Sebaliknya, segala aspirasi, keluhan dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi, proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

f. Pengendalian Konflik

Konflik yang dimaksud di sini dalam arti yang luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik merupakan gejala yang sukar dielakkan.

Akan tetapi, tentu suatu sistem politik hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan dirinya sehingga permasalahannya bukan menghilangkan konflik itu, melainkan mengendalikan konflik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi di antara para wakil rakyat yang berasal dari partai-partai politik. Apabila partai-partai politik keberatan untuk mengadakan kompromi maka partai politik bukannya mengendalikan konflik, melainkan menciptakan konflik dalam masyarakat.

g. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.

Tolok ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik, yakni meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolok ukur tersebut. fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya secara terus menerus.

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan juga tolok ukur tersebut sebab tolok ukur itu pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama. Dalam sistem kabinet parlementer, kontrol yang dilakukan oleh partai politik oposisi terhadap kebijakan partai yang memerintah dapat menjatuhkan partai yang berkuasa apabila mosi tidak percaya (karena pemerintah sulit memberi penjelasan yang memuaskan terhadap isi kontrol politik oposisi) mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen.

Menurut Samuel P. Huntington dalam (Surbakti : 1999 : 121), bahwa berdasarkan kenyataan tidak semua fungsi dilaksanakan dalam porsi dan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak hanya bergantung pada sistem politik yang menjadi konteks yang melingkupi partai politik, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain. Di antara faktor lain itu berupa tingkat dukungan yang diberikan anggota masyarakat terhadap partai politik (berakar tidaknya partai dalam masyarakat), dan tingkat kelembagaan partai yang dapat diukur dari segi kemampuan adaptasi, kompleksitas organisasi, otonomi, dan kesatuannya.

#### h. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan ialah sarana yang digunakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan secara bersama-sama menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah. Kepentingan tersebut dapat berupa kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, nilai-nilai, dan harapan-harapan – yang bisa terpenuhi, akan tetapi bisa juga dikecewakan oleh tindakan-tindakan pemerintah. Seseorang ataupun sekelompok orang bisa pula diuntungkan akan tetapi bisa dirugikan oleh tindakan atau keputusan tersebut. Oleh karena itu warga negara sangat memperhatikan dan berkepentingan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Walaupun kelompok kepentingan yang terorganisir tidak mudah dibedakan dengan partai politik, akan tetapi ada satu perbedaan yang nampaknya secara umum diterima. Suatu kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, dan pada waktu yang sama tidak berkeinginan memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan-jabatan publik, yaitu jabatan politik, maupun jabatan pemerintahan.

Dalam praktek, perbedaan tersebut tidak setegas itu. Keanggotaan kelompok kepentingan dan keanggotaan partai politik sering tumpang tindih, dan lebih-lebih lagi, kelompok kepentingan sering terlibat dalam penyeleksian calon-calon keanggotaan partai politik dan selalu berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalam komisi-komisi yang dibentuk oleh

pemerintah. Kadang-kadang pula kelompok kepentingan bahkan berkembang menjadi partai politik.

### **3. Jenis-jenis Kelompok Kepentingan**

Sebagaimana dikatakan oleh Gabriel A. Almond dalam (Mas' oed dan MacAndrews : 2000 : 53), bahwa kelompok-kelompok kepentingan berbeda-beda dalam struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya. Perbedaan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Walaupun kelompok-kelompok kepentingan juga diorganisir berdasar keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama, ataupun berdasarkan isu-isu kebijaksanaan-kelompok kepentingan yang paling kuat, paling besar, dan secara finansial paling mampu adalah kelompok yang berdasarkan pada bidang pekerjaan atau profesi. Berikut ini adalah beberapa jenis kelompok kepentingan yang dikenal, diantaranya adalah :

#### **a. Kelompok Anomik**

Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk secara spontan dan seketika, dan tidak memiliki nilai-nilai, norma-norma yang mengatur serta tidak terorganisir. Jenis kelompok ini terbentuk tanpa ada yang merencanakan sebelumnya, terjadi begitu saja, yang mungkin penyebabnya adalah ketidakpuasan yang lama menumpuk dan dilampiaskan seketika pada saat ada pemicu dan bubar dengan sendirinya. Jenis kelompok ini sering bertumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik nonkonvensional seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan sebagainya. Sehingga apa yang dianggap sebagai perilaku anomik mungkin saja tidak lebih dari tindakan-tindakan kelompok terorganisir (bukan kelompok anomik) yang menggunakan cara-cara nonkonvensional seperti kekerasan. Boleh jadi kelompok terorganisir yang oleh karena kepentingannya tidak terwakili secara memadai dalam sistem politik, melakukan suatu insiden yang

sepintas lalu terkesan terjadi secara spontan dan mengarah kepada ledakan yang tidak dapat dikendalikan lagi, bila salah memahami hakikat kejadian tersebut lalu menganggapnya sebagai tindakan kelompok anomik. Kita harus hati-hati menilai, sebab sering kali yang nampak anomik itu kadang kala merupakan tindakan yang direncanakan secara teliti oleh kelompok kepentingan yang terorganisir.

b. Kolompok Non-Assosiasional

Kelompok kepentingan non-assosiasional pada dasarnya sudah terorganisasi, akan tetapi jarang yang terorganisir dengan rapi dan kegiatannya bersifat temporer. Kelompok ini berwujud seperti kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga, atau pemimpin agama.

Secara teoretis, kegiatan kelompok non-assosiasional terutama sekali merupakan ciri masyarakat belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga bangsawan mendominasi kehidupan politik. Akan tetapi dalam negara industri majupun, kelompok non-assosiasional seperti keluarga-keluarga yang masih berpengaruh, tokoh-tokoh kedaerahan, serta pemimpin-pemimpin agama seringkali menerapkan pengaruhnya yang seringkali lebih besar dari pengaruh kelompok professional. Sarana yang sering digunakan jenis kelompok ini untuk mempengaruhi pemerintah biasanya pertemuan-pertemuan informal yang sering dihadiri oleh pejabat pemerintah maupun pimpinan partai.

c. Kelompok Institusional

Organisasi-organisasi seperti partai politik, perusahaan besar, badan legislatif, militer, birokrasi, dianggap sebagai kelompok kepentingan institusional atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggungjawab melakukan kegiatan lobbying.

Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain selain fungsi artikulasi kepentingan.

Bila kelompok-kelompok kepentingan institusional sangat besar pengaruhnya, hal ini disebabkan oleh basis organisasinya yang kuat. Jenis kelompok kepentingan ini sangat dominan pengaruhnya di negara-negara maju, jika dibandingkan dengan jenis kelompok non-assosiasional.

d. Kelompok Assosiasional

Kelompok assosiasional seperti serikat buruh, kamar dagang, atau perkumpulan pengusaha dan industri (seperti di Indonesia : Kadin, Gapensi, Inkindo, dan lain-lain), paguyuban etnik, persatuan kelompok keagamaan, dan sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dengan cara memakai tenaga staf profesional serta memiliki prosedur standar untuk merumuskan kepentingan.

Kelompok kepentingan ini sangat besar pengaruhnya dalam membela kepentingan mereka. Kegiatan utama mereka adalah melakukan tawar-menawar (bargaining) di luar saluran-saluran partai politik dengan pejabat-pejabat pemerintah tentang kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, atau usul suatu rancangan undang-undang di parlemen. Kelompok ini juga berusaha mempengaruhi pendapat umum (public opinion) dengan cara kampanye-kampanye lewat iklan.

Studi-studi menunjukkan bahwa kelompok kepentingan assosiasional – bila diizinkan berkembang cenderung untuk menentukan perkembangan dari jenis-jenis kelompok kepentingan yang lain. Basis organisasi yang menempatkannya berada di atas kelompok kepentingan non- assosiasional, taktik dan tujuannya sering diakui sah dalam masyarakat. Dan dengan mewakili kelompok dan kepentingan yang luas, kelompok assosiasional dengan efektif bisa membatasi pengaruh anomik, non-assosiasional, dan institusional.

# BAB 4

## PERTEMUAN KE EMPAT SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA

Sistem politik dengan sistem pemerintahan itu berbeda loh, tapi sebelum kita bahas perbedaannya, kita bakalan bahas dulu nih pengertian sistem, pengertian politik dan juga pengertian dari sistem politik<sup>10</sup> itu sendiri.

### A. Pendahuluan

Jadi, sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian, dimana setiap bagian memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Apabila 1 fungsi rusak maka akan sangat mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Sedangkan politik merupakan taktik atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 trik pokok politik yaitu; kewenangan, kekuasaan dan kepentingan. Dari pengertian sistem dan politik diatas dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan kumpulan dari bagian-bagian yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Adapun perbedaan antara sistem politik dengan sistem pemerintahan ialah:

Sistem politik adalah strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu negara sedangkan sistem pemerintahan adalah pelaku yang melaksanakan strategi tersebut. nah dari sini

---

<sup>10</sup> <https://hi.unida.gontor.ac.id/> perbedaannya pengertian politik dan sistem politik, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 09.11 WIB.

temen-temen udah paham kan apa perbedaan antara sistem politik dan pemerintahan.

Teori Sistem Politik David Easton, pendekatan proses input-output politik. Menurut David Easton, dalam bukunya "The Analysis of Political System" Teori David Easton mengenai sistem politik menjelaskan mengenai proses politik, "Authoritative decision" diambil dan dilaksanakan untuk masyarakat. Easton mengemukakan bahwa sistem politik sebagai sistem mempunyai beberapa tanda pengenal. Sedangkan Menurut Macridis "political system is above all, a mechanism for the making of decision" yang mengambil keputusan-keputusan itu ialah beberapa organ atau lembaga negara. Keputusan politik itu tidak lain merupakan kompromi dari berbagai kepentingan atau pandangan, dari social groups, partai politik, kepentingan golongan lain, termasuk dari dinas pemerintah sendiri.

## **B. Tipe-tipe Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan dibedakan dalam dua garis besar yaitu presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang badan legislatif dan badan eksekutif saling berhubungan erat dalam menjalankan tugasnya. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan pemerintah terpusat pada satu orang, yaitu presiden. Maksudnya presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya. Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Presiden dan para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.

Sistem pemerintahan Parlementer Dalam sistem pemerintahan parlementer kedudukan kepala Negara tidak dapat diganggu gugat. Cabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Kabinet dapat dijatuhkan atau dibubarkan setiap

waktu oleh parlemen. Kedudukan kepala Negara dan kepala pemerintahan tidak terletak dalam satu tangan.

### **C. Perkembangan Sistem Politik di Indonesia**

Yang dimaksud dengan perkembangan Sistem politik di Indonesia adalah sebuah pertumbuhan sistem politik demokrasi yang berada di Indonesia, dengan adanya perbedaan, perubahan bahkan pasang surutnya semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem politik Indonesia sudah mengalami perubahan ataupun perkembangan yang mana perkembangan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu: Perkembangan Sistem politik Di Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 dan sesudah Amandemen UUD 1945.

#### **1. Perkembangan Sistem politik Di Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945**

Sistem Politik ini dibagi menjadi tiga periode perkembangan politik di Indonesia, sebagai berikut:

##### **a. Periode Tahun 1945-1959**

Periode ini memakai Sistem Demokrasi Liberal. Pada periode ini, Konstitusi mengalami tiga kali pergantian, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950

##### **b. Periode Tahun 1959-1965**

Periode ini menggunakan Sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh reaksi penolakan maupun koreksi kepada Demokrasi Parlementer, yang terjadi tidak lama. Hal ini juga disebabkan karena adanya kekacauan politik yang ada sehingga kekuatan Presiden Soekarno mengalami keruntuhan.

##### **c. Periode Tahun 1966-1998**

Periode yang terjadi pada masa Orde Baru yaitu pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Masa Pemerintahan Orde baru dikembangkannya Demokrasi yang bernama Demokrasi Pancasila.

## **2. Perkembangan Sistem politik Di Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945**

- a. Bentuk negara ialah kesatuan serta bentuk pemerintahan ialah republik yang terdiri atas 33 provinsi dengan menggunakan sistem desentralisasi sehingga adanya pemerintahan di daerah serta di pusat.
- b. Parlemen terdiri atas dua ruang atau disebut sistem bicameral, ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan cara pemilu serta merupakan perwakilan oleh rakyat. Anggota DPD ialah perwakilan yang berada diprovinsi yang mana anggotanya dipilih melalui pemilu dari rakyat di wilayah masing-masing dengan masa jabatan yaitu lima tahun.
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Anggota MPR ialah anggota yang asal dari DPR serta anggota DPd, yang mempunyai jabatan selama lima tahun. Tugasnya ialah menetapkan Presiden serta Wakil Presiden, memperhentikan Presiden serta Wakil Presiden, serta berwenang dalam melakukan perubahan serta menetapkan UUD.
- d. Eksekutif yang dipegang serta dijalankan langsung oleh Presiden. Jabatan Presiden ialah sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Presiden serta wakil Presiden dipilih melalui pemilu secara langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan yaitu lima tahun serta bisa dipilih sekali lagi dalam kondisi yang sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan membangun kabinet yang berasal dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab terhadap Presiden.
- e. Kedaulatan yudikatif dipegang serta dijalankan oleh Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Komisi yudisial yang masukan tentang pengangkatan Hakim Agung

- f. Pemilu diadakan untuk melakukan pemelihan terhadap DPR serta DPD. Selain itu, juga melakukan pemilihan terhadap Presiden serta Wakil Presiden dalam satu paket.
- g. Sistem kepartaian ialah multi partai. Dengan jumlah partai yang telah mengikuti partai pada tahun 2004 yaitu 24 partai serta tahun 2009 dengan jumlah 34 partai politik.
- h. BPK ialah lembaga yang mempunyai kedaulatan dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab mengenai keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan tersebut diseahkan kepada DPR.
- i. Pada pemerintahan Daerah ialah Provinsi serta Kotamadya/Kabupaten dibuat juga lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif.
- j. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi yang berada di daerah Provinsi serta DPRD Kotamadya/Kabupaten yang berada di daerah Kotamadya/Kabupaten. Anggotanya dipilih melalui pemilu yang langsung dari rakyat.
- k. Kekuasaan eksekutif dalam provinsi dipegang oleh seorang Gubernur, namun di daerah kotamadya/kabupaten dipegang oleh seorang Walikota/Bupati. Semua ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang berada di daerah masing-masing.
- l. Kekuasaan yudikatif dalam provinsi yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi serta dalam kotamadya/kabupaten dijalankan oleh Pengadilan Negeri.

# BAB 5

## PERTEMUAN KE LIMA RUANG LINGKUP ILMU POLITIK

### A. Pendahuluan

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat<sup>11</sup>. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia. Dikemukakan Anton H. Djawamaku (1985: 144) : “bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik”. Dalam kehidupan masyarakat istilah “politik” mula pertamanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul “Politeia” yang pula dikenal dengan istilah “Republik” (Deliar Noer, 1982: 11-12), dan selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan “Politica”. Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, di mana hal itu dapat diketahui bahwa “politik” merupakan istilah dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, sebab

---

<sup>11</sup> Ira Gamurti, Latifa Hanum Siregar, Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara, Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Vol. 1 No.1 Maret Tahun 2021, h.34-35

dalam kedua karya itu membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sarjana-sarjana yang melihat negara sebagai aspek utama politik, menaruh perhatian terhadap lembaga itu. Sesungguhnya definisi-definisi tentang negara, yang dipergunakan oleh para sarjana yang menganut pendekatan kelembagaan, bersifat tradisional dan agak sempit. Roger F. Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* mengatakan bahwa "Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara". Ruang lingkup definisi tersebut terlihat apabila kita mengingat bahwa negara hanya merupakan salah satu bentuk kemasyarakatan, meskipun tidak mungkin disangkal bahwa negara memang merupakan bentuk masyarakat yang paling utama, dan dalam hal ini ilmu politik dan negara harus saling mengisi untuk melaksanakan tujuan-tujuan negara.

## **B. Lingkup Kekuasaan**

Ruang Lingkup negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap kekuasaan lainnya yang ada dalam masyarakat dengan melalui penerapan hukum-hukum. Karena itu semua kekuatan sosial dalam lingkungan negara harus menempatkan dan menyesuaikan diri dengan kerangka kekuasaan negara. Dalam definisi Deliar Noer, kata negara atau sistem politik tidak ditemukan, tapi yang ada yaitu: bentuk susunan masyarakat, hal mana dapat diketahui sebagai ungkapan yang berkenaan dengan penguasaan, sifat dan struktur masyarakat yang dikehendaki. Dalam hubungan beliau menunjukkan adanya fakta sejarah sebagai perkembangan politik yang terjadi sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan. Dari kenyataan sejarah itu terlihat adanya usaha-

usaha dalam masyarakat dari golongan warga untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan golongan lain berusaha mempertahankannya. Hal ini pada zaman penjajahan Belanda dilaksanakan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia melalui organisasi politik. Sedangkan setelah kemerdekaan tercapai kekuatan kekuasaan politik berusaha mendapatkan kekuasaan dan mereka berhasil mengatur masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup mereka sendiri atau dimiliki bersama.

Dengan kekuasaan politik di tangan kelompok pemegang kekuasaan melaksanakan aktivitas politik dengan tujuan khusus atau bersama, mereka berusaha agar kekuasaan tetap berada di tangan mereka dan berusaha mencapai tujuan umum dari rakyat yang diperintah sesuai dengan nilai-nilai bersama atau hanya diakui sepihak. Dalam hal terakhir ini, biasanya fasilitas-fasilitas yang melekat pada kedudukan dan jabatan yang dikuasai dipergunakan untuk kepentingan golongan sendiri. Berbagai macam definisi mengenai politik yang telah ada jelas memperlihatkan adanya unsur persamaan dan perbedaan.

Adanya perbedaan tentu disebabkan dilihat pandangannya sendiri dan beberapa unsur dipakai sebagai tema sentral untuk menyoroti aspek-aspek politik lainnya.

### **C. Sistem Politik Atau Negara**

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu, dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Heywood merumuskan politik secara luas sebagai keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan dan membuat amandemen aturan-aturan umum di mana mereka hidup. Pembuatan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem politik atau negara tidak dapat dipisahkan dari pemilihan antara beberapa alternatif dan penentuan urutan prioritas. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu pun diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang

menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Perlu diingat bahwa untuk menentukan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada, diperlukan kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peranan sangat penting untuk membina kerja sama ataupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Dalam Bidang Kajian Ilmu Politik Menurut Andrew Heywood (1997) dalam bukunya *Politics*, ilmu politik dibagi menjadi empat bidang kajian utama, yaitu<sup>12</sup>:

1. Teori politik yang meliputi: definisi politik; pemerintahan, sistem dan rezim; ideologi- ideologi politik; demokrasi; dan negara.
2. Bangsa-bangsa dan globalisasi meliputi: bangsa dan nasionalisme; politik subnasional; dan politik global.
3. Interaksi politik terdiri dari: ekonomi dan masyarakat; budaya politik dan legitimasi; perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu; partai politik dan sistem kepartaian, kelompok, kepentingan dan gerakan.
4. Mesin pemerintahan yang meliputi: konstitusi, hukum dan yudikatif; lembaga legislatif; lembaga eksekutif; birokrasi; militer dan polisi.
5. Kebijakan dan kinerja meliputi: proses kebijakan dan kinerja sistem.

#### **D. Kesimpulan**

Ruang lingkup Politik dan negara secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau

---

<sup>12</sup> Ira Gamurti, Latifa Hanum Siregar, Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* Vol. 1 No.1 Maret Tahun 2021, h.36-37

pemerintahannya. Ilmu politik membahas secara sistematis dan analitis masalah kenegaraan, dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofis tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pertanyaan dan analisis tentang pengorganisasian suatu negara, dengan tujuan agar rakyat bisa hidup makmur dan bahagia. Dalam negara demokrasi, tercakup hak-hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu selaku pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus diupayakan untuk, mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dan bebas maksimal.

# BAB 6

## PERTEMUAN KE ENAM PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM POLITIK

### A. Pendahuluan

Membahas mengenai sistem politik, yaitu David Easton dan Gabriel Almond. Dalam modul ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pemikiran dalam analisis sistem politik, masalah input dan output dalam sistem politik, lingkungan dalam sistem politik, dan juga akan dibahas secara singkat mengenai komunikasi dalam sistem politik .

Modul ini pertama kali membahas mengenai pemikiran Easton mengenai sistem politik yang kemudian dilanjutkan dengan pemikiran Almond, terkait dengan pemikiran Almond mengenai pendekatan struktural fungsional.

Easton mengamati kehidupan politik sebagai suatu jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem. Adapun unit dalam sistem politik merupakan tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Input dalam sistem politik dapat berupa tuntutan (demand) dan dukungan (support) yang setelah melalui proses konversi akan berubah menjadi output (keputusan atau kebijakan). Output yang dihasilkan setelah melalui proses konversi, setelah ada umpan balik (feed- back) ke lingkungan dapat menghasilkan input baru.

Pembahasan pemikiran Almond akan dimulai dari penjelasan mengenai pendekatan struktural fungsional, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengertian sistem. Input, output, dan lingkungan juga akan

dijelaskan dalam bagian ini. Sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan dan juga sebaliknya. Hal lain yang akan dijelaskan juga adalah kemampuan yang dimiliki oleh sistem politik. Pemikiran Almond ini akan sangat berguna untuk membandingkan berbagai sistem politik yang ada di dunia, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang modern.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan landasan pemikiran sistem politik Easton;
2. Menjelaskan pendekatan dalam analisis sistem politik Almond;
3. Menjelaskan input dan output dalam sistem politik;
4. Menjelaskan lingkungan dalam sistem politik;
5. Menjelaskan komunikasi politik dalam sistem politik.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menerapkan secara benar analisis sistem politik yang mencakup berikut ini.

1. Identifikasi unit-unit dalam sistem politik.
2. Diferensiasi dalam sistem politik.
3. Integrasi dalam sistem politik.
4. Mekanisme bekerjanya sistem politik.
5. Input.
6. Output.
7. Lingkungan.

## **B. Analisis Sistem Politik**

### **David Easton**

Berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya yang menekankan lembaga sebagai unit analisis dalam sistem politik.

Pemikiran mengenai sistem politik, tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu lain terutama dari ilmu astronomi yang melihat kejadian dalam alam raya sebagai bagian dalam tata surya ataupun ahli biologi yang melihat kejadian dalam tubuh manusia sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman sistem politik

dan cara bekerjanya, mungkin akan lebih mudah apabila kita membayangkan tubuh manusia.

Apabila tubuh manusia merupakan bagian dari suatu sistem maka kita akan menemukan bagian-bagian dari sistem (subsistem) yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kulit untuk merasa. Meskipun setiap bagian dalam tubuh manusia tersebut berbeda dan menjalankan fungsinya masing-masing, yang tentunya berbeda pula, namun tidak berarti setiap bagian tersebut menjalankan fungsinya sekehendaknya. Setidaknya terdapat komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan subsistem dalam sistem tersebut berjalan secara beriringan dengan tanpa mengacaukan subsistem yang lainnya. Lebih dari itu, hilangnya atau tidak berfungsinya salah satu subsistem dapat menyebabkan kelumpuhan sistem secara keseluruhan. Misalnya, kecelakaan yang menyebabkan manusia pincang dengan kehilangan kaki pada sisi yang ekstrim dapat menyebabkan kematian.

Menurut Easton setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik (Easton, 1992: 181-184). Pertama, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antarunit yang berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi. Kedua, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. Ketiga, sistem mengacu pada dua hal, co-variance dan ketergantungan antarunit yang membangun sistem. Perubahan salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem.

Lebih lanjut, Easton menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lain adalah dari segi definisi politik itu sendiri. Politik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, dalam sistem politik terdapat prinsip alokasi nilai-nilai sosial (the authoritative allocation of social value). Namun, perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain tidak lantas membentuk jurang pemisah. Sebuah sistem dapat menjadi input bagi sistem yang lain, dan sebaliknya. Contohnya adalah

kebijakan pajak. Kebijakan pajak merupakan output dari sistem politik, sekaligus dapat menjadi input bagi sistem ekonomi.

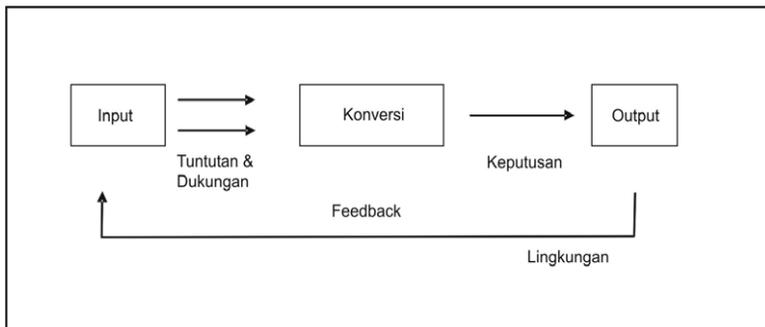
Setidaknya ada empat ciri sistem politik yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain (Mas'ood dan MacAndrews, 1991: 5-6). Pertama, ciri identifikasi. Kita harus dapat mengidentifikasi sistem politik untuk dapat membedakannya dengan yang lainnya. Dalam identifikasi ini, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan.

Kedua, input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan input yang rutin, tetap, dan ajeg. Tanpa adanya input, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu, tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik.

Ketiga, diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Keempat, integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Integrasikan dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya

untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.



**Gambar 6. 1. Alur Kerja Sistem Politik**

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah input, konversi (proses), output, feedback, dan lingkungan (Easton, 1992: 193-195). Dari gambar di atas dapat dilihat bagaimana sistem politik dapat bekerja. Adanya input yang berupa tuntutan dan dukungan, kemudian dilanjutkan dengan konversi dan pada akhirnya menjadi output, berupa keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi output, ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi input.

### C. Kesimpulan

Pendekatan sistem politik pada mulanya terbentuk dengan mengacu pada pendekatan yang terdapat dalam ilmu eksakta. Adapun untuk membedakan sistem politik dengan sistem yang lain maka dapat dilihat dari definisi politik itu sendiri. Sebagai suatu sistem, sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu. Perbedaan pendapat mulai muncul ketika harus menentukan batas antara sistem politik dengan sistem lain yang terdapat dalam lingkungan sistem politik. Namun demikian, batas akan dapat dilihat apabila kita dapat memahami tindakan politik sebagai sebuah tindakan yang ingin berkaitan dengan pembuatan keputusan yang menyangkut publik.

Perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain, tidak menjadikan jurang pemisah antara sistem politik dengan sistem yang lain. Sebuah sistem dapat menjadi input bagi sistem yang lain.

Dalam sistem politik terdapat pembagian kerja antaranggotanya. Pembagian kerja yang ada tidak akan menghancurkan sistem politik karena ada fungsi integratif dalam sistem politik.

# BAB 7

## PERTEMUAN KE TUJUH INPUT, OUTPUT, DAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM POLITIK

### A. Input

*Input* terdiri atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*). Perlu adanya manajemen bagi *demands*. Kelebihan *demands* akan mengakibatkan beban berlebihan (*overload*) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap *demands*, baik melalui institusi, budaya maupun struktural *gatekeepers*. Selain *demands*, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan *demands* mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman<sup>13</sup>.

Dalam sistem politik, *input* diperlukan sebagai sumber energi dalam sistem politik. Masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya memerlukan pemenuhan kepuasan dari sistem. Tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, ada kebutuhan yang dengan mudah dipenuhi, namun ada pula kebutuhan yang dalam pemenuhannya memerlukan sumber daya dan perhatian khusus. Dari semua kebutuhan tersebut sering kali tidak dapat dipenuhi karena tuntutan-tuntutan yang ada tidak terorganisir secara baik sehingga tidak sampai ke

---

<sup>13</sup> Drs. Toto Pribadi, Ali Muhyidin, S.Ip, ISIP4213/ Modul 1 Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik, h.1.8-1.4

sistem. Hal terpenting yang harus dipelajari agar sebuah tuntutan dapat sampai secara baik masuk ke dalam sistem politik adalah cara penyampaian dan peranan komunikasi politik, termasuk agen yang menyampaikan tuntutan tersebut.

Dalam sistem yang demokratis, setiap orang, organisasi, dan kelompok mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan tuntutannya. Hal ini berbeda dengan negara yang tidak demokratis, di mana kesempatan dalam menyampaikan tuntutan sangat terbatas pada kelompok tertentu. Partai politik, dengan salah satu fungsinya sebagai agen dalam komunikasi politik menjadi penting peranannya dalam menyampaikan tuntutan tersebut. Apabila fungsi komunikasi partai politik yang dilanjutkan dengan agregasi (menggabungkan kepentingan) dan artikulasi (merumuskan kepentingan) tidak dapat berjalan dengan baik maka proses penyampaian tuntutan tersebut menjadi tidak terlembaga secara baik. Akibatnya muncul demonstrasi, petisi.

Tuntutan dapat berasal dari dalam sistem atau dari lingkungan luar sistem. Tuntutan eksternal dapat dengan mudah kita identifikasi karena lingkungan luar dalam pendekatan ini kita tetapkan sebagai sistem-sistem lain di luar sistem politik. Sedangkan tuntutan internal sebenarnya bukanlah *input*, namun lebih pada sesuatu yang timbul sebagai akibat langsung dari sistem politik itu sendiri (*with input*). Dalam hal ini, tuntutan internal muncul karena adanya situasi-situasi yang terdapat dalam sistem politik itu sendiri. Pada saat sistem politik bekerja, muncul tuntutan dari anggota-anggota sistem politik untuk mengubah hubungan politik yang telah ada. Perubahan hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakpuasan hubungan-hubungan politis yang terdapat dalam sistem politik.

Adapun mengenai *input* yang berupa dukungan, tidak semata-mata berupa dukungan yang tampak dari luar, namun juga dukungan yang berupa pandangan atau suasana pikiran. Suasana pikiran yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap, kecenderungan yang kuat atau kesediaan untuk bertindak

demi orang lain. Hal ini dapat berupa kesetiaan pada partai sampai dengan semangat patriotisme.

Mengenai dukungan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

## 1. Wilayah Dukungan

### a. Komunitas Politik

Dukungan terhadap komunitas politik dapat digunakan sebagai usaha untuk menyelesaikan perbedaan yang ada dan mendorong pembuatan keputusan yang mengikat. Dukungan semacam ini dapat terlihat melalui pertumbuhan kesadaran dan kesatuan nasional. Sebagai contoh, seseorang akan merasa dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan bersedia untuk melakukan kerja sama dengan menyumbangkan tenaga dan sumber daya yang dimilikinya untuk penyelesaian secara damai dari berbagai tuntutan yang berbeda.

### b. Rezim

Rezim dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aturan dasar yang mengatur dan menyelaraskan berbagai tindakan dari anggota sistem untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai konsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik.

### c. Pemerintah

Artinya, ada dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas menyelesaikan beragam masalah dan konflik yang muncul di antara sesama anggota sistem.

## 2. Mekanisme Dukungan

Sebagaimana diketahui bahwa tanpa adanya dukungan yang relatif tetap dan *ajeg*, sistem politik tidak akan dapat menyerap energi yang cukup memadai dari anggota- anggotanya untuk mengubah tuntutan menjadi sebuah keputusan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme dukungan, yaitu *output* dan sosialisasi (politisasi).

*Pertama, output.* Dalam sistem politik, *output* berwujud suatu keputusan atau kebijakan politik. Membuat keputusan yang dapat memenuhi tuntutan dari sebagian anggota dalam sistem adalah salah satu cara utama untuk menjaga ikatan dari kelompok yang telah memberikan dukungan. Pada dasarnya semakin besar tuntutan yang dapat dipenuhi maka akan semakin baik bagi kelangsungan sistem tersebut, hanya saja dapat dipastikan bahwa sistem tidak akan dapat memenuhi semua tuntutan yang ada. Paling tidak, tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruhlah yang harus diperhatikan.

*Kedua, sosialisasi (politisasi).* Proses pembelajaran anggota masyarakat secara turun-temurun dalam suatu sistem politik merupakan salah satu bagian dari usaha untuk menciptakan dan mengakumulasi suatu sumber atau cadangan dukungan yang besar.

Proses pembelajaran ini berlangsung secara terus-menerus, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Apabila nilai yang ditanamkan sudah mengakar sedemikian dan terlembaga maka sistem politik tersebut memiliki legitimasi yang tinggi. Sosialisasi politik ini secara efektif menciptakan dan mewariskan nilai-nilai politik dan ukuran legitimasi dari suatu generasi ke generasi yang lain.

## **B. Output**

*Demands* yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu (*output*). Apabila *output* sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan (*re-newed supports*). Akan tetapi, apabila *output* yang dihasilkan tidak sesuai maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di *output* melalui *feedback loop*. *Output* harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan.

### C. Lingkungan

Lingkungan dalam pengertian di sini adalah semua sistem, baik sosial maupun fisik yang bukan termasuk dalam sistem politik. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu *intrasocietal* dan *extrasocietal*. *Intrasocietal* merupakan komponen dalam sistem politik. *Intrasocietal* mencakup seperangkat tingkah laku, sikap, kepribadian, serta gagasan baik dari lingkungan ekonomi, budaya maupun struktur sosial. *Intrasocietal* dalam hal ini merupakan segmen fungsional masyarakat. *Extrasocietal* mencakup semua sistem di luar suatu sistem politik dan merupakan komponen fungsional dari masyarakat internasional atau sebuah suprasistem. Lingkungan terhadap sistem politik kadangkala dapat berupa tekanan (*disturbances*), misalnya krisis ekonomi. Sebuah sistem politik harus menjalankan variabel-variabel esensialnya untuk mengatasi tekanan dan gangguan yang ada. Variabel-variabel esensial tersebut adalah alokasi nilai bagi anggota sistem dan mengatur bagaimana agar alokasi tersebut diterima oleh sebagian besar anggota.

Lingkungan masyarakat dalam oleh Easton dibagi dalam empat sistem, yaitu sistem ekologi, sistem biologi, sistem kepribadian, dan sistem sosial. *Pertama*, sistem ekologi merupakan semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik nonhumanis dari kehidupan manusia. Lingkungan fisik misalnya iklim, topografi, batas dan luas teritorial. Adapun kondisi nonhumanis, misalnya kekayaan alam, flora, dan fauna. Pengambil kebijakan hendaknya selalu memperhatikan kondisi lingkungan ekologi. Di Indonesia, misalnya dengan kondisi hutan yang luas hendaknya dijadikan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan nasional. Sebagai contoh dengan adanya pemanfaatan hutan secara benar maka negara akan mendapatkan pemasukan dana dari penjualan kayu. Sebaliknya, eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam yang ada maka akan dapat menimbulkan bencana banjir. Pada akhirnya akan menimbulkan gangguan bagi sistem politik.

*Kedua*, sistem biologi. Sistem biologi mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu. Asumsi dasarnya adalah susunan biologis manusia tertentu akan melahirkan suatu perilaku tertentu pula. Kebenaran dari asumsi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

*Ketiga*, sistem kepribadian. Pemahaman mengenai sistem kepribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama. Penelitian yang sering dilakukan adalah mengenai karakter bangsa dan pengaruhnya terhadap masalah nasional.

*Keempat*, sistem sosial. Easton mengelompokkan sistem sosial dalam beberapa sistem, yaitu sistem budaya, sistem ekonomi, sistem demografi, dan struktur sosial. Budaya politik secara sederhana diartikan sebagai orientasi individu dalam masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya. Dengan demikian, budaya politik terdiri dari serangkaian nilai, sikap, informasi, dan kecakapan politis yang membentuk orientasi individu dalam masyarakat tersebut. Terkait dengan budaya politik, umumnya masyarakat dikelompokkan dalam berbagai tipe, mulai dari masyarakat yang acuh terhadap politik sampai dengan masyarakat yang sangat aktif. Kajian dan penelitian mengenai budaya politik sering dikaitkan dengan tingkat partisipasi suatu masyarakat. Sistem politik hendaknya dapat mengatur budaya politik, termasuk partisipasi politiknya sehingga tidak merugikan. Jangan sampai yang muncul adalah beban yang berat dalam menampung partisipasi politik yang ada sehingga sistem politik tersebut hancur.

Terkait dengan sistem ekonomi, sistem ekologi dan teknologi mempunyai pengaruh yang cukup penting. Kebijakan ekonomi makro, jangan sampai bersifat eksploitatif sehingga menguras sumber daya alam yang ada dan merugikan lingkungan. Hal yang sama pun berlaku dalam hal pemanfaatan teknologi. Adanya limbah industri, penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan adalah contoh-contoh dari kebijakan

ekonomi yang tidak seimbang. Di Indonesia, kita dapat melihat beberapa contoh kebijakan ekonomi yang tidak selaras yang kemudian memunculkan berbagai tuntutan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, Peristiwa Malari tahun 1974, kasus limbah industri PT Newmont, dan yang paling kontemporer adalah dibukanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Bojong Depok, Jawa Barat yang memunculkan kecemasan cukup keras dari masyarakat.

Sistem demografi merujuk pada keadaan penduduk, baik jumlah, komposisi, sampai dengan distribusi penduduk maupun pada pertumbuhan penduduk itu sendiri. Perubahan dalam sistem demografi akan berpengaruh pada sistem politik. Misalnya, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat atau distribusi penduduk yang tidak merata maka akan menimbulkan gangguan pada sistem politik. Adanya pertumbuhan dan akumulasi penduduk di Pulau Jawa menuntut kebijakan yang proporsional. Kebijakan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan, yang pada akhirnya akan memunculkan gangguan dalam sistem tersebut.

Adapun lingkungan luar dibagi menjadi tiga, yaitu sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem sosial internasional.

Sistem politik internasional dalam hal ini dapat dilihat sebagai sistem politik individu atau pengelompokan sistem individu. Hal yang dimaksud dalam sistem individu dalam hal ini adalah sistem politik dari masyarakat lain. Adapun pengelompokan sistem individu, misalnya NATO, ASEAN, dan PBB. Dengan demikian adanya lingkungan luar ini maka akan menimbulkan hubungan bilateral (antar negara), multilateral (banyak negara) ataupun internasional. Dalam hubungan ini, masing-masing sistem akan selalu berupaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Misalnya, hubungan antara Indonesia dan Jepang; Jepang berupaya mendapatkan pasar dan bahan dasar industri yang murah dari Indonesia. Adapun pihak Indonesia selalu berupaya agar hasil-

hasil industri dari Jepang, harga dan teknologinya mudah dijangkau oleh masyarakat.

Sistem ekologi internasional mencakup semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi nonhumanis dari masyarakat internasional. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan ekologi global akan berpengaruh terhadap sistem politik. Misalnya, apabila harga minyak dunia naik maka secara langsung berpengaruh pada kebijakan nasional Indonesia tentang BBM (Bahan Bakar Minyak). Pada saat yang sama ketika harga minyak dunia sedang stabil atau turun maka pemerintah Indonesia pun akan melakukan kebijakan penyesuaian.

Adapun mengenai sistem sosial internasional, Easton membagginya dalam struktur sosial internasional, sistem kebudayaan internasional, dan sistem ekonomi internasional. Terkait dengan pengaruh lingkungan luar terhadap suatu sistem politik, tergantung pada sisi mana saja yang menjadi pusat perhatian kita. Dalam bahasan mengenai sistem politik Indonesia maka pengaruh lingkungan dalam akan mendapat perhatian yang lebih besar dibanding dengan pengaruh lingkungan luar.

Dukungan diperlukan untuk menjaga kelangsungan setiap sistem politik. Indikator dukungan ini dapat diukur dengan cara bertanya pada setiap anggota kelompok tentang orientasi apa yang lebih dipilih: bekerja sama menyelesaikan masalah secara damai sehubungan tuntutan-tuntutan mereka yang saling berbeda atau sebaliknya. Dukungan dalam sistem politik juga mampu membantu memberikan sumber tenaga untuk tetap bekerjanya sistem tersebut. Dengan demikian, sistem politik merupakan keseluruhan proses di mana *input* diolah menjadi *output* yang proses pengolahannya dipengaruhi oleh lingkungan, serta berbagai institusi pemerintah.

Lebih lanjut, Easton (Easton, 1992: 189) mengkategorikan analisis sistem politik menjadi empat, yaitu sebagai berikut.

1. Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku.

2. Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi.
3. Sistem politik sifatnya terbuka, artinya tidak terlepas dari pengaruh sistem yang lain. Lebih dari itu, sistem politik (melalui kebijakan yang dihasilkan) turut mempengaruhi sistem yang lain.
4. Oleh karena tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan, sistem politik harus memiliki keterampilan untuk merespon ancaman dan gangguan yang datang, serta beradaptasi dalam segala kondisi.

#### **D. Kritik Terhadap Analisis Sistem Politik David Easton**

Disadari sepenuhnya bahwa analisis sistem politik menurut David Easton sangat membantu dalam memahami bekerjanya sistem politik, namun ada dua kritik terhadapnya.

*Pertama*, terlalu umum, *too transparently axiomatic to be of real use*, masih bersifat teoretis. Operasionalisasi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Easton tidaklah mudah karena dalam kenyataannya dibutuhkan berbagai macam atribut (agama, budaya, sosial, ekonomi, dan ideologi), selain *demands* dan *support* dalam konversi (proses). Selain itu, untuk melaksanakan konsep Easton harus mempertimbangkan perkembangan sejarah sistem tersebut. Tanpa mempertimbangkan hal-hal di atas, akan sulit membedakan antara situasi krisis dan normal, tuntutan utama dan marginal.

*Kedua*, tidak netral dan mengandung nilai-nilai liberal. Gagasan Easton akan sulit digunakan untuk menganalisis masyarakat yang sedang berkembang dan membandingkan berbagai sistem politik yang ada.

*Input* dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. *Input* yang berupa tuntutan muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat (kebutuhan). *Input* tidak akan sampai (masuk) secara baik dalam sistem politik jika tidak terorganisir secara baik. Oleh sebab itu komunikasi politik menjadi bagian penting dalam hal ini. Terdapat perbedaan tipe

komunikasi politik di negara yang demokratis dengan negara yang nondemokratis. Tipe komunikasi politik ini pula yang nantinya akan membedakan besarnya peranan dari organisasi politik.

*Output* merupakan keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi *input* yang masuk. *Output* sering dimanfaatkan sebagai mekanisme dukungan dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan yang muncul.

## E. Kesimpulan

Lingkungan mempunyai peranan penting berupa *input*, baik tuntutan ataupun dukungan. Kemampuan anggota sistem politik dalam mengelola dan menanggapi desakan ataupun pengaruh lingkungan bergantung pada pengenalannya pada lingkungan itu sendiri. Lingkungan merupakan semua sistem lain yang tidak termasuk dalam sistem politik. Secara garis besar, lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan dalam (*intra societal*) dan lingkungan luar (*extra societal*).

Setidaknya ada dua kritik yang dilontarkan atas gagasan Easton, yaitu adanya anggapan bahwa pemikiran Easton terlalu teoretis sehingga sulit untuk diaplikasikan secara nyata. Selain terlalu teoretis, pemikiran Easton dianggap tidak netral karena hanya mengedepankan nilai-nilai liberal Barat dengan tanpa memperhatikan kondisi pada masyarakat yang sedang berkembang.

# BAB 8

## PERTEMUAN KE DELAPAN PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL GABRIEL ALMOND

### A. Sistem Politik, Lingkungan, Dan Kapabilitas

Pendekatan struktural fungsional merupakan alat analisis yang diperlukan untuk membahas sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Dengan demikian, sistem politik merupakan bagian dari subsistem dari sistem kehidupan manusia<sup>14</sup>.

Analisis pendekatan struktural fungsional ini dimulai dengan penjelasan mengenai sistem politik sebagaimana diperkenalkan oleh Gabriel Almond. Dalam teori perbandingan politik, Almond menerapkan ide dasar dari Talcott Parsons dengan menganggap bahwa suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Talcott Parsons mengembangkan apa yang disebut *grand theory* (teori besar) dalam sosiologi yang lazim disebut sebagai *Fungsionalisme Struktural*. Salah satu teori dasar Parsons menganggap bahwa masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagian-bagian yang saling bergantung (*interdependen*). Setiap bagian dari sistem sosial ini memiliki fungsi-fungsi sendiri menurut cara-cara *division of labor* (pembagian kerja), dan secara bersama-sama mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sistem sosial ini bekerja secara integratif dan melalui pertukaran-

---

<sup>14</sup> Drs. Toto Pribadi, Ali Muhyidin, S.Ip, ISIP4213/ Modul 1 Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik, h.1.16-1.21

pertukaran di antara bagiannya, serta menciptakan suatu keseimbangan untuk mempertahankan eksistensi sistem tersebut.

Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadapan-hadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Dari penjelasan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang utama dalam sebuah sistem politik (1) sistem politik merupakan sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka. Dengan demikian, sistem politik terdapat dalam masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang modern. Aktor-aktornya pun sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing; (2) tujuan sistem politik adalah untuk mencapai suatu kesatuan dalam masyarakat (integrasi). Selain itu, sistem politik juga dapat menyesuaikan (adaptif) terhadap lingkungannya. Jadi selain berfungsi untuk menyatukan masyarakat, sistem politik diperlukan untuk dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dalam masyarakatnya sendiri ataupun masyarakat di luar sistem politik; (3) sistem politik absah dalam menggunakan kekuatan dan paksaan fisik.

Penggunaan kekuatan dan paksaan fisik, dalam kadar yang berbeda dapat dilihat dalam sistem politik yang totaliter dan sistem politik demokratis. Dalam sistem politik yang totaliter, paksaan fisik sangat dominan dalam alokasi nilai dan kebijakan. Berbeda dengan sistem politik yang demokratis, penggunaan paksaan fisik hanya dalam batas tertentu dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam pandangan Almond, semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, yaitu fungsi *input* dan *output*. Termasuk dalam kategori fungsi *input* adalah sosialisasi politik dan rekrutmen

politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi *output* terdiri dari pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan dari pelaksanaan aturan. Lebih lanjut Almond menulis: "*All of the functions performed in the political system – political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, rule adjudication – are performed by means of communication*".

Kutipan di atas menunjukkan bahwa komunikasi bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan.

Komunikasi politik versi Almond beranggapan bahwa arus komunikasi politik dapat mengalir dari bawah ke atas (dari masyarakat ke penguasa) dan dari atas ke bawah (dari penguasa politik ke masyarakat). Arus komunikasi dari bawah ke atas bermula dari anggota-anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan-tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik. Almond membayangkan bahwa dalam setiap sistem politik selalu saja ada arus informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik. Perbedaan utama antara sistem politik yang satu dengan yang lain adalah cara penyampaian informasi, frekuensi penyampaian, dan struktur (lembaga) yang terlibat dalam arus informasi tersebut (Rauf, 2000: 132-133).

Arus komunikasi dari atas ke bawah terjadi bila penguasa politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada anggota-anggota masyarakat. Bagi Almond, proses tersebut bersifat universal karena tidak ada penguasa yang tidak menyampaikan pesan-pesan kepada rakyatnya, baik itu dalam bentuk peraturan maupun perintah-perintah (Rauf, 2000: 133).

Adapun mengenai interaksi antara sistem politik dengan lingkungan, antara Easton dan Almond tidak terdapat perbedaan dalam pembagian lingkungan dalam (*intrasocietal*) dan lingkungan luar (*extrasocietal*). Sistem politik selalu berinteraksi dengan lingkungan. Pengaruh yang berasal dari

lingkungan luar (*input*) berdampak pada sistem dan sebaliknya, sistem politik mempengaruhi pula lingkungannya (*output*).

## **B. Sistem Dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Ekologis**

Pada dasarnya pendekatan sistem politik yang digagas oleh Almond merupakan pendekatan perbandingan sistem politik. Menurut Almond, dalam membandingkan lembaga dan proses-proses politik yang terdapat di dalamnya, setidaknya dapat dilakukan dalam tiga tahapan (1) kegiatan deskriptif, dengan melihat dan memusatkan perhatian pada keseluruhan bagian dari sistem politik tersebut; (2) memilah-milah temuan yang didapat, kemudian dikelompokkan berdasarkan tipenya masing-masing; (3) dicari *keajegan* dari hubungan-hubungan dari berbagai variabel, misalnya antara sistem sosial dengan konflik yang ada.

Menurut Almond ada tiga konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. *Sistem* diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya sehingga sistem politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi di mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem politik melaksanakan perang atau mendorong suatu usaha yang mengarah pada suatu perdamaian, memajukan perdangangan internasional ataupun membatasinya, membuka diri atau menutup diri dari semua gagasan.

Agar dapat melaksanakan fungsinya, sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau *struktur-struktur*, misalnya: parlemen, birokrasi, partai politik, lembaga peradilan, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau *fungsi-fungsi* tertentu, selanjutnya memungkinkan sistem politik tersebut untuk melaksanakan dan merumuskan kebijaksanaannya. Konsep di atas ini, semuanya merupakan bagian dari proses yang sama.

Konsep-konsep tersebut sangat penting untuk dapat memahami bagaimana sistem politik dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan alam dan manusianya. Komponen tersebut merupakan komponen konseptual dari suatu pendekatan ekologis terhadap politik.

Keuntungan dari perspektif ekologis ini adalah dapat mengarahkan perhatian kita pada isu politik yang lebih luas. Agar dapat membuat penilaian yang objektif maka kita harus menempatkan sistem politik dalam lingkungannya. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana lingkungan-lingkungan membatasi atau membantu dilakukannya sebuah pilihan politik. Sifat saling bergantung bukan hanya dalam hubungan antara kebijaksanaan dengan sarana-sarana institusional saja, namun lembaga-lembaga atau bagian dari sistem politik tersebut juga saling bergantung.

Selanjutnya, bahasan mengenai hubungan sistem dengan lingkungan, akan diberikan beberapa ilustrasi contoh. Dalam masyarakat yang agraris, tertutup, dalam lingkungan pedesaan, disertai dengan tingkat mobilitas yang rendah akan sulit untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis. Tidak adanya interaksi dengan sistem lain di luar masyarakat, menjadikan isolasi sistem tersebut terhadap perubahan. Dalam sistem tersebut kecenderungan yang akan terjadi adalah munculnya rezim tradisional agama ataupun adat dalam semua kehidupan.

Berbeda dengan sistem politik dengan negara yang modern. Adanya interaksi dengan lingkungan internasional memunculkan konsekuensi-konsekuensi politik yang harus selalu diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini akan diberikan dua contoh, yaitu isu demokratisasi dan terorisme. Demokrasi dan demokratisasi adalah isu global sebagai nilai dan sistem paling baik untuk kehidupan saat ini. Indonesia, sebagai bagian dari lingkungan dunia secara langsung dipengaruhi gejala tersebut. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah Indonesia harus dapat melaksanakan prosedur-prosedur dan substansi-substansi yang dianggap demokratis. Pemilu, sebagai salah satu prosedur demokrasi, di

Indonesia tidak dapat lepas dari lingkungan luar. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga internasional atau negara asing yang *mengontrol* jalannya Pemilu. Lebih dari itu, bantuan dana pun kerap diberikan oleh negara atau lembaga asing tersebut. Sebagai konsekuensi dan kekhawatiran yang muncul adalah adanya *intervensi* dari lingkungan luar. Adapun pengaruh ke luar terkait dengan isu demokratisasi ini adalah adanya kontrol dan proses yang diberikan pada kebijakan-kebijakan negara lain yang dianggap telah melanggar nilai demokrasi itu sendiri. Misalnya, protes masyarakat Indonesia terhadap *invasi* AS ke Irak.

Isu lain yang cukup santer terkait dengan pengaruh lingkungan luar adalah masalah terorisme. Berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme menjadi perhatian pada hampir semua negara di dunia. Bahkan sampai ada anggapan terorisme sebagai gejala dan jaringan global pun kerap disimpulkan. Indonesia sebagai bagian dari lingkungan internasional yang dipengaruhi oleh isu tersebut harus menyesuaikan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah membuat Undang-Undang tentang terorisme.

Keuntungan pendekatan ekologis ini adalah dapat mengarahkan pada perhatian dan isu politik yang lebih luas. Pendekatan ini dapat mencegah kita untuk memberikan penilaian yang tergesa-gesa dan penuh prasangka. Ketika kita ingin memberikan penilaian yang objektif terhadap suatu sistem maka kita harus dapat menempatkan sistem tersebut dalam lingkungannya untuk dapat melihat bagaimana lingkungan tersebut membatasi atau memperlancar pilihan politik yang ada. Pada sisi yang lain, misalnya kita mengetahui ada negara yang eksploitatif terhadap sumber alamnya, kita tidak dapat langsung *menjustifikasi* bahwa negara tersebut buruk. Bisa jadi, eksploitasi tersebut adalah tuntutan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik yang disertai pula dengan tekanan dari negara yang ada di sekitarnya.

### C. Kapabilitas Sistem Politik

Almond menyebutkan enam kategori untuk menentukan kapabilitas suatu sistem politik. Kapabilitas suatu sistem politik merupakan kemampuan sistem politik dalam mengatasi pengaruh lingkungan dalam atau luar terhadap dirinya (1) kapabilitas ekstraktif, misalnya mengumpulkan sumber-sumber alami dan manusiawi; (2) kapabilitas regulatif, misalnya arus kontrol dari sistem politik tersebut terhadap kelompok atau individu; (3) kapabilitas distributif, misalnya alokasi barang, jasa, kehormatan, status dan kesempatan kerja; (4) kapabilitas simbolik, misalnya pameran kekuatan dari kekuasaan pada saat kritis; (5) kapabilitas responsif, misalnya menyangkut hubungan antara *input* dari masyarakat dengan *output* yakni kebijaksanaan dari sistem politik; (6) kapabilitas domestik dan internasional. Penjelasan dari setiap kapabilitas itu adalah sebagai berikut:

#### 1. Kapabilitas Ekstraktif

Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik untuk mengelola sumber-sumber material dari lingkungan dalam maupun luar. Hal ini berkaitan dengan kuantitas sumber yang masuk ke dalam sistem politik. Misalnya, pendapatan daerah. Ukuran lainnya meliputi kekayaan alam, jumlah penduduk, dan sarana untuk mencapai kemampuan. Dengan kata lain, kapabilitas ekstraktif berhubungan dengan potensi yang dimiliki suatu sistem politik dalam mencapai tujuannya.

#### 2. Kapabilitas Regulatif

Kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu atau kelompok yang berada dalam sistem. Caranya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan tertentu.

#### 3. Kapabilitas Distributif

Kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan sumber-sumber material dan jasa kepada individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Tinggi rendahnya kapabilitas distributif ditentukan oleh kuantitas, nilai,

bidang-bidang kehidupan manusia yang diuntungkan dengan adanya distribusi tersebut.

4. Kapabilitas Simbolis

Kemampuan sistem politik dalam meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap simbol tertentu yang mencakup nilai-nilai yang dianut pemimpin, hari besar nasional, upacara militer maupun kunjungan kenegaraan. Minimnya kepercayaan terhadap simbol-simbol tersebut dapat menimbulkan kritik terhadap pemerintah atau pejabat negara.

5. Kapabilitas Responsif

Kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan, tekanan maupun dukungan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Semakin tinggi tingkat kepekaan suatu sistem politik terhadap tuntutan, tekanan, dan dukungan tersebut, semakin baik pula kapabilitas responsifnya.

6. Kapabilitas Domestik dan Internasional

Kapabilitas ini mencakup kegiatan atau tindakan yang terkait dengan perdagangan internasional, penetrasi politik ke negara lain, misalnya lobi politik Yahudi di Amerika, IMF, pinjaman luar negeri.

#### **D. Kesimpulan**

Pendekatan struktural fungsional merupakan alat analisis dalam mempelajari sistem politik, pada awalnya adalah pengembangan dari teori struktural fungsional dalam sosiologi. Dalam pendekatan ini, sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka yang melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadapan dengan masyarakat lainnya). Semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai fungsi

politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, fungsi *input* dan *output*.

Terkait dengan hubungannya dengan lingkungan, perspektif yang digunakan adalah ekologis. Keuntungan dari perspektif ekologis ini adalah dapat mengarahkan perhatian kita pada isu politik yang lebih luas. Agar dapat membuat penilaian yang objektif maka kita harus menempatkan sistem politik dalam lingkungannya. Hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana lingkungan-lingkungan membatasi atau membantu dilakukannya sebuah pilihan politik. Sifat saling bergantung bukan hanya dalam hubungan antara kebijaksanaan dengan sarana-sarana institusional saja, namun lembaga-lembaga atau bagian dari sistem politik tersebut juga saling bergantung. Untuk dapat mengatasi pengaruh lingkungan, Almond menyebutkan enam kategori kapabilitas sistem politik, yaitu kapabilitas ekstraktif, kapabilitas regulatif, kapabilitas distributif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, kapabilitas domestik dan internasional.

# BAB 9

## PERTEMUAN KE SEMBILAN *ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL* DALAM SISTEM POLITIK

### A. Pendahuluan

Dalam menjelaskan teori struktural fungsional, Almond menilai bahwa setidaknya terdapat empat ciri dalam semua sistem politik. Empat ciri inilah yang kemudian menjadi dasar dari teorinya adalah sebagai berikut .

1. Sistem politik memiliki struktur dan lembaga politik. Dalam masyarakat yang paling sederhana sampai dengan masyarakat yang paling modern memiliki struktur dan lembaga politik yang dapat diperbandingkan sesuai dengan tingkat dan bentuknya.
2. Sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda. Perbedaan frekuensi ini terjadi karena perbedaan struktur. Fungsi dan struktur sistem politik pun dapat diperbandingkan, mengenai bagaimana proses berjalannya dan proses penyelenggaraannya.
3. Struktur politik menjalankan fungsi tertentu. Betapa pun khusus fungsi dari sistem politik, ia akan dapat bersifat multifungsi. Dengan demikian, sistem politik dapat diperbandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi dalam struktur tersebut.
4. Sistem politik merupakan sistem campuran apabila dilihat dari segi budaya. Hal ini berarti tidak ada struktur politik dan kebudayaan yang paling modern dan paling tradisional karena keduanya hanya bersifat relatif saja.

Lebih lanjut Almond menyatakan bahwa dalam sebuah sistem politik setidaknya terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Pada dasarnya klasifikasi enam struktur ini mengandung kelemahan karena tidak dapat membantu kita untuk dapat membandingkan sistem politik dengan sistem politik yang lain. Menurut Almond untuk dapat membandingkan sebuah sistem politik dengan sistem politik yang lain maka cara yang dapat digunakan adalah dengan mengetahui cara bekerja keseluruhan sistem.

Pengklasifikasian dalam enam struktur ini mengandung kelemahan karena tidak membantu kita dalam membandingkan suatu sistem politik dengan sistem yang lain secara baik dan mendalam. Analisis struktural hanya akan memberikan pengetahuan pada kita tentang jumlah partai politik, anggota dewan dalam legislatif, bentuk sistem pemerintahan suatu sistem politik, dan bagaimana eksekutif, yudikatif, serta pengorganisasian birokrasi berjalan.

### **1. Struktur Atau Lembaga Politik**

Struktur umum yang dimiliki oleh sistem politik adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Kelemahan klasifikasi ini adalah tidak terlalu membantu dalam memperbandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Misalnya, kita akan membandingkan antara Indonesia dengan Inggris, keduanya memiliki keenam jenis struktur atau lembaga politik tersebut. Hanya saja struktur tersebut tidak sepenuhnya sama. Kedua negara ini memiliki legislatif, di Inggris dengan dua kamar, House of Common dan House of Lord, sedangkan di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Indonesia menggunakan sistem presidensial, sedangkan Inggris menggunakan sistem parlementer. Inggris dengan dua partai dan Indonesia dengan multipartai. Dari perbandingan tersebut secara singkat mungkin dapat dilihat

perbedaan yang ada. Namun, persamaan dan perbedaan yang penting tidak akan dapat dilihat dari perbandingan tersebut. Hanya dengan melihat peran yang dijalankan dari lembaga-lembaga tersebut dalam pola bekerjanya suatu sistem yang lebih luas, baru kita dapat melihat persamaan dan perbedaan yang muncul. Misalnya, untuk dapat mengetahui perkembangan dari jumlah partai politik dari kedua negara tersebut maka kita dapat menelusurinya dari sistem kepartaian, sistem Pemilu, sampai dengan sejarah terbentuknya partai politik dari kedua negara tersebut. Dengan cara tersebut kita akan mengerti perbedaan dan persamaan yang ada. Kita dapat melihat peran apa saja yang dimainkannya oleh lembaga-lembaga tersebut dalam pola bekerjanya sistem yang lebih luas. Dari perbandingan inilah kita akan temukan persamaan dan perbedaan yang penting tersebut.

## **2. Struktur Dan Fungsi**

Kita akan memperoleh lebih banyak informasi apabila kita memisahkan struktur dan fungsi, serta menelaah hubungan keduanya dalam berbagai sistem politik yang berbeda. Namun, harus diingat bahwa perbandingan struktur ataupun fungsi tidak dapat dipakai secara terpisah untuk menganalisis sistem politik.

Menurut Almond suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir serta secara formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan.

Menurut Almond sistem politik menjalankan fungsi sosial politik, rekrutmen, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan kebijakan, yang kesemuanya itu dijalankan

dengan komunikasi politik. Komunikasi politik bukanlah hal yang berdiri sendiri, akan tetapi proses penyampaian pesan pada saat fungsi yang lain berjalan. Hal ini berarti bahwa komunikasi politik berjalan inherent dalam setiap sistem politik.

Penerapan kebijakan pemerintah, output, mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik. Pengaruh terhadap masyarakat ini selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan dalam sistem politik, dan bisa meningkatkan maupun menurunkan tingkat kesetiaan politik pada masyarakat. Dengan demikian, konsep fungsional akan dapat menggambarkan kegiatan-kegiatan dan proses yang berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur-struktur dari sistem politiknya ataupun kebijakan umum yang ditempuhnya. Dengan memahami fungsi-fungsi ini maka kita akan dapat membandingkan dari beberapa sistem politik. Misalnya, kita bandingkan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk membandingkan kedua negara tersebut kita dapat melihat struktur politik yang ada, dan bagaimana struktur politik tersebut dapat menjalankan fungsi politiknya masing-masing. Dengan perbandingan ini kita akan dapat melihat bahwa penyebaran fungsi politik lebih merata di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, setiap struktur atau lembaga politik menjalankan fungsi politik minimal satu. Sedangkan di Uni Soviet, ada satu atau dua struktur (partai dan birokrasi) yang menjalankan semua fungsi politik dan ada struktur yang hampir tidak berfungsi sama sekali. Kita dapat melihat, misalnya fungsi dari organisasi atau kelompok kepentingan yang ada di Uni Soviet, hanya menjalankan fungsi sosialisasi politik. Kelompok tersebut tidak dapat menjalankan fungsi rekrutmen atau komunikasi politik. Hal lain misalnya kita dapat melihat bahwa parlemen di Amerika Serikat lebih fungsional daripada di Uni Soviet.

### 3. Fungsi Input Dan Output

Dalam menjelaskan fungsi input dan output sistem politik, hal yang perlu untuk dipahami adalah adanya konversi sebagai suatu proses yang menandai bekerjanya sebuah sistem politik. Dalam konversi ini terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu, kelompok, ataupun organisasi. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Almond mengelompokkan fungsi input dan output dalam beberapa bagian.

#### a. Fungsi Input

- 1) Sosialisasi politik dan rekrutmen politik.
- 2) Artikulasi kepentingan.
- 3) Agregasi kepentingan.
- 4) Komunikasi politik.

#### b. Fungsi Output

- 1) Pembuatan kebijakan.
- 2) Penerapan kebijakan.
- 3) Penghakiman kebijakan.

### B. Sosialisasi Politik

Secara sosiologis, sosialisasi merupakan proses di mana nilai-nilai aktual yang berlaku dalam masyarakat serta nilai-nilai ideal ditanamkan dalam objek tertentu. Sosialisasi politik secara khusus membentuk sikap dan pola tingkah laku politik seseorang. Dalam hal ini, sosialisasi politik berperan sebagai sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan keyakinan-keyakinan politik yang dianutnya kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik berlangsung secara berkesinambungan. Individu diharapkan dapat mengetahui, memahami, serta menghayati nilai-nilai politik tertentu.

Proses sosialisasi politik dapat bersifat manifest (nyata) ataupun latent (tidak nyata). Sosialisasi politik yang bersifat nyata merupakan transmisi nilai dalam wujud informasi, sikap, pandangan, serta keyakinan politik secara eksplisit. Sedangkan sosialisasi politik yang tidak nyata mengacu pada proses di mana seseorang pada awalnya memperoleh nilai yang non-

politis. Nilai-nilai non-politis tersebut, kemudian mempengaruhi keyakinan, cara pandang, serta sikapnya di bidang politik.

Sosialisasi politik dapat memelihara kebudayaan politik masyarakat—yang berkaitan dengan upaya konservatif dalam memelihara status quo—sekaligus mengubah suatu budaya politik tertentu sehingga tercipta kebudayaan politik baru. Dalam upaya transmisi nilai-nilai politik, dibutuhkan sarana yang disebut agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik yang umum di antaranya adalah keluarga, peer group (teman dekat), sekolah, media massa, partai politik, LSM, pemerintah, serta organisasi politik.

#### 1. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik berkaitan erat dengan karier politik seseorang. Melalui karier politik tersebut, orang yang bersangkutan diharapkan dapat menjalani proses seleksi untuk mengisi lowongan dalam jabatan politik dan pemerintahan. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Secara terbuka, artinya rekrutmen politik tersebut ditujukan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebaliknya, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki suatu jabatan politik dalam sistem rekrutmen tertutup. Individu yang direkrut biasanya yang memiliki hubungan cukup erat dengan penguasa atau elite berdasarkan persamaan darah, kedekatan suku, agama ataupun ideologi.

#### 2. Artikulasi Kepentingan

Pada dasarnya, artikulasi kepentingan merupakan sebuah proses yang ditempuh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Lazimnya, kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersebut dikemukakan secara nyata melalui organisasi dan lembaga yang ada. Dalam masyarakat yang maju, pengartikulasian kepentingan masyarakat dilakukan oleh kelompok kepentingan, misalnya serikat buruh. Namun, kelompok

kepentingan semacam itu belum terlalu berperan di negara-negara berkembang. Peran mereka biasanya dijalankan oleh penguasa atau tokoh masyarakat setempat.

### 3. Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan adalah sebuah proses yang fungsinya memadukan semua kepentingan anggota masyarakat yang telah diartikulasikan. Kepentingan yang telah diartikulasikan ini digabungkan dan dikelola sedemikian rupa dalam tingkat pembuatan keputusan sehingga menghasilkan sebuah alternatif kebijakan tertentu. Artikulasi, agregasi maupun pembuatan keputusan dapat dilakukan oleh satu struktur; Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa batasan antara ketiganya sangat tipis.

### 4. Komunikasi Politik

Komunikasi politik mengacu pada proses penyampaian pesan-pesan atau informasi politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan. Pesan atau informasi tersebut dapat berupa lambang, kata-kata lisan maupun tulisan, serta isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu.

Fungsi komunikasi politik dapat bersifat formal maupun informal. Formal apabila informasi disampaikan melalui media formal, seperti radio, televisi, partai politik, dan sebagainya. Informal apabila proses penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui tatap muka (interpersonal). Misalnya, lobi politik yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah.

### 5. Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan (rule making) adalah salah satu fungsi output. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa proses pembuatan keputusan terdiri atas beberapa tahap sebelum ia melahirkan kebijakan tertentu. Tahapan tersebut mencakup artikulasi dan agregasi kepentingan. Biasanya, keputusan politik termaktub dalam peraturan-

peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif bekerja sama dengan pemerintah.

#### 6. Penerapan Keputusan

Penerapan keputusan (rule application) adalah proses menjalani peraturan yang telah ditetapkan. Lazimnya, fungsi ini dijalankan oleh lembaga eksekutif.

#### 7. Penghakiman Keputusan

Penghakiman keputusan (rule adjudication) adalah proses menghakimi tindakan- tindakan yang dianggap menyimpang dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, fungsi ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atas peraturan-peraturan yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan namanya maka lembaga yang berwenang menjalankan fungsi ini adalah lembaga yudikatif.

### C. Kesimpulan

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dengan melihat keenam struktur dalam setiap sistem politik, kita dapat membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Hanya saja, perbandingan keenam struktur tersebut tidak terlalu membantu kita apabila tidak disertai dengan penelusuran dan pemahaman yang lebih jauh dari bekerjanya sistem politik tersebut.

Suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir dan secara formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembaga- lembaga dan organisasi- organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan.

Input yang masuk dalam sistem politik disalurkan oleh lembaga politik, kemudian akan menghasilkan output, berupa keputusan yang sah dan mengikat yang sebelumnya melalui proses konversi. Dalam konversi terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu, kelompok ataupun organisasi. Fungsi input, meliputi sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output, antara lain pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan.

# BAB

# 10

## PERTEMUAN KESEPULUH POLITIK ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

### A. Pendahuluan

Gerakan politik Islam di Indonesia<sup>15</sup> senantiasa menarik untuk dianalisis baik oleh ilmuwan politik dalam negeri maupun Asing. Intelektual politik Indonesia antara lain Nazaruddin Sjamsuddin, Syafi'i Maarif, Deliar Noor. Sedangkan peneliti politik asing yang tertarik dengan gerakan politik Islam di Indonesia antara lain Herbert Feith, Geertz, J. Benda, Karl Jacson, William Liddle, dan Hiroko Horikosi. Ketertarikan ilmuwan politik tersebut senantiasa berawal dari beberapa asumsi antara lain: pertama, Islam politik Indonesia berbeda pola gerakannya dengan Islam di berbagai Negara Islam. Islam politik Indonesia lebih menerima demokrasi tetapi kental dengan budaya lokal. Kedua, Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat, sehingga memiliki power politik yang cukup besar. Dan Ketiga, Islam politik memiliki serentetan sejarah perjuangan dan perlawanan.

Secara makro eksistensi Islam politik dalam pembangunan politik bangsa tidak dapat dikesampingkan sebagaimana dikatakan peneliti senior LIPI, Taufik Abdullah

---

<sup>15</sup> Fauzan Ali Rasyid, *Politik Islam Dan Demokrasi di Indonesia*, HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah, IX, 2 (Desember 2008), h.76-83

bahwa peranan Islam dalam sejarah masyarakat- masyarakat di Indonesia sejak abad ke-15 sangat besar. Islam merupakan kekuatan historis yang cukup besar dalam dinamika sejarah (Abdullah, T., 1974: 56). Peneliti dan sejarawan lain, Onghokham, menambahkan, "sejak penyebaran agama Islam di Indonesia, agama memainkan peranan penting. Bahkan pada abad ke-20, Islam tetap tampil sebagai ideologi walaupun sudah bercampur dengan ideologi-ideologi lain seperti nasionalisme sekuler, komunisme dan sosialisme.

Apabila dianalisis mengenai proses awal masuk dan berkembangnya di masyarakat, Islam di Indonesia lebih bernuansakan Islam Fiqih atau Tasawuf (Bruinessen, M.V., 1995; Azra, A., 1999). Masyarakat lebih banyak membicarakan dan mempertentangkan masalah Fiqih ketimbang politik sehingga organisasi-organisasi Islam pada awalnya lebih mengedepankan pemurnian agama atau puritanisme seperti yang dilakukan Muhammadiyah, Persis, NU dan kelompok tarekat atau tasawuf. Puritanisme inilah yang menjadi ciri khas satu organisasi Islam. Aliran Tasawuf kebanyakan dibawa oleh para wali terutama wali songo sekitar abad ke-15 dan Fiqih banyak dibawa oleh kaum pembaharu yang lebih mengemuka sekitar awal abad ke-20.

Oleh karena itu, umat Islam Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf. Fenomena tersebut berbeda dengan kondisi Negara-negara Islam terutama di Timur Tengah. Negara- negara tersebut agak sulit menerima demokrasi. Penyebabnya adalah, pertama, demokrasi adalah faham Barat, dimana negara-negara Barat dianggap sebagai biang keladi kehancuran Khilafah Islamiyah di Turki sekitar tahun 1923, sehingga sampai sekarang masih banyak gerakan politik Islam yang ingin mengembalikan Khilafah Islamiyah seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Kedua, ada gesekan peradaban dimana negara- negara Islam semasa berdiri Khilafah Islamiyah pernah berjaya, sehingga ilmuwan politik Amerika seperti Samuel Huntington

mengeluarkan tesis tentang pentingnya dialog peradaban antar Barat dan Timur atau antara Islam dengan Barat. (Huntington, S., 1996). Ketiga, belum selesainya masalah Palestina dan Israel. Gerakan Palestina melahirkan solidaritas negara-negara Islam Timur Tengah, sedangkan Israel melahirkan solidaritas negara-negara Barat.

Perbedaan yang sekaligus menjadi keunikan Islam Indonesia inilah yang senantiasa merangsang untuk diteliti dan dianalisis oleh para ilmuwan politik. Bahkan dengan munculnya gagasan demokrasi bagi umat Islam Indonesia terjadi konsolidasi umat dengan terbentuknya Masyumi di awal kemerdekaan RI yang pernah berjaya dan berkuasa dengan tokoh militannya Mohammad Natsir yang pada tahun 2008 dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masyumi sampai sekarang menjadi impian bagi setiap partai politik Islam. Bahkan pasca jatuhnya rejim Orde Baru tidak sedikit partai Islam mengatasnamakan penjelmaan Masyumi.

## **B. Islam Politik dalam Konstelasi Politik Nasional**

Dalam babakan Islamisasi Nusantara, telah terbentuk tradisi yang menempatkan sistem nilai dari ajaran-ajaran Islam sebagai sistem nilai yang membentuk sikap dan tingkahlaku manusia Indonesia. Sistem nilai demikian, ada yang bercampur dengan sistem nilai yang lain, ada yang hadir secara utuh lalu berkembang dan terus menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Dari sudut pandang gerakan politik, Islam memiliki tiga fungsi: (1) Sebagai pandangan ideal untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan doktrin Islam. Penjajah Belanda misalnya, dinilai kafir sehingga wajib dilawan oleh kaum muslimin. (2) Sebagai nilai-nilai yang membentuk sikap dan tingkah laku muslim sehingga dikenal adanya muslim yang saleh dan kurang saleh. Konsekwensinya, seorang pemimpin muslim dipatuhi apabila kesalehannya tidak diragukan. Tidak mengherankan jika banyak pemimpin pergerakan Islam berasal dari kalangan ulama, kiyai atau figur

yang terkenal kesalehannya. Pada masa lalu, raja-raja Islamlah yang tampil sebagai pemimpin dengan ulama sebagai tangan kanannya. (3) Sebagai perekat solidaritas sosial, Islam selalu diangkat sebagai pemersatu mereka, mengatasi pembelahan sosial (Abdullah, T., 1987: 203).

Sebelum abad ke-20, pola gerakan Islam politik masih bersifat komunal dengan solidaritas yang bersifat mekanis. Solidaritas sosial ini berkembang dalam struktur masyarakat agraris dan biasanya berpusat pada tokoh-tokoh kharismatis. Artinya, pengertian nasionalisme terbatas dalam konsep etnis-kultural. Misalnya, perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme pada abad ke-19 diyakini sebagai gerakan nasionalisme untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Perang Diponegoro di Jawa Tengah, Perang Padri di Sumatera Barat, perlawanan Zenal Musthofa di Tasikmalaya juga diyakini sebagai gerakan yang bersifat etnis-kultural. Pada saat ini, gerakan demikian akan dipandang sebagai gerakan lokal.

Ciri-ciri gerakan Islam mulai berubah, dari pola komunal menjadi pola asosiasional dan solidaritas yang bersifat organis. Para pemimpinnya tidak lagi dari kalangan elite pedesaan tetapi dari kelas menengah perkotaan. Mereka pun mulai menerapkan bentuk organisasi moderen. Jika pada masa sebelumnya hubungan antara pemimpin dan pengikutnya bersifat paternalistis, maka pada awal abad ke-20 berubah menjadi lebih rasional. Gerakan yang berpola asosiasional membuat aktivitasnya meluas dan tidak lagi bersifat lokal. Pengambilan keputusan pun lebih demokratis dengan menggunakan mekanisme musyawarah. Tradisi demokrasi dan partisipasi mulai terbentuk (Ali, F., 1986: 137).

Akar kesadaran gerakan Islam politik moderen dimulai sejak lahirnya Syarikat Islam (SI) sebagai transformasi dari Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan tahun 1911. SI ini merupakan partai politik Islam pertama di Indonesia yang terkemuka dan merupakan partai modern dan nasional. Ilmuwan politik seperti Koeber dan Deliar Noer menyebutkan sebagai partai politik pertama di Indonesia sedangkan ilmuwan

lain seperti Van Niel dan Ingelson menyebutkan bahwa SI merupakan organisasi politik Indonesia abad 20 yang paling menonjol setidaknya sampai dekade pertama abad 20. Bahkan seharusnya yang menjadi landasan kebangkitan nasional adalah SDI atau SI sebab keberadaannya relatif lebih diterima diseluruh pelosok Nusantara. Berbeda dengan Boedi Utomo (BU) yang dianggap sebagai penjelmaan priyayi Jawa dan lebih memiliki misi untuk memperjuangkan masyarakat Jawa sehingga banyak daerah-daerah di luar Jawa yang menolaknya seperti Paguyuban Pasundan (Gerakan Politik masyarakat Sunda) (Erawan, M., 2000: 56-75).

### **1. Pasca Gerakan SI Inilah Muncul Gerakan-Gerakan Politik**

Nasional lainnya seperti PNI 1926 bentukan Soekarno, Partai Penyadar (1936), Persyarikatan Komunis (1920-an) dan Partai Islam Indonesia (PII) (1938). Pada tahun 1920-an SI mengalami perpecahan internal sehingga tidak dapat lagi menjadi wadah pemersatu gerakan Islam politik. Pada tahun 1937-an berdiri federasi baru bagi berbagai unsur Islam yang disebut Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI). MIAI didirikan secara bersama-sama antara K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah/sub-kultur modernis), K.H. Abdul Wahab Hasbullah (NU/sub-kultur tradinisonalis), K.H. Ahmad Dahlan (non partai) bertujuan untuk menggalang persatuan partai dan organisasi Islam dalam menghadapi situasi yang makin krisis, dijadikan ajang musyawarah sehingga konflik-konflik yang melemahkan perjuangan umat dapat diminimalisasi.

Lewat MIAI diharapkan posisi Islam dapat sepadan dengan penting dan besarnya jumlah umat Islam. MIAI berhasil mengintegrasikan berbagai ormas Islam dari berbagai aliran. Awalnya, MIAI didukung oleh 7 organisasi yakni PSII, Muhammadiyah, PUI, Al-Irsyad Cabang Surabaya, Hidayatullah, Islamiyah Banyuwangi, dan Khairiyah. Namun di tahun 1941 berkembang menjadi 21 organisasi antara lain; SI, Muhammadiyah, PUI, Al-Irsyad,

Jong Islamicten Bond, Al-Islam (Solo), Al-Ittihadul Islamiyah (Sukabumi), PII, PAI, PUSA (Sigli), Musyawaraah Al-Tholibin (Kandangan-Kalimantan), NU, Al-Jami'atul Washliyah, Nurul Islam (Tanjungpandan, Bangka Belitung), Al-Hidayatul Islamiyah (Banyuwangi), MUI (Tolitoli, Sulawesi Tengah), Persatuan Muslimin Minahasa (Menado), Al-Khairiyah (Surabaya), Persatuan Putra Borneo (Surabaya), Persatuan India Putra Indonesia dan Persatuan Pelajar Indonesia-Malaysia di Mesir.

Di masa Jepang, MIAI semula dibiarkan. Namun, karena sifat dasar yang anti penjajah tak kunjung berubah, MIAI dibubarkan pada Oktober 1943 dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Pada masa pendudukan militer Jepang gerakan politik Islam mendapat dukungan penuh, karena Jepang memiliki kepentingan untuk mendapat dukungan dari gerakan Pan Islamisme untuk melawan Sekutu. Pada masa itu, Pan Islamisme juga menjadikan Sekutu sebagai musuh yang harus dilawannya. Tokoh-tokoh Masyumi, misalnya Moh. Natsir, dan ormas Islam senantiasa menghadiri pertemuan-pertemuan internasional Islam (Kurasawa, A., 1990).

Pasca Kemerdekaan RI, diadakan Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945 untuk membentuk satu partai politik Islam. Pada kongres tersebut disepakati mendirikan Partai Masyumi yang bebas dari pengaruh kolonial dan didukung hampir oleh semua organisasi Islam lokal dan nasional dengan komponen utamanya NU dan Muhammadiyah. Terjadilah duet kepemimpinan Masyumi pertama antara NU dengan Muhammadiyah. K.H. Hasyim Asari (NU) sebagai Ketua Syuro dan Soekiman Wirjosandjojo (PII yang sekaligus sebagai orang Muhammadiyah) sebagai Ketua Badan Eksekutif/Pimpinan Pusat.

## 2. Pasang Surut Partai-Partai Islam

Perjalanan partai-partai Islam mulai awal kemerdekaan senantiasa terfragmentasi. Integrasi faksi-faksi dalam Masyumi mulai retak karena dominasi faksi nasionalis yang kuat dalam pemerintahan. Unsur masyumi tetap memiliki otonomi dalam kegiatan di bidang sosio-keagamaan. Namun, federasi juga mempunyai akibat negatif, dimana semangat golongan seringkali lebih ditonjolkan dibandingkan semangat persatuan, terutama ketika menghadapi daya tarik posisi politik formal dalam pemerintahan. Pada bulan Juli 1947 SI keluar dari Masyumi dan menjelma menjadi PSII yang bergabung dalam kabinet Amir Syarifuddin yang berasal dari kubu Komunis-Sosialis. Pada tahun 1952, NU keluar dari Masyumi berdasarkan kongres di Palembang. Dengan berpisahannya PSII dan NU dari Masyumi berarti Islam politik terfragmentasi menjadi Masyumi, PSII, NU dan Perti, selain ada pula Partai Persatuan Tharikat Islam (PPTI) dan AKUI (Aksi Kemenangan Umat Islam). Bahkan kekuatan Islam politik akhirnya saling berhadap-hadapan. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo, NU menjadi bagian dari kabinet sedangkan Masyumi menjadi oposisi.

Fragmentasi Islam politik akhirnya berimplikasi pada pemilu 1955. Walaupun aliran Islam secara total mendapat jumlah terbesar yakni 45,2% (116 kursi) - dibandingkan perolehan aliran nasionalis 27,6% (71 kursi), Sosialis Kiri-Komunis 15,2% (39 kursi) dari total 257 kursi - setelah dibagi berdasarkan garis partai, perolehan partai Islam tetap kecil. Perolehan tertinggi adalah PNI (57 kursi), disusul Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi) dan PKI (39 kursi), dan sisanya partai-partai kecil termasuk partai Islam yang kurang dari 10 kursi. Akibatnya, kendati pemerintahan yang dibentuk merupakan koalisi PNI-Masyumi-NU, formatur yang ditunjuk presiden adalah PNI sebagai pemegang suara terbesar. Hal ini akan sangat berbeda jika, misalnya, Islam politik tetap memakai satu bendera bernama Masyumi.

Analisis politik Indonesia senantiasa memetakan kekuatan-kekuatan politik Indonesia dengan model “segitiga emas” sebagaimana yang diungkapkan Harold Crouch dan William Liddle. Liddle (dalam Donald K. Emerson, 2001) mengatakan bahwa pada masa Soekarno segitiga itu terletak pada kekuatan politik Nasionalis, Islam dan PKI. Nasionalis terletak pada Soekarno dan PNI (partai terbesar), Islam terletak pada Masyumi yang merupakan kekuatan kedua sebelum pecah dengan NU yang mendirikan partai sendiri (Feillard, a., 1999). Sedangkan PKI merupakan partai terbesar ketiga terutama pada tahun 1960-an. Ketiga kekuatan ini saling bersaing dan saling menjatuhkan sehingga terjadi instabilitas politik yang kemudian diakhiri dengan Dekrit Presiden. Dekrit merupakan kemenangan nasionalis dan PKI yang berdampak pembubaran Masyumi tahun 1960.

Pasca pembubaran Masyumi “segitiga emas” terletak pada Soekarno, TNI-AD dan PKI. Terjadi persaingan antara TNI-AD dan PKI. TNI-AD dengan mendapatkan dukungan dari eks-Masyumi untuk melakukan perlawanan politik. Hal ini merupakan awal dari TNI berpolitik praktis (Said, S., 2002) dengan menjatuhkan rejim Soekarno dengan memanfaatkan ketergesaan PKI untuk berkuasa dengan melakukan kup G 30 S. Peristiwa itu mengakhiri rezim Soekarno beserta PKI dan melahirkan rezim Orde Baru (Kahin, G.M., 1980).

Pada masa Orde Baru terbentuk “segitiga emas” kembali yakni Nasionalis, Islam dan TNI. Nasionalis terletak pada Soeharto dan Golkar sedangkan Islam terutama eks-masyumi yang tidak diijinkan berdiri kembali partai masyumi kemudian terbentuk fusi PPP2 yang tidak menampung eks-masyumi begitu pula sebelum fusi dengan terbentuknya Parmusi sebagai pengganti Masyumi pada pemilu 1977. Eks Masyumi yang kecewa terhadap koalisi dengan TNI yang menjanjikan akan mendirikan kembali partai Masyumi pasca Orde Lama. Efek dari kekecewaan ini

maka Islam dijadikan kekuatan lawan oleh Soeharto dan Golkar di masa awal Orde Baru dengan menggunakan TNI sehingga Islam dianggap berseberangan dengan TNI. Dimunculkanlah kembali isu-isu pendirian Negara Islam Indonesia (NII).<sup>3</sup> Bahkan pada zaman Orde Baru muncul istilah KAB (Koalisi ABRI dan Birokrasi).<sup>4</sup> Juga istilah ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar).<sup>5</sup>

Di akhir masa Orde Baru sekitar tahun 90-an Islam dilirik kembali oleh Soeharto dan Golkar sehingga aspirasi Islam lebih diakomodir dengan munculnya UU PA, Bank Muamalah, Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), dan lain-lain (Thaba, A.A., 1996). Hal ini dilakukan karena pertama, terjadi dualisme kekuatan TNI antara Moerdani yang telah banyak mengkader TNI nasionalis (disebut dengan TNI pelangi) dan ada TNI Hijau (muncul isu ijo royo-royo) serta TNI merah putih. Kedua, konflik TNI melahirkan ketidaksolidan TNI sebagai kekuatan politik Soeharto maka dipilihlah Islam sebagai kekuatan politik tandingan sebagai alternatif dukungan politik bagi Soeharto dan Golkar. Keberpihakan Soeharto terhadap Islam diperlihatkan dengan memunculkan Panglima TNI dari kubu TNI hijau yaitu muncul Faisal Tanjung sebagai alumnus PII (Pelajar Islam Indonesia) dan yang menjamin munculnya kembali PII (Yulianto, A., 2000).

Pada masa Reformasi, Islam tetap menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan oleh elit-elit politik sehingga bermekaran partai-partai Islam sebanyak 17 partai dan menjadi peserta pemilu tahun 1999, dan pada tahun 2004 terdapat enam partai. Pada SU MPR 1999 terlihat pertarungan antara Islam dan Nasionalis ketika memperebutkan kekuasaan eksekutif. Islam tercermin dari PKB, PAN, PBB. Nasionalis ditonjolkan PDIP. Sementara Golkar yang berhaluan nasionalis lebih bersikap netral karena menyelamatkan diri dari hujatan-hujatan yang menekan Golkar bubar sebagai pertanggungjawaban Orde Baru. Golkar dan TNI kemudian berpihak kepada Islam

dengan mendukung Gus Dur sebagai Presiden, walaupun pemenang Pemilu adalah PDIP. Sayang kemenangan ini tidak berumur panjang.

Dengan demikian jatuhnya Soeharto, Habibie (yang tidak direspon untuk menjadi presiden kembali) dan Gus Dur disebabkan oleh tidak terkonsolidasikannya kekuatan-kekuatan politik Islam di dalam negeri, dunia internasional yang tidak menghendaki kemenangan kelompok Islam, serta faktor krisis ekonomi internasional. Dalam hal ini saya sepakat dengan para pengamat ekonomi seperti Faisal Basri yang berkomentar bahwa kejatuhan para pemimpin nasional tersebut merupakan efek dari kegagalan program IMF dan kelemahan tim ekonomi nasional dalam menentukan lembaga ekonomi dunia (Winters, J.F., 1999: 56-60).

### **3. Politik Aliran dalam Internal Islam Politik**

Para pengamat politik Indonesia masih menganggap relevan analisis Geertz untuk melihat politik nasional termasuk Islam politik. Geertz membagi kekuatan politik kepada tiga unsur yaitu Priyayi, Santri dan Abangan. Priyayi mempertahankan nilai-nilai aristokrat dan nilai-nilai baru sebagai bumbu. Santri lebih mendasarkan pada nilai-nilai Islam. Abangan lebih menjadi kelompok yang tak berideologi dengan mengedepankan rasionalitas (Geertz, C., 1986).

Analisis Geertz dalam Islam politik dapat digunakan dengan melihat realitas perilaku Islam politik. Pemilahan ini dapat terlihat dari mulai terbentuknya partai-partai Islam semenjak sebelum kemerdekaan. Partai Islam lebih bersifat lokal, seperti misalnya Perti yang hanya di Minangkabau, dan bersifat aliran seperti SI yang lebih didominasi kaum saudagar (pedagang). Pasca kemerdekaan, perpecahan Masyumi dengan NU, disebabkan oleh adanya perbedaan aliran antara kaum tradisional (NU) dan modernis (Muhammadiyah, Persis). Pada masa Orde Baru, NU kembali ke Khittah tahun 1984 berdasar Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo yang kemudian NU keluar dari PPP. Hal tersebut karena persaingan antara kaum tradisional (NU) dengan

kaum modernis yang terkumpul dalam MI. Begitu juga pasca Orde Baru partai-partai terbangun karena aliran agama yang menjadi aliran politik, NU dengan PKB, Muhammadiyah dengan PAN dan PBB dengan DDII serta PERSIS (sekarang keluar dari PBB), dan PKS dengan gerakan harokah dan tarbiyah yang berkembang di kalangan kampus perguruan tinggi. Dengan demikian betapa sangat berpengaruhnya aliran atau madzhab dalam agama terhadap perilaku politik dalam partai-partai Islam. Yang semua itu menjadikan Islam politik sebagai bayang-bayang kebesaran tanpa kemenangan.

### C. Agenda Islam Politik ke Depan

Islam politik akan senantiasa menjadi bayang-bayang yang diharapkan sekaligus juga ditakuti oleh kekuatan-kekuatan politik yang tengah bersaing. Dengan demikian, Islam politik akan senantiasa menjadi penentu kepemimpinan nasional ke depan. Hanya tinggal memilih antara maju dengan kekuatan sendiri atau berkoalisi dengan kekuatan nasionalis.

Terdapat beberapa agenda yang harus dilakukan Islam politik ke depan antara lain: pertama, mengembangkan paradigma politik dari isu politik yang senantiasa menjual ideologi Islam berbentuk memperjuangkan Piagam Jakarta, dikembangkan kepada aspek-aspek yang menyangkut kehidupan nyata dalam masyarakat berupa program reformasi ekonomi dan supremasi hukum yang ditawarkan kepada masyarakat.

Elit-elit Islam politik yang akan atau yang telah menikmati segala macam kenikmatan politik harus mulai menyadari bahwa realitas politik yang diperankannya belum mampu membawa negara ini kearah yang lebih mensejahterakan rakyat. Kemiskinan dan pengangguran setiap tahun senantiasa meningkat dan harga bahan makanan pokok semakin sulit dan mahal. Sudah saatnya bagi elit politik dan seluruh rakyat untuk melakukan muhasabah (refleksi diri) dan muraqabah (kerja keras, tekun, jujur, dan cermat) dalam menghadapi persoalan

bangsa yang semakin terpuruk sehingga terhindar dari kebangkrutan.

Agenda kedua, membangun demokrasi di internal partai. Kelemahan partai-partai Islam senantiasa lebih mengedepankan sistem patrimonial, otoritas tradisional dan kepatuhan, sehingga ketika terjadi konflik internal partai lebih cepat memisahkan diri dengan membuat partai baru ketimbang melakukan islah dan muhasabah. Misalnya kasus konflik PPP, PKB dan konflik internal PBB.

Agenda ketiga, Partai-partai Islam membuka ruang yang sangat lebar terhadap munculnya kader-kader muda yang visioner. Pada akhir tahun 2007 muncul opini pemimpin bangsa dari kaum muda. Opini tersebut lahir sebagai antitesa dari realitas politik di era reformasi yang antara lain: pertama, di era reformasi terjadi perubahan sistem politik tetapi tidak melahirkan perubahan aktor politik, sehingga reformasi dianggap sebagai perubahan kulit saja. Kedua, munculnya elit-elit politik yang senantiasa terkait dengan kasus-kasus hukum di masa lalu, sehingga melahirkan sulitnya supremasi hukum dan hukum masih tetap menjadi pelindung sebagian elit. Ketiga, Masyarakat merasa jemu dengan kepemimpinan bangsa yang lamban dalam menangani krisis. Keempat, adanya kesulitan anak muda untuk muncul menjadi aktor politik baru karena dihambat oleh aktor lama yang masih ingin tetap bercokol sebagai pelaku politik.

#### **D. Kesimpulan**

Antitesa di atas cukup beralasan karena pertama, dilihat dari sejarah kepemimpinan nasional yang mampu melakukan perubahan yang signifikan senantiasa dipelopori dari pemimpin yang dalam kategori muda seperti Soekarno diusia 43 tahun menjadi Presiden dan ia mampu melakukan perubahan begitu pula Soeharto diusia 47 tahun menjadi Presiden dan ia pun mampu melakukan perubahan yang signifikan. Akan tetapi berbeda kepemimpinan pada masa Reformasi yang rata-rata dipimpin oleh Presiden yang berusia di atas 55 tahun melahirkan

kepemimpinan yang rapuh sehingga mudah berganti-ganti kepemimpinan yang melahirkan instabilitas politik dan ekonomi.

Begitu pula dengan pemimpin-pemimpin negara lain yang dipimpin dari kaum muda senantiasa melakukan perubahan signifikan seperti Ahmaddinejad, Presiden Iran, yang terpilih pada usia sekitar 51 tahun, Lee Kuanyu yang terpilih pada usia 48 tahun, Aroyo Filifina diusia 51, Tony Blair di Inggris diusia 48 tahun dan Bill Clinton pada usia 50-an dan terakhir adalah Barack Husein Obama di Amerika Serikat.

Kedua, kaum muda merupakan pemilih mayoritas sehingga opini tersebut bagian dari menarik simpati kaum muda untuk mendorong anak muda tampil menjadi elit baru. Moto partai yang senantiasa dikemukakan partainya adalah partai anak muda. Ketiga, terbuka ruang bagi anak muda untuk tampil menjadi elit baru walaupun masih sedikit seperti di Partai Demokrat ada Anas Urbaningrum, di PDIP ada Budiman Sujatmiko, di Golkar ada Priyo Budisantoso, di PKB ada Muhaimin Iskandar, PKS ada Rama Pratama dll. Keempat, adanya gereget mencari pemimpin yang dapat mempercepat penyelesaian krisis. Indonesia kalah dari Thailand yang dapat menyelesaikan krisis dalam waktu relatif singkat sekitar 2-3 tahun sedangkan Indonesia memerlukan waktu 10 tahun.

Kelima, dengan kaum muda menjadi pemimpin bangsa akan terhindar dari kasus-kasus masa lalu sehingga supremasi hukum akan mudah dilaksanakan dan elit muda akan terkonsentrasi untuk melakukan perubahan. Berbeda dengan kaum tua yang senantiasa terkait dengan kasus masa lalu sehingga ia sibuk untuk menyelamatkan diri dan fokus perubahan menjadi terabaikan.

Sebenarnya dalam rangka mempercepat sirkulasi kepemimpinan nasional akan sangat tergantung kepada sistem kaderisasi dan rekrutmen politik dalam partai politik. Apabila partai politik membuka ruang yang lebar bagi anak muda untuk tampil menjadi elit maka kecenderungan kepemimpinan anak muda akan dengan cepat terwujud. Hal ini dapat terlihat seperti Soekarno dan Soeharto menjadi tampuk pimpinan bangsa

karena partai membuka diri untuk mendorong mereka menjadi elit bangsa, walaupun pada zamannya banyak juga kaum tua menjadi aktor politik.

Untuk pemilu 2009, icon politik akan tetap didominasi kaum tua karena partai-partai besar masih mencalonkan kaum tua. PDIP masih mencalonkan Megawati, Golkar masih tergantung pada Jusuf Kala, dan partai-partai baru masih mengangkat Wiranto, Sutiyoso, Rizal Ramli, dan lain-lain. Apabila pigur-pigur tersebut masih dipertahankan maka peluang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan semakin besar untuk memenangkan pemilihan presiden. Berdasarkan laporan lembaga-lembaga survei yang dilakukan pada akhir tahun 2007-2008, SBY masih menjadi calon yang diunggulkan walaupun reputasinya mengalami naik dan turun. Walaupun terdapat kaum muda yang ditonjolkan belum tentu mampu menandingi reputasi tokoh tua karena ruang dan waktu belum berpihak kepada kaum muda secara luas untuk menunjukkan sebagai calon alternatif.

Pemilu langsung akan sangat memberikan peluang terhadap kandidat yang memiliki popularitas. Populerly election akan melahirkan 'personalized politics' sedangkan partai politik sebagai mesin politik hanya menjadi pelengkap persyaratan presiden belum menjadi penentu kemenangan. Hal itu terbukti pada pemilu 2004, Golkar sebagai pemenang pemilu legislatif tidak mampu memenangkan pilpres. Sudah saatnya rakyat menentukan agenda prioritas, khususnya untuk menentukan pilihan yang selalu melekat dalam demokrasi, yaitu antara mewujudkan keterwakilan (representativeness) dan membangun pemerintahan yang efektif (governability), tetapi dikontrol oleh rakyat. Pilihan kedua tampaknya perlu dilakukan agar demokrasi prosedural tidak semakin terjebak pada demokrasi kulit, simbolik, hanya berisi slogan-slogan mengatasnamakan rakyat (Cristiadi, J., 2008).

# BAB

# 11

## PERTEMUAN KE SEBELAS POLITIK ISLAM DI INDONESIA

### A. Persepsi Responden Jika Ada Larangan Terkait Politik Dinasti di Indonesia

Pemikiran Politik Islam telah berkembang sejak periode klasik, pertengahan, modern hingga kontemporer. Masing-masing pemikir politik Islam dalam tiap periode mempunyai pandangan yang unik sesuai pengalaman mereka berinteraksi dengan pemerintahan pada masanya. Dari para pemikir tersebut, umat Islam mendasarkan teori dan praktik politiknya hingga kini<sup>16</sup>.

Runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani pada tahun 1924 serta kolonialisme yang menimpa dunia Islam pada abad ke-18-20 selain memberikan dampak negatif berupa runtuhnya peradaban politik Islam, juga memberi dampak positif dengan membuat kaum Muslimin dapat merumuskan kembali jati dirinya, termasuk pemikiran politik Islam. Krisis kekhilafahan menjadikan umat Islam lebih mengkaji gagasan negara Islam sebagai pengganti negara kekhilafahan yang nampaknya sulit untuk dihidupkan kembali.

Pasca sekularisme di Turki dan kejatuhan rezim di beberapa negara Arab melalui Arab Spring, muncullah fenomena post-Islamisme. Dawam Raharjo (Kompas,

---

<sup>16</sup> Muhammad Zulifan, Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016), h.172

23/6/2016) menyebut gejala post-sekularisme kini sedang terjadi di Mesir melalui gerakan Ikhwanul Muslimin, Turki melalui Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) serta Tunisia melalui Partai Ennahda. Menurutnya, gerakan Islam tersebut telah bergerakpenerapan syariat Islam di dalamnya, serta bergerak mengusung doktrin Islam komprehensif melalui jalur demokrasi.

Di Indonesia, sebagian kaum Muslimin kini secara terbuka mengusung ide negara Islam atau lebih jauh kembalinya sistem khilafah untuk mengganti sistem Demokrasi dan Pancasila sebagaimana diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).<sup>73</sup> Ide untuk mewujudkan nilai-nilai agama (syariat) ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya dapat dilihat dari maraknya perda bernafaskan Islam atau lebih dikenal dengan Perda Syariah yang muncul di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, cita-cita penerapan nilai Syariah telah melahirkan UU Keuangan Syariah, UU Zakat dan UU Wakaf.

Al-Farabi dalam menggambarkan pentingnya sebuah pemerintahan, mengilustrasikan fungsi negara sebagai anggota badan yang apabila satu menderita maka yang lain akan merasakannya (Azhar, 1997). Anggota badan juga mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda, begitu pula kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan sebagai manifestasi interaksi sosial. Bagi al-Farabi, kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan jantung bagi badan yang merupakan sumber koordinasi. Oleh karenanya, pekerjaan kepala negara tidak hanya bersifat politis, melainkan meliputi etika sebagai pengendali way of life<sup>17</sup>.

Al-Farabi memberikan 12 kriteria bagi seorang kepala negara yang salah satunya harus memiliki fa'al (akal aktif) yang bisa menyerap ilham dan wahyu. Kriteria ini terlalu ideal

---

<sup>17</sup> Muhammad Zulifan. Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 173

dimana filosof dan Nabi merupakan tokoh tertinggi yang layak menjadi kepala negara. Namun al-Farabi memberikan alternatif dari idealismenya tersebut dengan menyatakan bila masyarakat atau negara kesulitan dalam mencari kepala negara yang bersatus Nabi atau filosof, bisa digantikan dengan sistem presidium.

Al-Mawardi, pengarang kitab politik al-ahkam al-Sulthaniyah, mendasarkan teori politiknya dengan terlebih dahulu merumuskan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan memerlukan bantuan dari pihak lain. Perbedaan inteligensia, kepribadian dan bakat mendorong manusia untuk saling bekerja sama. Berangkat dari unsur kerjasama inilah al-Mawardi berpendapat bahwa manusia sepakat mendirikan negara. Adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar suka rela (Syadzali, 1993). Hubungan antara ahlul halli wal aqdi (legislatif) dengan kepala negara (eksekutif) merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak di kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Kepala negara selain berhak ditaati oleh rakyatnya dan menuntut adanya partisipasi dan loyalitas penuh mereka; sebaliknya kepala negara mempunyai kewajiban pada rakyatnya seperti memberikan perlindungan, mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Bagi Al-Mawardi, yang berwenang memilih kepala negara adalah lembaga legislatif (ahl al-ikhtiyar), mereka dipersyaratkan memiliki keadilan; (2) memiliki pengetahuan dan mampu mengetahui siap yang berhak menjadi kepala negara. Sementara untuk jabatan kepala negara dipersyaratkan: (1) adil dalam arti luas; (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad; (3) sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya; (4) sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk melakukan aktivitas; (5) pandai dalam mengendalikan urusan rakyat, dan (6) berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi agresor dan (7) keturunan suku Quraisy.

Dalam suskesi kepala negara ditempuh melalui dua sistem, yakni pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi atau wasiat kepala negara sebelumnya atau dengan cara penunjukan<sup>18</sup>. Al-Mawardi tidak menentukan sistem mana yang harus dipraktekkan. Ini menunjukkan sikapnya bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, ia tidak menemukan suatu sistem baku tentang suskesi kepala negara yang dapat dipastikan bahwa itu yang dikehendaki oleh Islam. Hal ini mengingat sistem suskesi dalam Islam yang telah dipraktekkan oleh para sahabat ada tiga; pertama, pemilihan umum seperti yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti dalam kasus terpilihnya Abu Bakar ra.; kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini dipromosikan kepada rakyat untuk dijustifikasikan (disahkan), seperti dalam kasus terpilihnya Umar ibn Khattab; dan ketiga, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dahulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana dalam kasus terpilihnya Utsman ibn Affan ra. (ash- Shiddieqy, 1969).

Ibnu Khaldun, pengarang kitab Muqaddimah, memandang bahwa negara ada berkat rasa persatuan dan soliditas yang kuat. Terbentuknya negara adalah suatu gejala alami bagi manusia (Zainuddin, 1992). Kendati alami, peranan agama sangat diperlukan dalam menengakkan negara. Dengan adanya peran agama, maka rasa solidaritas itu akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, justru seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Teori negara Ibnu Khaldun selain berdasarkan pada proses sosiologis, juga didasarkan pada agama. Ia tetap sebagai pelanjut pemikir-pemikir sebelumnya seperti al-Farabi, al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Muhammad Zulifan. Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 175

<sup>19</sup> Muhammad Zulifan. Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, Jurnal Politik

Ibnu Khaldun memandang bahwa penguasa bukan pada atribut penguasaannya, melainkan sekadar dipercaya rakyat untuk mengurus mereka. Relasional di sini dapatlah dikatakan relasi demokratis. Kepentingan rakyat terhadap penguasa bukanlah dilandasi karena sesuatu hal yang luar biasa, melainkan karena rakyat mempercayainya untuk mengurus kepentingannya. Baik buruknya penguasa tergantung bagaimana cara memimpinnya. Penguasa yang terbaik bukanlah yang paling pintar, tetapi yang bersifat pertengahan, *al-mahmudah huwa la tawassut* (ibid.)

Meski tidak menghendaki tidak terlalu pintar, dalam suksesi kepala negara tetap mensyaratkan seorang calon harus disetujui oleh *ahlul halli wal aqdi* dan harus memiliki pengetahuan, adil, mampu, sehat badan, panca indera dan dari suku Quraisy. Mengenai suku Quraisy, Khaldun berusaha menerangkan bahwa pemegang kendali umat haruslah berasal dari golongan yang memiliki dominasi terhadap golongan lainnya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, kepala negara memiliki beberapa fasilitas dan hak, di antaranya: dominasi (*Ghalabah*), pemerintahan (*al-Sulthan*), dan kekuasaan untuk melakukan tekanan (*al-yad qahirah*). Fasilitas itu dimaksudkan sebagai tindakan preventif, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam masyarakat. Untuk menghindari kesewenangan kepala negara, dibuatlah peraturan dan kebijaksanaan politik tertentu yang harus ditaati oleh semua pihak. Peraturan tersebut menurut Khaldun dapat berasal dari hasil musyawarah para cendekiawan, negarawan, rohaniawan ulama, maupun aturan yang bersumber dari ajaran agama. Sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran politik Islam yang menarik adalah keberaniannya menyatakan adanya peraturan yang berasal dari rasio. Artinya, seorang kepala negara agar efektif dalam pemerintahannya tidak harus mendasarkan segala

sesuatu pada hukum agama, melainkan didasarkan pada moralitas konvensional. Dari sini berlaku rumus “konvensi moral itu menjadi landasan hukum.” Hal itu hampir senada dengan ungkapan Ibnu Taimiyah bahwa penguasa yang baik meski kafir adalah lebih baik dari penguasa yang zalim meski Islam (Azhar, 1997).

## **B. Pemikiran Politik Islam Abad Modern**

Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), dalam melihat politik menganjurkan pembentukan Jamiah Islamiyah, yakni suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam yang disebut sebagai Pan-Islamisme (Pulungan, 1994). Asosiasi ini berdasar solidaritas akidah Islam yang bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam serta menentang kolonialisme dan dominasi Barat<sup>20</sup>.

Al-Afghani menghendaki bentuk republik bagi negara Islam. Alasannya, dalam sistem Republik terdapat kebebasan berpendapat dan keharusan bagi kepala negara tunduk pada undang-undang. Yang berkuasa di dalam negara adalah konstitusi dan hukum, bukan kepala negara. Kepala negara hanya berkuasa untuk menjalankan undang-undang dan hukum yang dirumuskan lembaga legislatif. Pemikiran al-Afghani ini merupakan sintesis antara pemerintahan Barat dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian al-Afghani menghendaki reformasi politik Islam dengan mengganti bentuk khilafah menjadi republik.

Berbeda dengan al-Afghani, Muhammad Abduh (1849-1905) yang merupakan murid al-Afghani, tidak memperdulikan bentuk negara, karena Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan. Menurut Abduh, jika sistem khilafah masih tetap menjadi pilihan, maka bentuk ini harus bersifat dinamis yakni mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi

---

<sup>20</sup> Muhammad Zulifan. Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016) 180

dan kebebasan berfikir (Ahmad, 1979). Hal ini untuk mengantisipasi dinamika zaman. Abduh memandang bahwa adanya kejumudan umat Islam disebabkan adanya pemerintahan yang sewenang-wenang dan absolut. Bagi Abduh, syariat Islam mempunyai pengertian sempit dan luas. Islam memiliki unsur dinamis yang dapat disesuaikan dengan dinamika zaman lewat jalan ijtihad.

Rasyid Ridha (1865-1935) dalam karyanya *al-khilafah au al imamah al-uzhma* berpendapat bahwa jabatan khilafah perlu dihidupkan kembali dengan membentuk *ahlul halli wal aqdi*. Kelompok ini bertugas mendirikan pemerintahan yang mengatur kemaslahatan umat Islam. Ridha menghendaki bahwa khalifah adalah orang yang ahli fikih (*faqih*) agar mampu mengobati kerusakan masyarakat dalam pemerintahan modern. Baginya, jabatan khalifah adalah kewajiban *syara'* yang eksistensinya sangat penting dalam penerapan hukum syariat Islam yang terjamin dan terhindar dari berbagai bahaya, karena bentuk pemerintahan lain tidak mampu menerapkan syariat Islam (Ridha, 1341 H: 73).

Meski demikian, Ridha tetap mempertahankan sistem khilafah, tetapi ia menginginkan adanya perbaikan dalam pemerintahan tersebut berupa pelaksanaan *syura* dalam pemilihan khalifah yang selama ini berjalan secara turunturun serta dalam perumusan peraturan kebijakan politik, perang, pembinaan kesejahteraan umum. Termasuk dalam penetapan peraturan yang bersifat keagamaan yang tidak ada *nash* hukumnya dalam al-Quran dan Sunnah.

Dalam keanggotaan *ahlul halli wal aqdi*, Ridha berpandangan lebih maju dari kebanyakan pemikir zaman klasik. Ia berpendapat bahwa keanggotaan lembaga ini tidak hanya dari ulama atau ahli agama yang sudah mencapai tingkat *mujtahid* saja, tapi juga dilengkapi oleh mereka para pemuka masyarakat di berbagai bidang perdagangan, perindustrian, dan sebagainya. *Ahlul halli wal Aqdi* tidak hanya bertugas mengangkat khalifah saja. Mereka juga bertugas sebagai pengawas atas jalannya pemerintahan khalifah dan mencegah

perbuatan penyelewengan meskipun dengan kekerasan. Mereka bisa mengakhiri kekuasaan khalifah jika kepentingan umum terancam.

Untuk mempersiapkan calon khalifah, perlu didirikan lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Lulusan dari perguruan tinggi ini dipilih untuk dicari yang memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu dan ijtihad. Pemilihan ini dilakukan oleh sesama alumnus lembaga dan kemudian dikukuhkan melalui baiat ahlul halli wal aqdi dari seluruh dunia Islam. Adapun khalifah yang telah dibaiat ini wajib ditaati oleh tiap muslim dan dilarang untuk menentangnya.

### **C. Pemikiran Politik Kontemporer**

Ismail Raji al-Faruqi dan Naquib al- Attas, kedua tokoh ini memperkenalkan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi keduanya, kemunduran umat Islam disebabkan karena kaum Muslimin menerima begitu saja kebudayaan-kebudayaan asing (al- Faruqi, 1984: VII). Menurut al-Faruqi, umat islam perlu mengintegrasikan aspek kemodernan dan keislaman dengan menguasai semua disiplin modern sebagai prasyarat utama. Setelah itu mereka harus mengintegrasikan seluruh pengetahuan itu ke dalam kebutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali dan akomodasi terhadap berbagai komponennya sebagai word view Islam dan menetapkan nilai-nilainya. Setelah itu disosialisasikan kepada generasi muslim melalui pengajaran serta buku-buku teks secara Islami. Perlu juga dibangun pusat pemikiran dan universitas Islam untuk mendukung ide Islamisasi Ilmu pengetahuan tersebut. Sementara Syekh Naquib al-Attas, pendiri International Institute of Islamic Thought Civilization (ISTAC) di Malaysia, mengemukakan betapa dunia Islam mengalami kemunduran akibat adanya konfrontasi historis yang dikedalkan oleh kebudayaan dan peradaban Barat terhadap Islam. Bagi al-Attas, dilema yang dihadapi umat Islam saat ini disebabkan oleh; pertama, kebingungan dan kekeliruan dalam pengetahuan kedua, hilangnya adab dalam umat dimana

kedua hal tersebut mengakibatkan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak cakap untuk memimpin umat yang sah karena tidak memiliki standar moral, intelektual, dan spiritual yang tinggi sebagai acuan kepemimpinan Islam (al-Attas, 1981).

FazlurRahman (1982) mengemukakan bahwa satu-satunya jalan yang mungkin untuk melakukan pembaharuan adalah dengan cara merombak kembali asal-usul dan pengembangan keseluruhan tradisi Islam. Fazlur Rahman dengan neomodernisme-nya mengingatkan umat Islam untuk dapat membedakan secara jeli Islam normatif dan Islam Islam historis. Rahman membenarkan secara konseptual sistem parlemen di Barat, namun secara substansif-etik Rahman menilai parlemen tersebut berorientasi pada hal-hal yang material belaka. Umat Islam bisa saja menerima sistem parlemen tersebut sepanjang substansi musyawarah-nya berorientasi pada hal-hal yang spiritualistic.

Mohamed Arkoun (1994), pemikir Islam kontemporer asal Al-Jazair dengan konsep Islamologi terapannya mencoba menampilkan konsep wewenang dan kekuasaan. Bila wewenang bersifat kharismatis teologis sebagai ciri pemikiran makkiyah dan melahirkan kesadaran dan ketundukan secara sukarela, maka konsep kekuasaan lebih bersifat rasionalistik dan sistemik sebagai ciri pemikiran madaniyah dan melahirkan pemaksaan kekuasaan terhadap rakyat. Arkoun tidak setuju masyarakat yang bersifat taqlid terhadap status quo dan harus bersifat oposisi loyal. Arkoun mengkritik penggunaan istilah-istilah politik yang dominatif dan hegemonik seperti terminologi baiat, wakil Allah di dunia (khalifah fil-ard), al-Mu'tasim, al-Mutawakkil, bilah, yang digunakan oleh dinasti-diansti Islam klasik.

Arkoun menawarkan enam pemikiran Islamologi terapan (empirisme Islam), pertama, perlu menegani isi obyektif al-Quran serta pemikiran para pendiri tradisi Islam. Kajian tidak boleh netral seperti Islamolog Barat klasik dan tidak bebas nilai. Kedua, meninggalkan episteme abad pertengahan muslim, serta menggunakan episteme modern seperti di Barat dewasa ini ilmu

sosial modern telah menghancurkan saintifik Barat sebelumnya. Ketiga, studi fenomena agama tidak dibatasi pada satu agama tertentu belaka seperti yang dikaji di Barat. Keempat, tidak apriori kepada kebudayaan orang lain seperti yang tercermin dalam konflik Arab-Yahudi, atau konflik peradaban ala Huntington. Kelima, Islamologi terapan merupakan suatu paraktik ilmiah pluridisipliner. Pendekatan penelitian agama tidak bisa dipisahkan dari psikoanalisis, psikologi, sejarah, sosial, budaya dan sebagainya. Islamologi terapan harus terbuka pada kritik karena tidak ada suatu metodologi pun yang bersifat sempurna (Azhar, 1997).

### **1. Tipologi Bentuk Pemerintahan dalam Islam**

Para pemikir politik Sunni berpandangan bahwa masalah kepemimpinan merupakan masalah keduniawian<sup>21</sup>. Oleh karena itu, kewajiban mengangkat pemimpin politik ditentukan oleh kesepakatan kaum Muslimin (ijma'), berdasarkan pertimbangan wahyu (agama). Penentuan pengganti Nabi diserahkan kepada kaum Muslimin, bukan ditentukan oleh wahyu. Sedangkan Syiah berpendapat bahwa penentuan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi adalah ditentukan oleh wahyu yakni hadits Ghadir Khum yang mereka pahami bahwa Nabi telah menunjuk Ali, menantu dan keponakannya sebagai pengganti Nabi (Kamil, 2013).

Syiah berkeyakinan bahwa mempercayai imam yang dianggap ma'shum (terhindar dari dosa) merupakan salah satu rukun iman atas agama, selain keimanan pada keesaan Allah, kenabian, hari akhir, dan keadilan. Syiah Imamiyah (itsna asyariyah) percaya kepada 12 imam, Syiah Ismailiyah (sab'ah) percaya pada tujuh imam, serta Syiah Zaidiyah percaya pada lima imam saja. Pemahaman ini kemudian dikembangkan oleh Khomeini dengan konsep wilayah faqih

---

<sup>21</sup> Muhammad Zulifan. Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 186

(kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih (ulama) yang paling otoritatif yang kekuasaannya di atas Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang berlaku pada negara Iran modern sekarang ini.

Ada tiga tipologi pemikiran dalam melihat relasi Islam dan bentuk pemerintahan, yakni bentuk pemerintahan Teo-Demokrasi, sekuler dan moderat (Kamil, 2013: 21). Tipologi Teo-Demokrasi melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*din wa daulah*). Pandangan ini menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara benar-benar organik dimana negara berdasarkan syariah Islam dan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif bahkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya sebagai agama seperti pengertian Barat yang sekuler, tetapi suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan tak terkecuali masalah politik. Adapun tokoh yang termasuk dalam tipologi ini adalah Rasyid Ridha (1865-1935), Sayyid Qutb (1906-1966, Abu al-A'la al-Maududi (1903- 1979), dan di Indonesia Muhammad Natsir.

Khusus Indonesia, Muhammad Natsir menyatakan bahwa Islam lebih dari sekedar sistem agama, tetapi suatu kebudayaan yang lengkap. Negara adalah dua entitas *relegio-politik* yang menyatu. Konstruksi negara yang dicita-citakan Islam adalah negara yang berfungsi menjadi alat Islam yang secara formal mendasarkan Islam sebagai ideologinya. Ia berfungsi mengawasi berlakunya nilai-nilai Islam dan menjunjung tinggi supremasi hukum Islam (Effendi, 1998).

Kedua, tipologi Sekuler. Menurut tipologi ini, Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara peraturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu persoalan negara adalah persoalan sekuler (*duniawi*) yang

pertimbangannya adalah akal dan moralitas (kemaslahatan) kemanusiaan yang bersifat duniawi semata. Negara tidak harus diatur agama, demikian juga negara tidak boleh intervensi masalah agama karena agama dalam persoalan pribadi dan keluarga. Pemikir yang masuk dalam tipologi ini adalah Ali Abd al-Raziq (1888- 1966), A. Luthfi Sayyid (1872-1963), dan di Indonesia Soekarno (1901-1970).

Bagi al-Raziq, misi Nabi adalah misi agama an sich yang tidak ada kaitannya dengan politik keduniawian (sekuler). Nabi adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk mendakwahkan Islam tanpa bermaksud mendirikan negara. Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul yang semata-mata mengabdikan pada agama. Kekuasaan nabi adalah kekuasaan rohaniah yang berbeda dengan kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan fisik yang meniscayakannya ketundukan jasmaniyah. Nabi tidak mendirikan kerajaan atau negara dalam pengertian yang selama ini berlaku dalam ilmu politik. Karena itu, tidak ada seorangpun yang dapat mengganti risalahnya (Kamil, 2013).

A Luthfi Sayyid berpendapat hal yang sama. Menurutnya, agama dan negara adalah hal yang berbeda. Dalam membangun negara, kamu muslimin tidak harus mengikatkan diri pada Islam dan pan-Islamisme karena tidak lagi relevan. Sikap seperti ini juga diyakini Soekarno di Indonesia. Baginya, agama dan negara harus dipisah agar keduanya berjalan sendiri-sendiri. Negara harus dilepaskan ikatannya dari negara dan demikian sebaliknya. Argumen yang dikemukakan Soekarno adalah, jika agama diperkenankan hadir dalam wilayah publik, ia akan menjadi alat politik belaka bagi yang berkepentingan dan juga akan melahirkan rasa terdiskriminasi bagi pemeluk selain agama publik tersebut. Menurut Soekarno, yang mesti diambil dari agama (semisal Islam) adalah api atau semangatnya saja, dan karakter agama juga harus rasional, kultural, dan progresif (Effendi, 1998).

Di Turki, pemikir yang berpandangan sama dengan pemikir di atas adalah Zia Gokalp (1875-1924). Ia menganjurkan pemisahan masalah dinayet (keyakinan dan ibadah) dan muamalah (sosial), termasuk di dalamnya soal politik. Bagi Gokalp, persoalan agama adalah urusan ulama, sementara persoalan sosial politik adalah urusan sultan atau negara. Hal ini karena persoalan muamalah sangat dinamis dan berubah-ubah, sementara agama cenderung tidak demikian (Nasution, 2003).

Tipologi ketiga adalah tipologi moderat. Tipologi ini menolak pendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik. Tetapi menolak juga pendapat kedua bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik (Kamil, 2013). Kendati Islam tidak menunjukkan preferensi pada sistem politik tertentu, namun dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral dan etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dimana umat Islam bebas memilih sistem mana yang terbaik. Tokoh yang termasuk dalam tipologi ini adalah Muhamamd Hussein Haikal (lahir 1888), Muhamamd Abduh (1862-1905), Fazlurrahman, Muhamed Arkoun, dan di Indonesia Nurcholish Madjid.

Haikal (1993) berpendapat bahwa di dalam al-Quran dan sunnah tidak terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang langsung berhubungan dengan ketatanegaraan. Ayat tentang musyawarah misalnya tidak diturunkan dalam kaitan sistem pemerintahan. Oleh karenanya empat khalifah periode awal (khulafaur rasyidin) memang dibaiat masyarakat di masjid, tetapi mereka diangkat tidak selalu melalui pemilihan. Nabi sendiri membiarkan sistem pemerintahan Arab asalkan menerima baik agama yang dibawanya. Menurut Haikal, ada tiga prinsip dasar peradaban manusia menurut sumber Islam yakni prinsip monoteisme murni, kedua, prinsip sunatullah (hukum alam/logika kausalitas) yang tidak pernah berubah, dan

ketiga, persamaan antar sesama manusia sebagai konsekuensi prinsip pertama dan kedua.

## **2. Civil Society dalam Sejarah Politik Islam**

Civil Society dalam Sejarah Politik Islam Civil society<sup>22</sup> menekankan aspek horizontal masyarakat. Salah satu ciri civil society adalah adanya civility (keberadaban) dan fraternity (persaudaraan). Al-Habib al-Janhani dalam Kamil (2013) menyebut civil society sebagai masyarakat yang bukan saja independen berhadapan dengan pemerintah yang hegemonik, serta dapat mengurus diri sendiri, melainkan juga mempunyai spirit individual dan kelompok untuk bergerak dalam kerja-kerja sosial, kemaslahatan umum, membela hak-hak masyarakat lemah, memiliki solidaritas sosial, toleran, mendahulukan dialog, mengakui hak-hak orang lain, perbedaan pendapat, dan sebagai masyarakat horizontal, bukan struktural (vertikal). Civil society menjunjung tinggi nilai-nilai agama, lawan dari masyarakat etatis (totaliter), diktator (otoriter), dan elitis, atau masyarakat yang primordial.

Praktik masyarakat Islam yang bisa dijadikan rujukan civil society juga terdapat dalam sejarah Islam. Pada masa Nabi Muhammad, praktik ini bisa dilihat dalam peristiwa perang Uhud (3 H). Awalnya, untuk menghalau serangan kedua dari kaum Qurays yang berkekuatan 3.700 orang, disepakati oleh kaum Muslimin untuk bertahan di kota Madinah. Namun kemudian muncul pendapat, karena didorong oleh semangat jihad, untuk keluar dari kota Madinah. Mengingat pendapat terakhir ini menjadi mayoritas, dengan kesepakatan bukit Uhud sebagai tempat untuk menghadapi kekuatan ofensif Mekah kali ini, Nabi kemudian mengikuti pendapat mayoritas sahabat. Meskipun akibatnya, Nabi beserta pasukannya mengalami kekalahan

---

<sup>22</sup> Muhammad Zulifan. Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 190-199

terutama sebab tidakdisiplinnya pasukan pemanah untuk tetap menjaga bukit Uhud (Syadzali, 1993).

Pasca Nabi Muhammad, Abu Bakar (berkuasa 632-634 M) dalam pidato baiat-nya menyampaikan poin primus inter pares (yang utama dari yang sama) serta permintaannya untuk dikritik, sebuah pengakuannya atas civil society. Ia berkata: “Wahai manusia, aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian, sedangkan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka, bila aku berbuat baik, bantulah aku, dan bila kau berbuat buruk, luruskanlah aku....” (al-Maududi:1996).

Khalifah kedua, Umar bin Khattab (berkuasa 634-644 M), saat pidato pelantikannya juga meminta pada kaum Muslimin agar membetulkan setiap penyimpangan yang mungkin mereka lihat dalam dirinya. Tiba-tiba seseorang berdiri menanggapi pidatonya tersebut: “Jika kami melihat penyimpangan pada dirimu, kami akan membetulkannya dengan pedang kami.” Umar pun kemudian bersyukur kepada Allah karena ada yang bersedia memperbaikinya demi kebenaran.

Peristiwa lain yang menunjukkan bahwa secara esensi civil society adalah hal yang biasa bagi praktik kepemimpinan Islam adalah pidato umum Umar yang dibantah oleh seorang wanita. Umar mengungkapkan agar tidak berlebih-lebihan dalam memberikan jumlah mahar dalam perkawinan. Namun tiba-tiba seorang perempuan bernama Fatimah binti Qays, tidak setuju. Dia mengutip QS. An-Nisa: 20 yang mendukung argumennya.

Umar pun menyadari kesalahannya seraya berkata: “Perempuan ini benar dan Umar salah” (Kamali, 1996: 77).

Pada masa pemerintahan khalifah Usman (644-655 M), terjadi demo dari sekitar 2000 orang yang datang dari Irak dan Mesir. Mereka masuk kota Madinah dan mengepung rumah Usman dengan tuntutan agar ia mundur dari jabatan Khalifah. Menanggapi tuntutan mereka, Usman menyatakan bahwa ia siap dan ingin memecahkan setiap keluhan yang

benar, tetapi tidak akan memecat dirinya sendiri. Para pendemo ini membuat kerusuhan selama 40 hari hingga tak terkendali. Mereka lalu menyerbu rumah Usman dan membunuhnya secara zalim. Jasad Usman ditinggalkan selama tiga hari tanpa dikuburkan (Al-Maududi, 1996).

Sejak Dinasti Umayyah berdiri (661- 750 M), terjadi penurunan drastis praktik civil society dalam Islam, meski bukan berarti tidak ada sama sekali. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705), berdiri lembaga wilayah al-mazhalim (Nasution, 2003). Lembaga ini berfungsi mengawasi penguasa atau pejabat publik untuk melindungi hak-hak masyarakat. Yang menarik, wilayah al-mazhalim dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Kekuasaan lembaga ini antara lain; (1) memeriksa sikap para pejabat dan keluarganya; (2) memeriksa para pejabat dalam pungutan dana; (3) memeriksa para pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan keuangan negara; (4) memeriksa pengelolaan dan penyaluran harta wakaf; dan (5) mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil oleh aparat negara. Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), kedudukan lembaga ini semakin menguat. Ia mengembalikan seluruh harta rakyat yang diambil oleh para penguasa sebelumnya. Fungsi lembaga ini terus berlanjut hingga masa pemerintahan dinasti Abbasiyah (750- 1258 M) terutama pada masa al-Mahdi (775- 785 M), Harun ar-Rasyid (785-809), dan al- Makmun (813-833 M) bahkan sampai berakhirnya Dinasti Turki Usmani (1300- 1920).

Karenanya, secara esensi civil society yang meniscayakan perlawanan oleh masyarakat terhadap penyelewengan penguasa sejalan dengan praktik sejarah politik Islam masa dinasti pasca khulafa rasyidin sekalipun. Masyarakat muslim pada waktu itu dimungkinkan untuk kritis dan melawan kesewenang-wenangan penguasa bahkan menghukumnya.

Dewasa ini, dalam praktik politik kontemporer di negara-negara muslim, secara umum civil society mereka bermasalah. Para penguasa di negara-negara Arab misalnya, mereka memperoleh kekuasaan dengan cara pewarisan atau cara kedua dengan kudeta. Di negara-negara neo-Islam, kekuasaan sulit dikontrol dan di negara-negara muslim kaya minyak rakyat menjadi tidak memiliki daya tawar. Meski ada juga beberapa negara yang semi demokratik bahkan ada yang memiliki civil society yang prospektif seperti Mesir dan Iran. Dan tentu yang paling maju civil society-nya adalah Indonesia pasca reformasi 1998.

Dalam khazanah pemikiran Islam klasik dan pertengahan, civil society bisa disimpulkan sejalan. Sejalan dengan konsep Ibn Hazm yang mengharuskan penguasa lalim diturunkan, konsep amar ma'ruf mahyi munkar (check and balances), amanah (akuntabilitas) serta kecaman Islam pada masyarakat muslim yang membebek pada kekuasaan. Meski tidak persis sama dan tidak seluruh periodisasi sejarah, paling tidak ada beberapa praktik politik yang bisa dijadikan akar untuk dijadikan contoh civil society dalam dunia Islam. Misalnya sikap para khalifah yang tidak anti kritik, praktek people power pada masa Utsman bin Affan, praktik wilayah madzalim, adanya kepemimpinan ulama selain umara (penguasa), serta adanya realitas kelompok oposisi dalam sejarah.

### **3. Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Pemikiran Politik Islam**

Terdapat perbedaan di kalangan pemikir politik Islam menyikapi konsep Demokrasi dalam wacana partai politik dan negara Islam. Kalangan yang menerima demokrasi berpandangan bahwa hal itu bukan sebagai problem yang harus dipermasalahkan. Dr. Yusuf Qaradhawi (1997) berpendapat bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena Islam dan demokrasi sama-sama menolak diktatorisme. Huwaidi (1996) menyatakan, dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan

prinsipamanah, musawah, 'adalah, syuro, ijma', dan baiat. Prinsip demokrasi dalam al-Quran begitu kuat. Yang diperlukan adalah reformulasi dan reinterpretasi.

Persoalan mendasar dalam melihat hubungan antara Islam dan demokrasi adalah keyakinan bahwa tuhan yang berkuasa mutlak (QS. Ali Imran: 26), meski menurut John L. Esposito (1996), penolakan pada demokrasi tersebut lebih karena faktor Barat kolonial yang sekuler, bukan penolakan pada demokrasi secara keseluruhan. Meski sebenarnya dalam diri manusia terdapat kekuasaan temporal dari Tuhan seperti ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30) dan ayat-ayat free will (al-Kahfi: 29 dan ar-Ra'd: 11).

Benar bahwa al-Quran memuat segala hal, namun hal itu hanya aspek etik saja, mengingat al-Quran dalam aspek-aspek sosial hanya membicarakan prinsip-prinsipnya, yakni 'adl (keadilan), syura (musyawarah), musawah (persamaan). Bahkan untuk keadilan, Ibn Taimiyah berkata: "Allah mendukung kekuasaan yang adil meskipun kafir, dan tidak mendukung kekuasaan yang dzalim meskipun Islam". Kebebasan mengkritik juga dijamin dalam Islam misalnya prinsip amar ma'ruf nahyi munkar (QS. Ali Imran: 104). Dalam hadits riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran pada penguasa yang zalim. Disamping itu terdapat jaminan kebebasan berpendapat (QS. As-Syura: 38, Annisa: 59 dan 83; kebebasan berserikat dalam al-Maidah ayat 2, al-Mujadilah: 22 dan kebebasan beragama dalam QS. al-Baqarah ayat 256 dan Yunus ayat 99 (Pulungan, 1994).

Argumen yang menunjukkan kesesuaian Islam dan demokrasi adalah penolakan Islam terhadap kediktatoran Namrudz dan Firaun (QS.al-Baqarah: 258 dan ad-Dukhan: 31); pemilu sebagai kesaksian rakyat (al-Baqarah 282-283), pengecaman terhadap rakyat yang hanya membebek saja (QS. Al-Qashash: 8, 24), negara Islam menjunjung tinggi

toleransi dan pluralitas sebagai sunnatullah (Qs. Al-Baqarah 256, Huud: 118 Yunus: 99).

Argument lain bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam adalah legislasi tidak berarti penentangan terhadap hukum Tuhan karena legislasi di parlemen dalam persoalan yang belum jelas aturannya dalam syariah; multi partai dalam sistem demokrasi merupakan kelembagaan yang akan menghindari kedzaliman, dan yang dimaksud perbedaan dalam hal ini adalah dalam arti jenis dan spesifikasi, bukan perselisihan. Adapun larangan meminta kekuasaan seperti disebut dalam hadits adalah dalam konteks ambisius dan rakus. Pencalonan sebagai bagian dari system demokrasi dibolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dan Sulaiman (Kamil, 2002).

Islam mengenal system penerimaan rakyat yang disebut baiat. Kata Nabi, "ada tiga orang yang shalatnya tidak terangkat orang yang mengimami shalat suatu kaum, sedang mereka membencinya".<sup>23</sup>

Berdasar hadits ini, salah satu ukuran demokrasi adalah pada tingkat aspiratifnya. Suatu Negara dikatakan demokrasi sejauh ia mencerminkan aspirasi rakyatnya, termasuk di dalamnya tidak bertentangan dengan sistem kepercayaan (agama) yang dianutnya sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat dengan konsep WASP (White, Anglo Saxon, and Protestan).

Demokrasi ditolak oleh elit di negara muslim karena efektivitas demokrasi terhadap keutuhan bangsa. Demokrasi dianggap melahirkan kekacauan sosial, clean governance yang tidak kunjung tiba sebab maraknya praktik politik uang dan koronisme akibat balas budi terhadap mereka yang berjasa dalam pemilihan presiden atau pilkada langsung. Hal utama penolakan tersebut disebabkan karena demokrasi tidak membawa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi (Kamil, 2013).

---

<sup>23</sup> HR. Ibnu Majah I/311 No. 971

Alasan kedua penolakan elit muslim terhadap demokrasi adalah karena persoalan teologis. Kelompok ini memandang bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang haram dalam Islam dan patut diwaspadai. Mereka diantaranya adalah Sayyid Qutb dari Mesir, Thabathabai dari Iran, Ali Benhadj dari Al- Jazair dan Abdul Qadim Zallum, pendiri Hizbut Tahrir.

Gamal Abdun Nasr pada tahun 1966, sangat keras menentang setiap gagasan kedaulatan rakyat. Bagi Sayyid Qutb, demokrasi merupakan pelanggaran bagi kekuasaan Tuhan. Sedang seseorang yang mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Sayyid Qutb menekankan bahwa syariat sebagai sistem hukum sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya (ibid.).

Thabathabai, seorang mufasir dan filsuf Iran terkemuka berpendapat bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa disatukan karena prinsip mayoritasnya. Menurutnya, setiap agama besar dalam kelahirannya senantiasa bertentangan dengan pendapat mayoritas. Sedang manusia sering tidak menyukai apa yang tidak adil dan benar. Dengan mengutip al-Quran surat al-Mu'minin ayat 70-71, ia berkesimpulan bahwa salahlah mereka yang menganggap tuntutan mayoritas selalu adil dan mengikat.

Senada dengan Thabathabai, Abdul Qadir Zallum berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem kufur non Islam (ad- dimuqratiyah nizham kufr) yang bertentangan dengan Islam. Ia berargumen bahwa demokrasi adalah produk akal manusia, bukan Tuhan, bagian dari akidah sekularisme. Dalam Islam kedaulatan ada di tangan syariat, tidak di tangan rakyat. Dalam Islam, prinsip mayoritas tidak memiliki signifikansi karena yang signifikan adalah teks-teks syariat dan kebebasan seperti kebebasan beragama dalam Islam tidak ada (ibid.)

Kelompok ketiga berusaha menyatukan pendapat dua kubu di atas. Kelompok ini dipelopori oleh Abul 'Ala al-Maududi. Doktrin kedaulatan Tuhan dalam bentuk syariat (hukum Tuhan) yang membatasi kedaulatan rakyat. Bagi Al-Maududi (1990: 160), ada kemiripan antara demokrasi dan Islam. Bedanya, dalam sistem politik di Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhilafahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum ilahi. Suatu negara yang didirikan atas dasar kedaulatan de jure Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengannya (Al-Quran dan hadits) sekalipun rakyat menuntutnya. Misalnya kasus UU yang membolehkan minuman keras di negara sekuler, tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Namun, tidak berarti sistem Pemerintahan Islam mengabaikan potensi rasional manusia untuk masalah administrasi dan persoalan yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam syariat. Hal semacam itu dapat ditetapkan berdasar konsensus di antara kaum Muslimin yang memiliki kualifikasi. Sistem Islam usulan al-Maududi ini mengambil jalan moderat. Ia menyebut sistem ini dengan istilah "Teo-Demokrasi" yakni sistem pemerintahan demokrasi ilahi, suatu sistem kedaulatan rakyat yang dibatasi kedaulatan Tuhan lewat syariat-Nya.

#### **4. Prospek Partai Politik Islam di Pemilu dan Pilkada**

Umat Islam di Indonesia secara mayoritas menerima demokrasi. Hal ini setidaknya terlihat dari antusiasme kaum Muslimin Indonesia sejak Pemilu 1955. Manifestasi dari unsur politik Islam di Indonesia adalah munculnya Partai Politik Islam. Deliar Noer (1983) menyatakan bahwa partai politik merupakan himpunan orang-orang yang se-ideologi atau tempat penyaringan dan pembulatan, serta tempat berkumpulnya orang-orang yang se-ide, cita-cita dan kepentingan. Lebih lanjut, partai politik Islam bisa diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang Islam yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang meletakkan Islam

sebagai dasar dan garis perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi, maupun ide dan cita-cita umat Islam dalam suatu negara. Oleh banyak kalangan, berdirinya Partai Politik Islam sering diidentikkan dengan keinginan formalisasi Islam di Indonesia

Pada Pemilu 1955, suara umat Islam termanifestasikan pada partai-partai politik Islam waktu itu yakni partai Masyumi, partai NU, PSII, PERTI, dan PPTI yang meraih total 43,5 persen suara. Sementara untuk Pemilu 1999 yang dianggap sebagai pemilu demokratis kedua setelah Pemilu 1955, partai politik Islam yang terdiri dari PPP, PBB, Partai Keadilan, PNU, PKU, PSII dan PPpenuruna suara partai-partai politik Islam sebesar 25,32 persen. Bila suara PKB dan PAN sebagai partai berbasis massa Islam sebesar 18,8 persen ditambahkan ke dalam deretan partai Islam tersebut, maka perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 1999 menjadi 37,19 persen. Artinya, ada penurunan sebesar 6,31 persen dibanding hasil pemilu 1955 (Umar, 2004: 112).

Pada pemilu 2014 kemarin, partai Islam mendapat raihan 31,41 persen suara nasional dengan rincian PKB 9,04 persen, PKS 6,79 persen, PAN 7,59 persen, PPP 6,53 persen serta PBB sebesar 1,46 persen.<sup>24</sup> Raihan ini tentu masih lebih kecil dari suara ketika partai-partai Islam tersebut pertama kali muncul pada Pemilu 1999 lalu. Penurunan suara partai-partai Islam tersebut menandakan meski penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, hal itu tidak berkorelasi positif pada tingkat elektabilitas partai-partai Islam.

Lebih lanjut, dalam Pilkada serentak Desember 2015 silam yang dilaksanakan di 8 provinsi, 222 kabupaten, dan 34 kota, berdasarkan kajian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) terhadap 208 daerah, PDIP mendapatkan kemenangan terbanyak, yaitu 105 daerah, disusul oleh Gerindra sebanyak 87 daerah, NasDem 85 daerah, PAN 80

---

<sup>24</sup> Lihat: [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014\\_Perolehan\\_suara\\_parpol.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_Perolehan_suara_parpol.pdf), diakses kembali pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.25 WIB.

daerah, PKS 75 daerah, Demokrat 68 daerah, PKB 65 daerah, Hanura 63 daerah, Golkar 49 daerah, PBB 32 daerah, hanya meraup suara 18,8 persen<sup>25</sup>. Dibandingkan Pemilu 1955, maka terjadi financial, lifestyle, dan fashion, nyatanya belum mampu menjadi nilai positif bagi peningkatan perolehan suara partai-partai Islam. Masyarakat Indonesia pada umumnya lebih melihat faktor lain dalam menentukan pilihan politik seperti track record calon dan partai yang bertarung.

Saat ini, partai politik Islam dapat menempatkan kadernya sebagai pemimpin sejumlah daerah strategis melalui momen Pilkada. Di Jawa Barat misalnya, PKS selama dua periode berturut-turut dapat mendudukkan kadernya sebagai orang nomor satu di provinsi tersebut, namun hal itu pada kenyataannya tidak berkorelasi positif bagi peningkatan suara partai. Yang terjadi suara partai justru makin tergerus. Jika di tahun 2004 PKS berhasil meraih 14 kursi DPRD Jawa Barat, maka jumlah tersebut menurun menjadi 13 kursi di tahun 2009 dan bersisa hanya 12 kursi di tahun 2014.<sup>26</sup>

Dalam level negara, beberapa Partai Politik Islam berusaha memasukkan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945, termasuk melalui penerapan Perda-perda Syariah di beberapa daerah. Namun wacana formalisasi syariat tersebut justru tidak mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat Indonesia lebih memilih “jualan”

---

<sup>25</sup> Lihat: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/14/nzb8bk361-ini-parpol-yang-calonnya-merajai-hasil-pilkada>, diakses kembali pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.27 WIB.

<sup>26</sup> Lihat: [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014\\_Penetapan\\_Hasil\\_Pileg.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_Penetapan_Hasil_Pileg.pdf), diakses kembali pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.26 WIB.

partai yang lebih menyentuh kebutuhan hidup rakyat yang makin tak terkejar.

Lebih lanjut, adanya perpecahan di tubuh partai Islam menjadikan laju partai Islam terhambat. Sebagaimana PPP yang kini terpecah antara kubu Djan Fariz dan Romahurmuziy, PKB antara kubu Gus Dur dan Muhammadiyah, PAN yang dulu sempat terpecah hingga melahirkan PMB. Begitu pula adanya kubu “keadilan” dan “kesejahteraan” di PKS (Muhtadi, 2012). Penyebab lain menurunnya suara partai Islam adalah masalah korupsi yang saat ini membelit banyak tokoh partai Islam. Hingga kini, tidak ada partai Islam yang kadernya tidak tersandung masalah korupsi. Dengan mendasarkan partai pada sesuatu yang sakral yakni nilai-nilai agama, efek dari kasus korupsi partai Islam akan lebih dahsyat dibanding korupsi yang dilakukan partai-partai nasionalis. Karena kasus korupsi, Partai Islam dianggap sama saja bahkan lebih buruk dari partai lain yang melakukan korupsi.

Alih-alih dapat membedakan diri dengan partai lain, partai Islam justru terjebak dalam perilaku transaksional dalam demokrasi elektoral berbiaya tinggi yang ujungnya memaksa seluruh kader mencari pembiayaan sebanyak-banyaknya demi membiayai biaya kampanye dan operasional partai. Partai Islam acapkali tidak segan untuk masuk ke wilayah abu-abu yang beresiko hingga akhirnya kader mereka terciduk KPK. Namun demikian, perlu dicatat bahwa eksistensi partai Islam di Indonesia merupakan salah satu sarana moderasi kaum Islamis yang dapat mereduksi cita-cita negara Islam bahkan lebih jauh dapat mereduksi faham radikal. Melalui partai Islamlah semangat bernegara kaum Islamis bisa tersalurkan secara proporsional dan bertanggung jawab. Cita-cita penerapan syariat dapat ditempuh oleh kaum Muslimin tidak harus melalui jalan revolusi ataupun kudeta, tapi melalui objektivikasi, rasionalisasi dan marketisasi substansi syariah melalui jalur demokrasi sebagaimana disinggung Dawam Rahardjo.

#### D. Kesimpulan

Para pemikir politik Islam pada umumnya menekankan pentingnya nilai agama Islam dalam menjiwai sistem pemerintahan. Mereka tidak memisahkan agama dari negara sebagaimana pandangan pemikir Barat (sekuler). Al-Farabi, Al-Mawardi dan pemikir politik Islam klasik dan pertengahan lainnya menekankan bahwa kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Negara sebagai bentuk kerjasama sosial menjadi suatu keharusan, dengan menjadikan wahyu sebagai pedoman agar manusia mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Mengingat pentingnya politik dan sistem pemerintahan dalam Islam, para pemikir Islam menekankan melalui penyebutan kriteria bagi seorang kepala negara. Aspek keadilan dan kecerdasan menjadi parameter utama.

Civil society sebagai manifestasi masyarakat madani nyatanya telah ada dalam sejarah Islam seperti konsep amar ma'ruf mahyi munkar (check and balances), amanah (akuntabilitas). Meski hal tersebut tidak persis sama dan tidak seluruh periodisasi sejarah, seperti sikap para khalifah yang tidak anti kritik, praktek people power pada masa Utsman bin Affan, praktik wilayah madzolim, adanya kepemimpinan ulama selain umara (penguasa), serta adanya realitas kelompok oposisi dalam sejarah. Mengenai bentuk pemerintahan, pada umumnya para pemikir politik Islam tidak memberikan preferensi tertentu apakah sebuah negara harus berbentuk khilafah, republik atau kerajaan. Asalkan nilai-nilai esensi ajaran Islam dapat direalisasikan, apapun bentuk pemerintahan dapat diterima secara syariah. Namun tetap adanya institusi negara yang pro Islam menjadi penekanan mereka. Sebagaimana disinggung Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa nilai-nilai dan tata sosial Islam tidak akan terealisasi secara ideal tanpa negara.

Bicara demokrasi, para pemikir Islam berbeda pendapat dalam menyikapinya. Bagi yang menerima, substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena Islam dan demokrasi sama-sama menolak diktatorisme sebagaimana disinggung pemikir Islam

Dr. Yusuf Qaradhawi. Sedang mereka yang menolak demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam sebenarnya lebih karena persoalan teologis. Kelompok ini memandang bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang haram dalam Islam dan patut diwaspadai.

Gagasan untuk menggabungkan konsep Islam dan demokrasi dipaparkan Al- Maududi dalam teori Teo-Demokrasi sebagai sistem alternatif pemerintahan kaum muslimin yang mengakomodasi doktrin kedaulatan Tuhan (agama) dan doktrin kedaulatan rakyat sekaligus. Umat Islam dapat menyalurkan cita-cita penerapan syariat di Indonesia melalui objektifikasi, rasionalisasi dan marketisasi substansi syariah dalam bingkai demokrasi.

Terjadi penurunan raihan suara Partai Islam sejak pemilu 1955. Penurunan suara partai-partai Islam mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim, namun fakta itu tidak berkorelasi positif terhadap tingkat keterpilihan partai- partai Islam. Menurunnya suara partai Islam disebabkan berbagai problem mendasar yang membutuhkan penanganan khusus dalam menjawab tantangan zaman. Untuk menjawab tantangan-tantangan itu, tentu dibutuhkan jalan baru dan langkah-langkah strategis yang perlu segera diagendakan dan dijalankan oleh partai-partai Islam.

# BAB 12

## PERTEMUAN KE DUA BELAS LARANGAN PRAKTIK POLITIK DINASTI

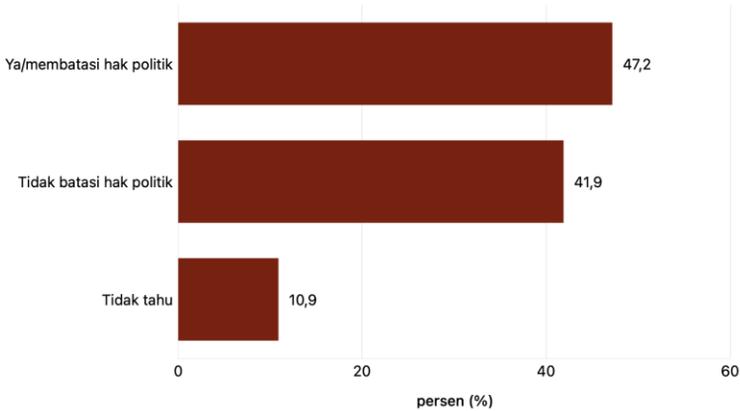
### A. Persepsi Responden Jika Ada Larangan Terkait Politik Dinasti di Indonesia

Pandangan publik terbelah soal diskursus larangan politik dinasti di Indonesia. Ini selaras dengan temuan survei Litbang Kompas bertajuk Gibran dan Polemik Dinasti Politik edisi Oktober 2023<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad>, Larangan Praktik Politik Dinasti, Bagaimana Publik Memandangnya, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.55 WIB

### Persepsi Responden Jika Ada Larangan Terkait Politik Dinasti di Indonesia (Oktober 2023)



**Sumber:**  
Litbang Kompas

**Informasi Lain:**

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 47,2% responden merasa bahwa larangan politik dinasti di Tanah Air akan membatasi hak politik.

Sementara itu, ada 41,9% responden yang menganggap bahwa kebijakan itu tidak membatasi hak politik. Adapun 10,9% responden lainnya menjawab tidak tahu.

"Sikap terbelahnya publik ini tidak lepas dari penilaian yang melihat sama pentingnya antara perlunya membatasi politik dinasti dan perlunya menjamin hak politik bagi siapa pun untuk berpartisipasi dalam proses kompetisi politik," tulis Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dalam laporannya, Senin (23/10/2023).

Litbang Kompas juga menangkap pendapat responden terkait aturan untuk membatasi lahirnya politik dinasti. Hasilnya, mayoritas atau 63,7% responden setuju dengan adanya aturan yang dapat membatasi praktik politik dinasti di Tanah Air.

Namun terdapat 23,2% responden yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan 13,1% lainnya menjawab tidak tahu.

Sebelumnya, aturan terkait larangan 'politik dinasti' tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal ini melarang calon kepala daerah untuk memiliki hubungan kerabat dengan petahana.

Calon kepala daerah baru boleh mengajukan diri setelah jeda satu periode atau sesudah petahana tidak menjabat. Hal tersebut diharapkan agar sirkulasi kekuasaan lebih terbuka dan tidak didominasi oleh kekuatan politik dari keluarga tertentu.

Namun, aturan tersebut hanya berlaku di pilkada dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai membatasi hal politik warga.

Survei Litbang Kompas ini melibatkan 512 responden dari 34 provinsi di Indonesia, sampel dipilih secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Koleksi data dilakukan pada 16-18 Oktober 2023 menggunakan metode wawancara telepon. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 4,35% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, dan tingkat kepercayaan 95%.

## **B. Isu Dinasti Politik Mencuat Jelang Pemilu**

### **1. Tingkat Kesetujuan Responden terhadap Dinasti Politik di Indonesia**

Isu dinasti politik kembali ramai diperbincangkan menjelang gelaran Pemilu 2024.

Isu tersebut mencuat salah satunya karena Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, digadang-gadang menjadi kandidat cawapres Prabowo Subianto.

Jalan Gibran menjadi cawapres juga dimuluskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah memutuskan penambahan klausul "berpengalaman menjadi kepala daerah" sebagai syarat capres dan cawapres dalam pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu<sup>28</sup>.

## **2. Pendapat masyarakat Indonesia mengenai praktik dinasti politik di Indonesia**

Menurut hasil survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC), 55,3% responden tidak setuju apabila terjadi praktik dinasti politik. Rinciannya, responden yang mengatakan tidak setuju sebanyak 33,7%, dan sangat tidak setuju 21,6%.

Di sisi lain, ada 44,6% responden yang mengatakan setuju dengan dinasti politik. Responden yang menilai setuju 26,6% dan sangat setuju 18%.

Adapun Jokowi tak mau berkomentar soal naiknya nama Gibran Rakabuming Raka dalam bursa cawapres. "Saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres," ujar Jokowi dilansir dari Katadata.co.id, Selasa (17/10/2023).

Jokowi menyebut, penentuan cawapres dan cawapres merupakan kewenangan dari partai politik dan gabungan partai politik. Hal itu telah ditetapkan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Jadi silakan tanya kepada partai politik, itu wilayah parpol," kata Jokowi.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan putusan MK soal syarat bakal capres dan cawapres membuka kemungkinan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

---

<sup>28</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Isu Dinasti Politik Mencuat Jelang Pemilu, Bagaimana Tanggapan Warga, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.57 WIB

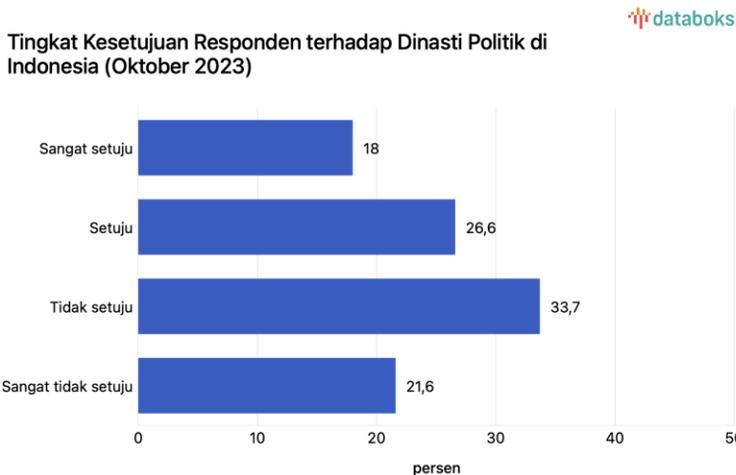
"Tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung dalam pilkada," kata Dasco, Senin (16/10/2023).

Adapun survei ini dilakukan terhadap 661 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan proporsi responden laki-laki 51,7% dan perempuan 48,3%.

Lebih dari separuh responden berada di Pulau Jawa selain Jakarta (66,9%), kemudian di Jakarta (13,5%), dan Sumatra (12,3%). Proporsi responden yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua di rentang 0,2%-2,6%.

Sebagian besar responden berusia antara 25-34 tahun (37,8%), diikuti kelompok 35-44 tahun (27,5%) dan kelompok 45-54 tahun (16,8%).

Survei dilakukan pada 6-9 Oktober 2023 menggunakan metode computer-assisted web interviewing (CAWI), dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 3,81% dan tingkat kepercayaan 95%.



**Sumber:**  
Kurious  
Katadata Insight Center (KIC)

**Informasi Lain:**

### 3. Ini Daftar Tokoh Terkait Politik Dinasti menurut Warganet

Nama-Nama yang Dikaitkan dengan Politik Dinasti dalam Perbincangan Warganet di Media Sosial (Januari 2023)

"Politik dinasti" dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang yang memiliki hubungan kerabat atau keluarga.

Menurut Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo, politik dinasti memiliki berbagai wujud, misalnya penggunaan lembaga negara untuk mendukung kepentingan kerabat penguasa.

"(Politik dinasti) bisa seperti mobilisasi birokrasi oleh kerabat yang berkuasa, untuk mendukung kerabatnya yang lain pada pemilihan kepala daerah (Ratna Dewi Pettalolo, Bawaslu, 27/8/2020).

Adapun menurut riset Continuum, tokoh yang paling sering dikaitkan dengan politik dinasti saat ini adalah Presiden Jokowi beserta kedua anaknya, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka.<sup>29</sup>

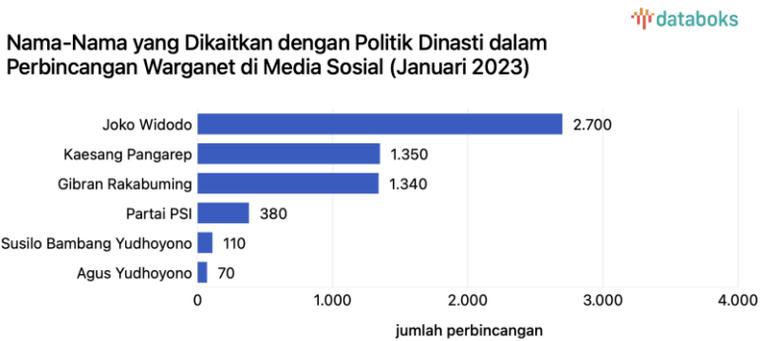
Dalam laporan Dinamika Politik Menuju 2024 yang dirilis Minggu (5/2/2023) Continuum mengetahui hal ini dari penelusuran perbincangan di media sosial selama periode 24-30 Januari 2023. Hasilnya, mereka menemukan ada 1.381 perbincangan terkait isu politik dinasti, dan mayoritasnya mengaitkan hal tersebut "Jokowi, Gibran, Kaesang jadi yang paling sering dikaitkan, karena isu Kaesang ikut jejak Jokowi dan Gibran untuk terjun ke politik".

Menurut Didik J. Rachbini, pendiri Continuum Big Data, politik dinasti juga ada di negara maju, tapi terkontrol dengan sistem politik check and balance yang efektif.

---

<sup>29</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/adi-ahdiat>, Ini Daftar Tokoh Terkait Politik Dinasti menurut Warganet, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 22.00 WIB

Sementara di Indonesia, ia menilai politik dinasti telah bercampur dengan oligarki.



**Sumber:**  
Continuum

**Informasi Lain:**

Menurut Didik J. Rachbini, dikutip dari resume yang diterima redaksi Katadata, Minggu (5/2/2023). "Politik dinasti saat ini telah terjadi di perdesaan bercampur dengan oligarki lokal, sehingga rakyat kesulitan untuk mendapatkan praktik demokrasi yang sehat,".

"Kekuasaan akan diwariskan turun temurun oleh keluarganya sendiri, dan bercampur dengan kepentingan bisnis, maka akses terhadap sumber daya dan lain-lain menjadi patut diawasi".

# BAB 13

## PERTEMUAN KE TIGA BELAS PULAU JAWA BATTLEGROUNDS, ARENA PERSAINGAN POLITIK TERBESAR PEMILIHAN UMUM 2024

### A. Jawa Jadi Battleground Pemilihan Umum 2024

#### 1. Jawa Menjadi Medan Pertempuran Paling Sengit pada Pemilu 2024

Pulau Jawa menjadi medan pertempuran paling sengit antara kandidat calon presiden (capres) dan partai politik<sup>30</sup>. Mereka semua mengharapkan suara optimal di wilayah padat penduduk ini. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa mencapai 154,28 juta atau sekitar 56 persen dari total populasi tahun 2022 sebanyak 275,7 juta. Sementara dari jumlah populasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan sebanyak 204,8 juta daftar pemilih tetap (DPT), dengan jumlah 56,3 persen atau 115,37 adalah pemilih yang tinggal di Pulau Jawa. Jika melihat riwayat Pemilu 2019 lalu, Pulau Jawa adalah battleground yang cukup sengit antara pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20231127/15/1718336/jawa-jadi-battleground-para-capres-di-kampanye-pilpres-2024>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 13.01 WIB.

<sup>31</sup> Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.20-26

Prabowo-Sandi menguasai Pulau Jawa bagian Barat (Banten dan Jawa Barat), kecuali DKI Jakarta. DKI Jakarta dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Amin. Sedangkan Jokowi Amin berhasil menang mutlak di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Kemenangan Jokowi-Amin di tiga provinsi mencapai lebih dari 60 persen. Di Jawa Tengah, Jokowi-Amin bahkan berhasil menang dengan perolehan suara sebanyak 77,26 persen. Raihan suara Jokowi di Jateng, Jatim, dan DIY menjadi kunci kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

## BAKAL MAJU PILPRES 2024: PERJALANAN PENCALONAN DAN SURVEI ELEKTABILITAS PRABOWO

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut-sebut bakal maju dalam pertarungan pemilihan presiden atau pilpres 2024. Sebelumnya Prabowo sudah tiga kali gagal dalam pemilihan presiden.

### Perjalanan pencalonan Prabowo dalam pemilu:



#### Pilpres 2009

Prabowo Subianto maju dari Partai Gerindra menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Saat itu, ia kalah dari petahana, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono.



#### Pilpres 2014

Prabowo Subianto tak lagi tampil sebagai cawapres, melainkan maju sebagai seorang calon presiden yang didampingi oleh besan SBY yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa. Ia kalah dengan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla.



#### Pilpres 2019

Setelah kalah dua kali, Prabowo tak gentar. Berpasangan dengan Sandiaga Uno yang sebelumnya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia kembali mencalonkan diri dan berhadapan dengan Jokowi - Ma'ruf Amin. Namun kembali kalah.

### Survey elektabilitas Prabowo dan calon lawannya:



## PARTAI PENDUKUNG JOKOWI MENANG DI 15 PROVINSI DARI 17 PROVINSI YANG IKUT PILGUB SERENTAK 2018



- Pilgub 2018 yang Dimenangkan Partai Pendukung Jokowi di Pilpres 2019
- Daerah yang tidak mengikuti Pilgub Serentak 2018
- Pilgub 2018 yang Dimenangkan Partai Non-Pendukung Jokowi di Pilpres 2019

### Sumatera Utara

Pasangan Erasam didukung Golkar, Hanura, dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Kalimantan Barat

Pasangan Sutarmidji-Ria Norsan didukung Golkar, PPP, dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Sumatera Selatan

Pasangan Heraman-Mawardi didukung Hanura dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Nusa Tenggara Timur

Pasangan Victor-Josef didukung Golkar, Hanura, dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Lampung

Pasangan Arinal-Nunia didukung Golkar yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Sulawesi Selatan

Pasangan Nurdin A-Sudirman didukung PDIP yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Riau

Pasangan Syamsuar-Edi didukung Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Sulawesi Tenggara

Pasangan Ali Mazi-Lukman didukung Golkar dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Jawa Barat

Pasangan Rindu didukung PPP, Hanura, dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Maluku

Pasangan Murad-Barnabas didukung PDIP, PPP, Hanura, dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Jawa Tengah

Pasangan Ganjar-Yasin didukung Golkar, PDIP, PPP, Hanura, dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Maluku Utara

Pasangan Ahmad Mas-Rifai didukung Golkar dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Jawa Timur

Pasangan Khoffah-Emil didukung Golkar, PPP, dan Hanura yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



### Papua (Masih Menunggu Hasil)

Jika Pasangan Lukas-Klamen yang menang, pasangan ini didukung Golkar, PPP, Hanura, dan Nasdem yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019.



### Bali

Pasangan Wayan Koster-Tjokorda didukung PDIP dan Hanura yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



Jika Pasangan Jhon Wempi Wetipo-Habel Meikias Suwae yang menang, pasangan ini didukung PDIP yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019



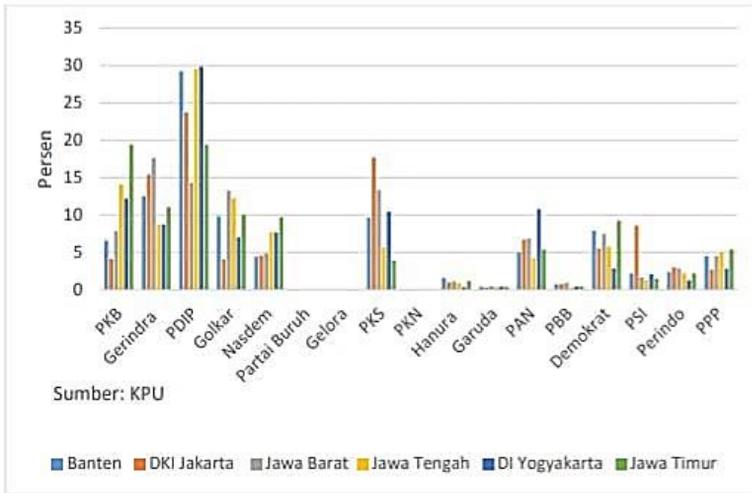
## 2. Riwayat Pertarungan Pilpres 2019

Dengan riwayat pertarungan tersebut, serta jumlah populasi yang mencapai lebih dari 56 persen dari total pemilih, maka sangat wajar jika pulau Jawa lagi-lagi menjadi medan pertempuran pada kandidat. Pengalaman Pilpres 2019 lalu kemudian menjadi benchmark bagi para elite politik untuk menentukan siapa yang akan diusung dan siapa calon pendampingnya. Bibit, bebet, bobot-nya, benar-benar ditimbang betul. Setidaknya sampai September hingga Oktober lalu, belum ada satupun koalisi yang secara definitif mengumumkan paket pasangan capres dan cawapres. Manuver Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang beralih dari Gerindra ke koalisi pengusung Anies Baswedan, mencairkan kebuntuan penentuan koalisi.

Cak Imin bisa dibilang berhasil membelokkan ekspektasi para pengamat politik pada waktu itu. Publik dibuat terkecoh. Cak Imin adalah representasi dari PKB, partai yang lahir dan besar Nahdlatul Ulama (NU). NU maupun PKB mayoritas pemilihnya ada di Jawa Timur. Pada Pemilu 2019 lalu, PKB memperoleh 19,41 persen suara di Jawa Timur. PKB juga menjadi runner up di Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 14,09 persen.

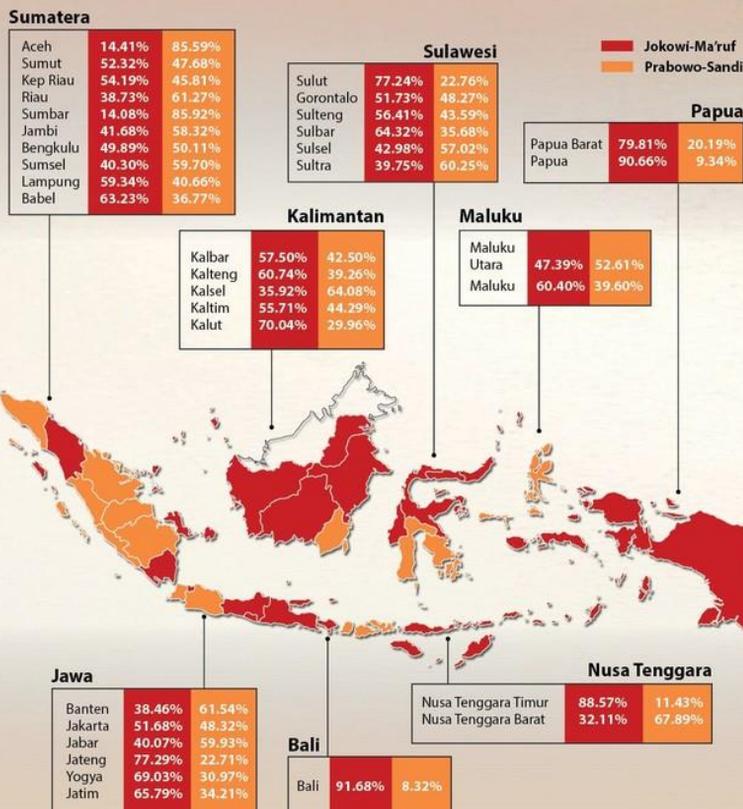
Adapun Anies Baswedan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Indikator Politik maupun Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa, Anies memuncaki elektabilitas di DKI Jakarta dengan angka sebanyak 39,2 dan 36,3 persen. Kalau mengacu 2 survei itu, besar kemungkinan Anies menang di DKI Jakarta.

Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga sama-sama merepresentasikan suara di Pulau Jawa baik secara genealogis maupun sosiologis. Prabowo memiliki modal besar, sebagai capres yang pernah menang di Jawa bagian Barat. Selain itu, partainya yakni Gerindra juga menjadi pemenang di Jawa Barat dengan perolehan suara sebesar 17,65 persen. (Lihat Grafik dibawah ini.).



# PETA KEMENANGAN

..... PILPRES 2019 .....



SUMBER: DATA REKAPITULASI SUARA NASIONAL KPU

NASKAH: TORIQ | INFOGRAFI: ANDHIKA AKBARYANSYAH

Pemilu 2019 Perbesar Di sisi lain, Prabowo juga ditopang oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi sendiri menjadi presiden setelah menang mutlak di Jateng, Jatim dan DIY. Pendukung Jokowi yang nonpartisan baik itu relawan hingga orang yang secara personal memilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu, berpotensi beralih mendukung

Prabowo-Gibran. Hanya saja soal berapa persentasenya, satu-satunya indikator kuantitatif yang bisa digunakan untuk mengukur Gibran putra Jokowi effect bagi Prabowo bisa adalah lembaga survei. Indikator Politik dan Polltracking telah mempublikasikan data dan hasilnya menunjukkan bahwa adanya kenaikan dari sisi elektabilitas untuk Prabowo-Gibran. Versi Indikator Politik, elektabilitas Prabowo-Gibran melejit di angka 40,6 persen pada periode survei 27 Oktober sampai 1 November 2023. Adapun, paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga merepresentasikan suara di Pulau Jawa plus Madura. Madura secara geografis adalah pulau tersendiri, tetapi masuk dalam administrasi Provinsi Jawa Timur. Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah dua periode. Sebelum Gibran maju, dia identik sebagai penerus Jokowi. Pasang surut elektabilitas Ganjar sangat berkaitan dengan kepuasan publik terhadap Joko Widodo. Namun demikian, ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres Prabowo, elektabilitas Ganjar mulai anjlok meski berpasangan dengan Mahfud MD. Suara Ganjar hanya ditopang oleh PDIP yang menjadi partai pemenang pada Pemilu 2019 lalu.

## **B. Tren Jawasentris Pemilihan Umum 2024**

### **1. Identikkan Dengan Tren Pemimpin Jawa**

Tren Jawasentris Bisa Jadi Bergeser Sementara itu, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati lebih melihat dari perspektif kultural terkait dominasi presiden dari suku Jawa ini<sup>32</sup>. Menurutnya, ada anggapan bahwa pemimpin dari Jawa memiliki sopan santun dan tata krama. Artinya bila dalam pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2024 Jawa menang, maka akan menang dan jadi presiden Republik Indonesia 2024<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027091219-617-865967/jawa-masih-jadi-kunci-di-pilpres-2024>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 13.11 WIB.

<sup>33</sup> Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan

Sebenarnya mungkin yang diidentikkan dengan Jawa pemimpin yang punya sopan santun, punya tata krama, punya keadaban yang itu dianggap mulia. Namun, Mada berpendapat ada kemungkinan hal ini bisa bergeser karena perubahan karakter pemilih. Terlebih, pada Pilpres 2024 mendatang ada sekitar 40 persennya yang merupakan pemilih muda atau milenial. Namun, mesti dilihat lagi, apakah para pemilih muda ini memiliki karakteristik yang lebih rasional atau tidak, utamanya dalam melihat identitas atau latar belakang calon, termasuk asal suku.

Apakah mereka memaknai identitas itu dengan lebih rasional atau identitas itu mereka maknai dengan lebih primordial. Sehingga identitas tidak kemudian menjadi pertimbangan seperti taken for granted, tapi pemilih menilai rasional, melihat visi, misi, program.

Lebih lanjut, Mada menyampaikan bahwa politik identitas sangat berpotensi akan berkembang pada Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya soal suku, tetapi juga terkait agama hingga gender.

Politik identitas ini, kata Mada, nantinya juga akan terkait dengan strategi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam menggaet suara para pemilih khususnya di wilayah Jawa.

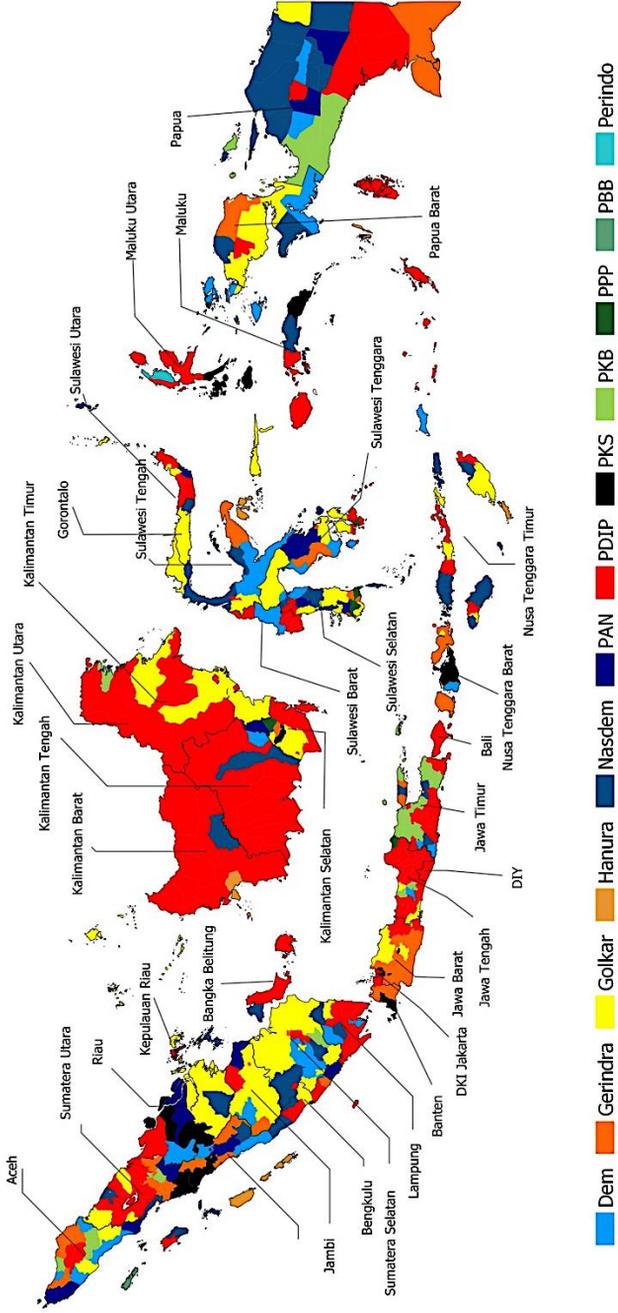
Sejauh mana paslon akan memanfaatkan identitas itu sebagai instrumen mobilisasi, apakah dia akan memanfaatkan identitas itu sebagai komoditas politik untuk dapat suara tanpa ada punya implikasi ke kebijakan. Atau dia juga akan mengadvokasi kebijakan dari identitas, ini nanti terlihat di visi, misi, program para paslon di Pilpres, dan legislative (DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).

---

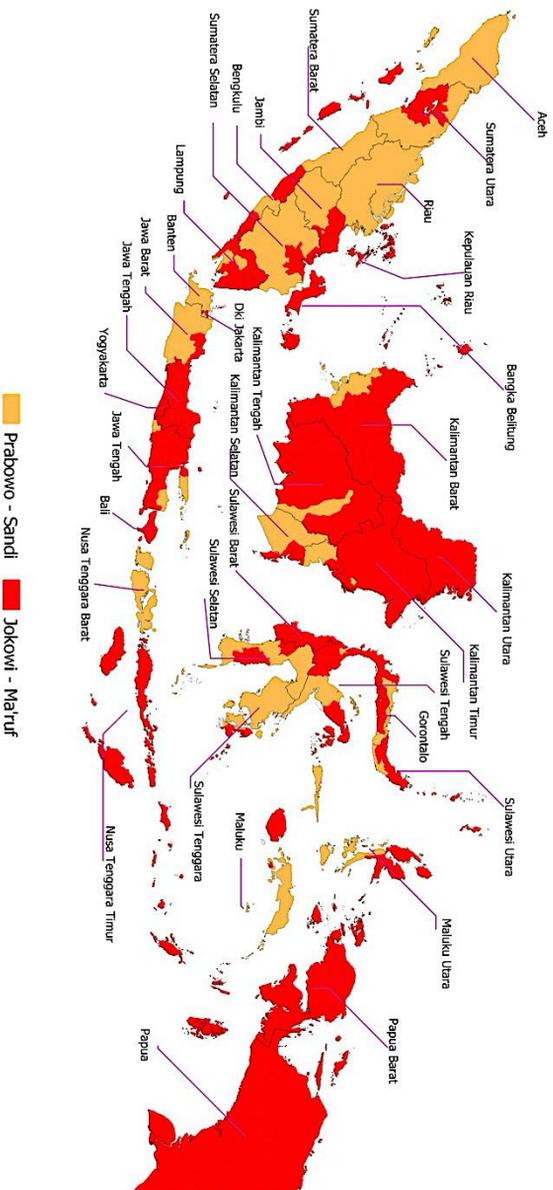
Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.27-48

Untuk memperkuat analisis Tren Jawasentris dan gambar-gambar peta baru koalisi, partai pendukung dan ketetapan nomor Calon Presiden/Wakil Presiden RI Tahun 2024, dapat dilihat dalam peta dan gambar dibawah ini:

# Pemilihan Legislatif RI Tahun 2019



## Pemilihan Presiden RI Tahun 2019



Sumber: <https://kirka.co/pulau-jaawa-kunci-capres-dan-cawapres-jawara-pemilu-2024>.

Agar lebih jelasnya, Partai Pengusung, Nama-nama, profil, Nomor Urut, Visi, Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dapat dilihat dalam infografis dibawah ini:

## Infografis Partai Pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024.



# PETA BARU KOALISI PILPRES 2024

Bergabungnya Golkar dan PAN dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mengubah peta koalisi menuju Pilpres 2024. Mereka bersama Gerindra dan PKB resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pun bubar dan dipastikan gagal membentuk poros sendiri.

## KOALISI PRABOWO SUBIANTO

**46,09  
PERSEN**



GERINDRA  
78 KURSI  
(13,57 PERSEN)



PKB  
58 KURSI  
(10,09 PERSEN)



GOLKAR  
85 KURSI  
(14,78 PERSEN)



PAN  
44 KURSI  
(7,65 PERSEN)



## KOALISI GANJAR PRANOWO

**25,56  
PERSEN**



PDIP  
128 KURSI  
(22,26 PERSEN)



PPP  
19 KURSI  
(3,30 PERSEN)



## KOALISI ANIES BASWEDAN

**28,35  
PERSEN**



NASDEM  
59 KURSI  
(10,26 PERSEN)



DEMOKRAT  
54 KURSI  
(9,39 PERSEN)



PKS  
50 KURSI  
(8,70 PERSEN)



*Presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik mengantongi 20 persen kursi DPR RI dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Ada 575 kursi parlemen pada periode 2019-2024. Artinya, satu pasangan capres-cawapres harus diusung minimal 115 kursi DPR RI. Dari ketiga kandidat terkuat bakal capres, semuanya telah memenuhi ambang batas yang disyaratkan.

FOTO-FOTO: ANTARA, INSTAGRAM, REPUBLIKA | EDITOR: ERIK PURNAMA PUTRA | INFOGRAFIS: ALI IMRON



@republikaonline



@republikaonline



RepublikaOnline

## Infografis nama-nama calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024.

**3 PASANG CAPRES-CAWAPRES SIAP BERTANDING DI PILPRES 2024**

Biodata Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan "bertarung" pada Pilpres 2024 mendatang.

**Muhaimin Iskandar**  
 TTL: Jombang, 24 September 1966  
 Usia: 57 tahun  
 Istri: Rustini Murtadho  
 Orang tua: Muhammad Iskanda (ayah), Muhasonah Iskandar (ibu)  
 Almamater: Universitas Gajah Mada Universitas Indonesia Universitas Airlangga  
 Instagram: @cakimiNOW  
 x: @cakimiNOW  
 Fanpage: A Muhaimin Iskandar

**Anies Baswedan**  
 TTL: Kuningan, 7 Mei 1969  
 Usia: 54 Tahun  
 Istri: Ferry Farhati (m.1996)  
 Orang tua: Rasyid Baswedan (ayah) - Aliyah Rasyid (ibu)  
 Almamater: Universitas Gajah Mada Universitas Maryland Northern Illinois University  
 Instagram: @aniesbaswedan  
 X: @aniesbaswedan  
 Facebook: Anies Baswedan

**Ganjar Pranowo**  
 TTL: Karanganyar, 28 Oktober 1968  
 Usia: 54 tahun  
 Istri: Siti Atikoh Supriyanti  
 Orang tua: Muhammad Zinedine Alam Ganjar (ayah) - Sri Supami (ibu)  
 Almamater: Universitas Gajah Mada Universitas Indonesia  
 Instagram: @ganjar\_pranowo  
 X: @ganjar\_pranowo  
 Fanpage: Ganjar Pranowo

**Mahfud MD**  
 TTL: Sampang, 13 Mei 1957  
 Usia: 66 tahun  
 Istri: Zaizatun Nihajati  
 Orang tua: Mahmodin (ayah), Siti Khadijah (ibu)  
 Almamater: Universitas Gajah Mada Universitas Islam Indonesia  
 Instagram: @mohmahfudmd  
 X: @mohmahfudmd  
 Fanpage: Mahfud MD

**Prabowo Subianto**  
 TTL: Jakarta, 17 Oktober 1951  
 Usia: 72 tahun  
 Istri: Siti Hediati Hariyadi  
 Orang tua: Soemitro Djajhadikoesoemo (ayah), Dora Marie Sigar (ibu)  
 Almamater: AKABRI 1974  
 Instagram: @prabowo  
 X: @prabowo  
 Fanpage: Prabowo Subianto

**Gibran Rakabuming Raka**  
 TTL: Surakarta, 1 Oktober 1987  
 Usia: 36 tahun  
 Istri: Selvi Ananda  
 Orang tua: Joko Widodo (ayah), Iriana (ibu)  
 Almamater: Management Institute of Singapore (MDIS) University of Technology Sydney (UTS Insearh)  
 Instagram: @gibran\_rakabuming  
 X: @gibran\_tweet  
 Fanpage: Gibran Rakabuming

[f](#) [@](#) [t](#) [d](#) [forumterkinews](#)

# Infografis Profil Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024

**PEMILU  
2024**





## PROFIL CAPRES-CAWAPRES **ANIES BASWEDAN-MUHAIMIN ISKANDAR**

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftar sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (19/10). Berikut profil Anies dan Muhaimin.

**“ Untuk mengurus negara, mengurus masa depan (bangsa), harus dengan keseriusan. Biar masyarakat yang menilai atas apa yang kami kerjakan.”**

**“ Kita berikhtiar untuk meneruskan sistem yang baik, yang lambat dan stagnan harus kita lakukan perubahan. Kita sudah 27 tahun reformasi. Perubahan harus dimulai dari bawah.”**

**Anies Rasyid Baswedan**



**Lahir**  
Kuningan,  
Jawa Barat,  
7 Mei 1969

**Usia**  
54 tahun

**Abdul Muhaimin Iskandar**



**Lahir**  
Jombang,  
Jawa Timur,  
24 September  
1966

**Usia**  
57 tahun

**S1** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (1989-1995)

**S2** Manajemen Publik di University of Maryland, AS (1997-1999)

**S3** Ilmu Politik di Northern Illinois University, AS (1999-2004)



**Pendidikan**

**S1** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta (1991)

**S2** Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia (2001)

**Rektor** Universitas Paramadina (2007-2013)

**Menteri** Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2016)

**Gubernur** DKI Jakarta (2017-2022)



**Karir**

**Wakil** Ketua DPR RI (2004-2009)

**Menteri** Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014)

**Ketua** Umum PKB (2005-2010/2019-2024)

**Wakil** Ketua DPR RI (2019-2024)

DATA: BERBAGAI SUMBER | ILLUSTRASI: HERRY/CALVIN | RISET: DASRI | GRAFIS: WASRI | EDITOR: RANY

# Infografis Nomor Urut Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024



## NOMOR URUT CAPRES-CAWAPRES PEMILU 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11) malam.



Kita semua bersyukur, satu bersyukur, dua bersyukur, tiga bersyukur, alhamdulillah. Semua pasti ada hikmahnya."

Anies Rasyid Baswedan  
Abdul Muhaimin Iskandar

1



Suasana hari ini penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan saling mengasihi dan saling mendukung. Jadi siapapun yang menang, kita harus bersatu untuk menjaga negara ini."

Prabowo Subianto  
Gibran Rakabuming Raka

2



Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin dan perkataan kita. Buat kami, ini (Pemilu) bukan sekedar persoalan kekuasaan, ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang harus kita jaga bersama"

Ganjar Pranowo  
Mohammad Mahfud Mahmodin

3

### MEKANISME PENGUNDIAN

Cawapres mengambil bola berisi nomor antrian berdasarkan waktu pendaftaran ke KPU.

Pasangan capres-cawapres dengan nomor antrian terkecil berhak mengambil undian nomor urut lebih dulu.

Infografis Visi, Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden  
Republik Indonesia pada Pemilu 2024

detikcom

Visi Misi 3 Capres  
di Bidang Hukum-Pemerintahan  
Jelang Debat

<p><b>1</b></p>  <p><b>ANIES BASWEDAN - MUHAIMIN ISKANDAR</b></p> <p><b>VISI</b> Indonesia Adil Makmur untuk Semua</p> <p><b>MISI</b> Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA</b></p> <p><b>VISI</b> Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045</p> <p><b>MISI</b> Demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum.</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD</b></p> <p><b>VISI</b> Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari</p> <p><b>MISI</b> Mempercepat Pelaksanaan Demokrasi Substantif, Penghormatan HAM, Supremasi Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan yang Profesional.</p>
--	---	--

NASKAH: RAKHMAD HIDAYATULLOH P | DESAIN: MINDRA PURNOMO

# Infografis Team Sukses Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024

## Team Sukses Anies-Muhaemni (AMIN)



Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' pada Selasa (14/11/2023) mengumumkan kapten beserta pasukan Tim Pemenangan AMIN. Marsekal Madya (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus ditunjuk jadi Ketua Tim Pemenangan pasangan calon dari Koalisi Perubahan tersebut.

### DAFTAR TIM NASIONAL PEMENANGAN AMIN



Berikut jajaran timnas pemenangan AMIN:

- Muhammad Syaugi Alaydrus (kapten)
- Sudirman Said (wakil kapten)
- Thomas Trikasih Lembong (wakil kapten)
- Al Muzzammil Yusuf (wakil kapten)
- Nihayatul Wafiroh (wakil kapten)
- Azrul Tanjung (wakil kapten)
  
- Nasirul Mahasin (wakil kapten)
- Leontyns Alpha Edison (wakil kapten)
- Yusuf Muhammad Martak (wakil kapten)
- Ki KRT H Lebdo Nagro Anom Suroto (wakil kapten)
- Muhammad Jumhur Hidayat (wakil kapten)
  
- Maksum Faqih (wakil kapten)
- Suyoto (wakil kapten)
- Novita Dewi (sekretaris jenderal)
- Gede Widiade (Bendahara)
- Ari Yusuf Amir (tim hukum nasional)



SUMBER: BULID TIMNAS PEMENANGAN AMIN  
PENGGRAH: ANINDI SAHIBANI | FOTO: AP, PRAYOGI/REPUBLIKA | INFOGRAFIS: ALI IMRON

 @republikonline @republikonline RepublikaOnline

## Team Sukses Prabowo-Gibran

**TIM KAMPANYE NASIONAL PRABOWO-GIBRAN**

**PEMBINA:**

Habib Luthfi bin Yahya

Jenderal (Purn) Wiranto

Aburizal Bakrie

**PENGARAH:**

**Ketua:**

- Airlangga Hartarto

**Wakil Ketua:**

- Sufmi Dasco Ahmad
- Agus Harimurti Yudhoyono
- Zulkifli Hasan
- Yusril Ihza Mahendra
- Anis Matta
- Kaesang Pangarep
- Ridho Sahbana
- Agus Jabo Priyono
- Hasyim Djojohadikusumo

**PENASIHAT:**

**Ketua:**

- Jenderal (Purn) Sutanto

**Ketua umum TKN:**

- Rosan roselany

**Ketua koordinator Strategis:**

- Sufmi Dasco Ahmad

**Sekretaris:**

- Nusron Wahid

**Bendahara umum:**

- Thomas Mulyatna Djiwandono

Naskah: Binteri | Grafis: Endri

VIVA

## Team Sukses Ganjar-Mahfud





# PROFIL 4 ANGGOTA TIM PEMENANGAN GANJAR

• SUMBER Sindonews.com • NASKAH Giffar Rivana • INFOGRAFIS David •



## ANDIKA PERKASA

(Wakil Ketua Umum TPN Ganjar)

Mantan Panglima TNI yang lahir di Bandung tanggal 21 Desember 1964 dan menjadi salah satu lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1987.

## GATOT EDDY PRAMONO

(Wakil Ketua Umum TPN Ganjar)

Dikenal luas sebagai mantan Wakapoli. Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, 28 Juni 1965, itu adalah lulusan Akdemi Kepolisian tahun 1988.



## TGB MUHAMMAD ZAINUL MAJDI

(Wakil Ketua Umum TPN Ganjar)

Dikenal sebagai Gubernur NTB selama dua periode. Lahir di Pancor, Lombok Timur, pada 31 Mei 1972, lulusan Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir.

• SUMBER Sindonews.com • NASKAH Giffar Rivana • INFOGRAFIS David •

## TIM PEMENANGAN NASIONAL (TPN) **GANJAR-MAHFUD** SIAP BIDIK GENERASI Z DAN MILENIAL

Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden (capres) Ganjar dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud terlihat banyak melibatkan tokoh-tokoh besar seperti tim sukses pasangan calon capres cawapres lainnya.

Nama besar Megawati Soekarnoputri, Hary Tanoesoedibjo, Muhamad Mardiono, Sandiaga Uno, dan Oesman Sapta Odang siap bertarung menjadi dewan pengarah dalam memenangkan pertarungan di pemilu 2024 untuk pasangan capres cawapres nomor urut tiga itu.

Hal tersebut seakan tidak mau kalah dengan tim sukses (timses) kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 pasangan Anies - Muhaimin dan Prabowo - Gibran.

Terlihat, TPN Ganjar dan Mahfud sangat fokus untuk meraih suara para generasi z dan milenial.

Seperti apa susunan lengkap TPN Ganjar - Mahfud? Berikut adalah nama-nama lengkapnya.

### DEWAN PENGARAH



Megawati  
Soekarnoputri



Hary Tanoesoedibjo



Muhamad Mardiono



Sandiaga Uno



Oesman Sapta Odang

## DEWAN PENASIHAT



Yenny Wahid



Puan Maharani

## TPN GANJAR-MAHFUD



Arsjad Rasjid  
Ketua TPN Ganjar-Mahfud

### Wakil Ketua:

1. Angela Herliani Tanoesoedibjo
2. Benny Rhamdani
3. Amarsyah Purba
4. Andi Gani Nena Wea
5. Ahmad Basarah
6. Usman Tokan
7. Joni Supriyanto
8. Desi Albert Mamahit
9. Tatang Harlyansyah
10. Eko Sulistyio
11. Rambun Tjajo
12. Diah Anita Trihapsari

### Sekretaris:

Heru Dewanto  
Sekretaris Eksekutif

Hasto Kristiyanto  
Sekretaris

### Wakil Sekretaris:

1. Moh Arwani Thomafi
2. Kodrat Shah
3. Ahmad Rofiq
4. Sumantri Suwarno
5. Hotasi Nasaban

### Bendahara Umum

Orias Petrus Moedak

### Wakil Sekretaris:

1. Rudianto Tjhen
2. R Arya Permana Graha
3. Sarah
4. Henry Suparman
5. Djauhar Mauldi

### Deputi Hukum

Todung Mulya Lubis

### Kepala Staf Pimpinan

Regi Wahyu

## 2. Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Berdasarkan Pulau

Pulau Jawa merupakan arena persaingan terbesar bagi para politisi dalam berebut suara rakyat di Pemilu 2024. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah diresmikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih di Pulau Jawa mencapai 115 juta orang. Porsinya sekitar 56% dari total pemilih nasional yang berjumlah 204,8 juta orang.

Adapun gelanggang politik terbesar di Pulau Jawa ialah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jumlah pemilih di tiga provinsi tersebut setara dengan 46% total pemilih nasional.

Berikut rincian jumlah pemilih Pemilu 2024 yang dikelompokkan berdasarkan pulau/kawasan, diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil:<sup>34</sup>

### **DPT Pemilu 2024 Pulau Jawa**

- a. Jawa Barat: 35.714.901 pemilih
- b. Jawa Timur: 31.402.838
- c. Jawa Tengah: 28.289.413
- d. Banten: 8.842.646
- e. DKI Jakarta: 8.252.897
- f. DI Yogyakarta: 2.870.974
- g. Total: 115.373.669 pemilih

### **DPT Pemilu 2024 Pulau Sumatra**

- a. Sumatra Utara: 10.853.940 pemilih
- b. Lampung: 6.539.138
- c. Sumatra Selatan: 6.326.348
- d. Riau: 4.732.174
- e. Sumatra Barat: 4.088.606
- f. Aceh: 3.749.037
- g. Jambi: 2.676.107
- h. Kep. Riau: 1.500.974
- i. Bengkulu: 1.494.828

---

<sup>34</sup> <https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/adi-ahdiat>, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Berdasarkan Pulau/Kawasan, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.15 WIB

j. Kep. Bangka Belitung: 1.067.434

k. Total: 43.028.586 pemilih

**DPT Pemilu 2024 Pulau Sulawesi**

a. Sulawesi Selatan: 6.670.582 pemilih

b. Sulawesi Tengah: 2.236.703

c. Sulawesi Utara: 1.969.603

d. Sulawesi Tenggara: 1.867.931

e. Sulawesi Barat: 985.760

f. Gorontalo: 881.206

g. Total: 14.611.785 pemilih

**DPT Pemilu 2024 Pulau Kalimantan**

a. Kalimantan Barat: 3.958.561 pemilih

b. Kalimantan Selatan: 3.025.220

c. Kalimantan Timur: 2.778.644

d. Kalimantan Tengah: 1.935.116

e. Kalimantan Utara: 504.252

f. Total: 12.201.793 pemilih

**DPT Pemilu 2024 Bali-Nusa Tenggara**

a. Nusa Tenggara Timur: 4.00.8475 pemilih

b. Nusa Tenggara Barat: 3.918.291

c. Bali: 3.269.516

d. Total: 11.196.282

**DPT Pemilu 2024 Maluku-Papua**

a. Maluku: 1.341.012 pemilih

b. Papua Pegunungan: 1.306.414

c. Papua Tengah: 1.128.844

d. Maluku Utara: 953.978

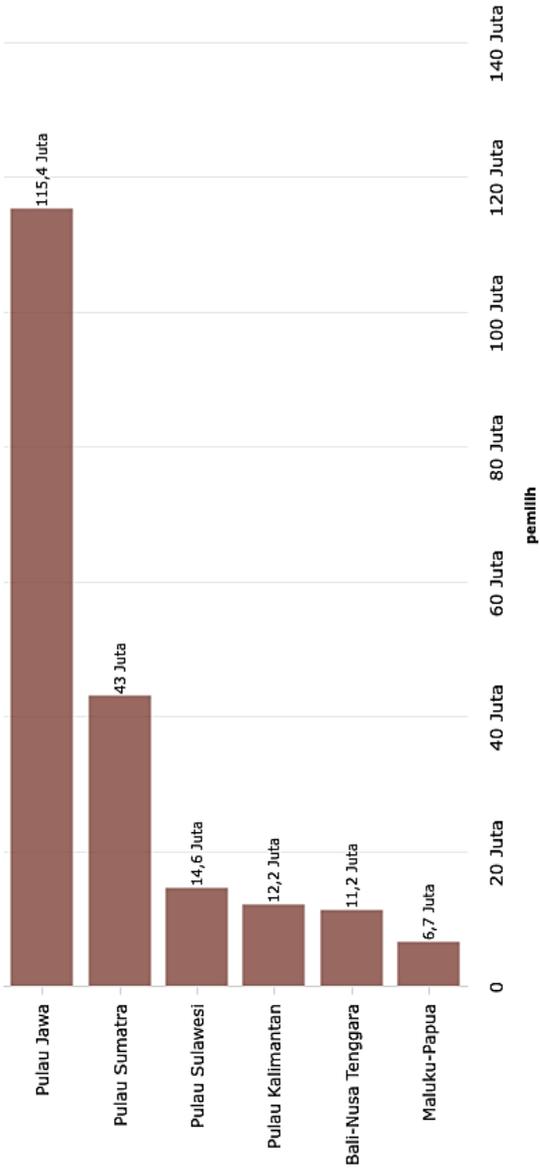
e. Papua: 727.835

f. Papua Barat Daya: 440.826

g. Papua Barat: 385.465

h. Papua Selatan: 367.269

i. Total: 6.651.643



### 3. Jumlah Pemilih Pemilu 2024 di Provinsi Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah meresmikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dengan jumlah total sekitar 204,8 juta pemilih.

Angka itu terdiri dari pemilih di dalam dan luar negeri, yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan 128 negara perwakilan.

DPT Pemilu 2024 dalam negeri paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat, sedangkan paling sedikit di Provinsi Papua Selatan seperti terlihat pada grafik di atas.

Kemudian jika dilihat dari pulau/kawasannya, pemilih terbesar berada di Pulau Jawa dengan porsi sekitar 56% dari total jumlah pemilih nasional. Adapun Maluku-Papua menjadi kawasan dengan pemilih paling sedikit.

Berikut rincian jumlah pemilih Pemilu 2024 yang dikelompokkan berdasarkan pulau/kawasan<sup>35</sup>:

#### **DPT Pemilu 2024 Pulau Sumatra**

- a. Sumatra Utara: 10.853.940 pemilih
- b. Lampung: 6.539.138
- c. Sumatra Selatan: 6.326.348
- d. Riau: 4.732.174
- e. Sumatra Barat: 4.088.606
- f. Aceh: 3.749.037
- g. Jambi: 2.676.107
- h. Kep. Riau: 1.500.974
- i. Bengkulu: 1.494.828
- j. Kep. Bangka Belitung: 1.067.434
- k. Total: 43.028.586 pemilih

#### **DPT Pemilu 2024 Pulau Jawa**

- a. Jawa Barat: 35.714.901 pemilih
- b. Jawa Timur: 31.402.838
- c. Jawa Tengah: 28.289.413

---

<sup>35</sup> <https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/adi-ahdiat>, Jumlah Pemilih Pemilu 2024 di 38 Provinsi Indonesia, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.18 WIB

- d. Banten: 8.842.646
- e. DKI Jakarta: 8.252.897
- f. DI Yogyakarta: 2.870.974
- g. Total: 115.373.669 pemilih

**DPT Pemilu 2024 Bali-Nusa Tenggara**

- a. Nusa Tenggara Timur: 4.00.8475 pemilih
- b. Nusa Tenggara Barat: 3.918.291
- c. Bali: 3.269.516
- d. Total: 11.196.282

**DPT Pemilu 2024 Pulau Kalimantan**

- a. Kalimantan Barat: 3.958.561 pemilih
- b. Kalimantan Selatan: 3.025.220
- c. Kalimantan Timur: 2.778.644
- d. Kalimantan Tengah: 1.935.116
- e. Kalimantan Utara: 504.252
- f. Total: 12.201.793 pemilih

**DPT Pemilu 2024 Pulau Sulawesi**

- a. Sulawesi Selatan: 6.670.582 pemilih
- b. Sulawesi Tengah: 2.236.703
- c. Sulawesi Utara: 1.969.603
- d. Sulawesi Tenggara: 1.867.931
- e. Sulawesi Barat: 985.760
- f. Gorontalo: 881.206
- g. Total: 14.611.785 pemilih

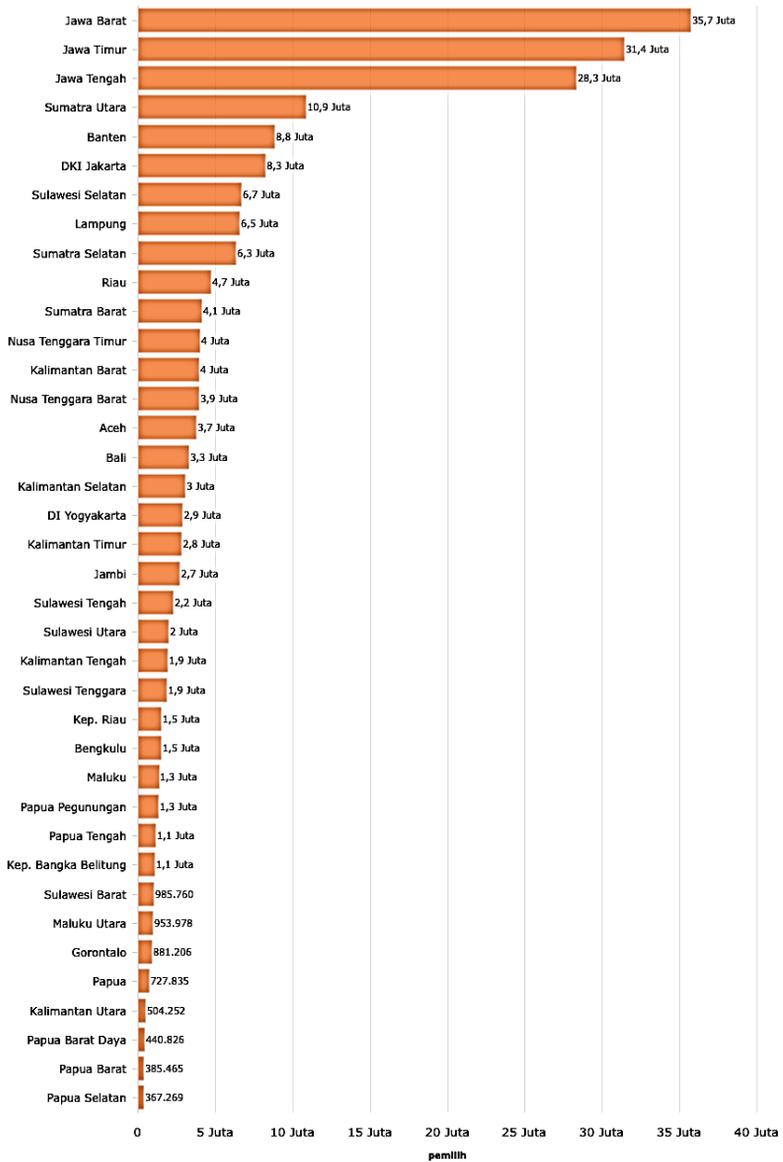
**DPT Pemilu 2024 Maluku-Papua**

- a. Maluku: 1.341.012 pemilih
- b. Papua Pegunungan: 1.306.414
- c. Papua Tengah: 1.128.844
- d. Maluku Utara: 953.978
- e. Papua: 727.835
- f. Papua Barat Daya: 440.826
- g. Papua Barat: 385.465
- h. Papua Selatan: 367.269
- i. Total: 6.651.643

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, pemilih Pemilu 2024 adalah penduduk Indonesia yang memenuhi syarat berikut:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di 38 Provinsi Indonesia



## C. Basis Pemilih Presiden di Pemilu 2024

### 1. Mayoritas Basis Pemilih Prabowo pada 2019 Tak Ganti Pilihan pada 2024

Menurut survei Polling Institute, dari total 1.496 responden, ada 44,5% yang memilih pasangan Prabowo-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019<sup>36</sup>.

Dari kelompok tersebut, mayoritas atau 54,2% mengaku akan memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024, kemudian 34,5% pindah ke Anies-Muhaimin, dan 6,9% ke Ganjar-Mahfud. Lebih dari separuh basis pemilih Prabowo di 2019 kembali memilih Prabowo," kata Peneliti Polling Institute Kennedy Muslim dalam paparan hasil survei bertajuk Dinamika Elektoral Terkini: Mungkinkah Pilpres 2024 Satu Putaran, Kamis (23/11/2023)<sup>37</sup>.

Polling Institute juga menemukan, dari total 1.496 responden, ada 55,5% responden yang dulunya memilih Jokowi-Ma'ruf Amin dan kini suaranya cenderung terbelah.

Dari kelompok tersebut, 36,6% di antaranya mengaku akan memilih Ganjar-Mahfud pada Pemilu 2024, kemudian 34,4% memilih Prabowo-Gibran, dan 20,1% memilih Anies-Muhaimin.

Seluruh responden dalam survei ini berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, memiliki telepon, dan diasumsikan mewakili 83% dari total populasi nasional. Sampel diambil menggunakan teknik pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD).

Pengambilan data dilakukan pada 15-17 November 2023 dengan metode wawancara melalui telepon oleh pewawancara terlatih. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) 2,6% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling.

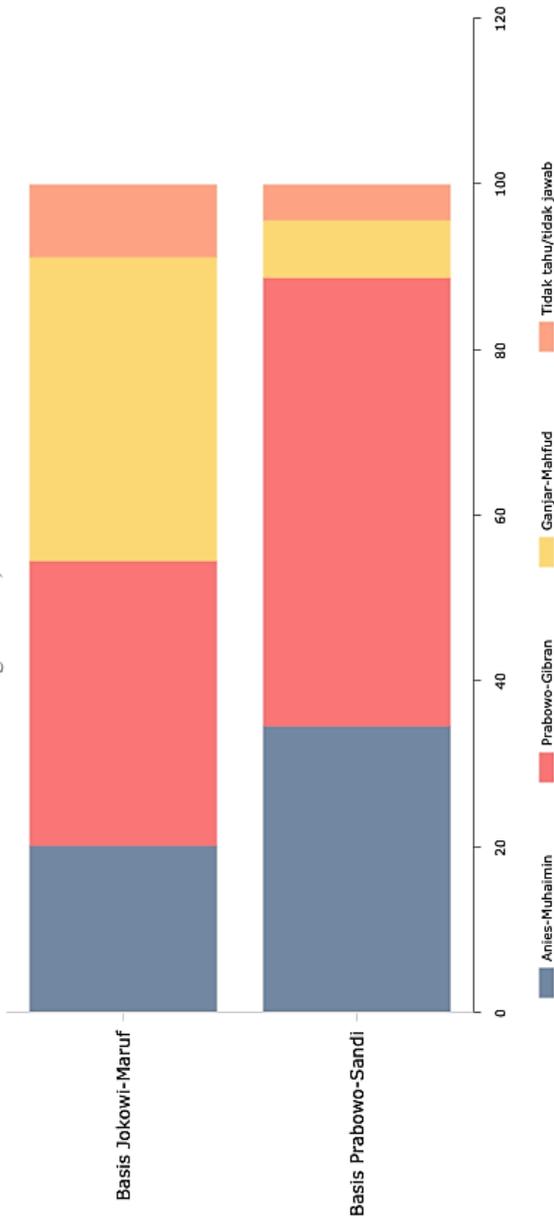
---

<sup>36</sup> <https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/nabilah-muhamad, Banyak Pemilih Ganjar Pindah ke Anies dan Prabowo, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.25 WIB>

<sup>37</sup> Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.49-54

# Tingkat Keterpilihan Capres-Cawapres 2024 Berdasarkan Basis Pemilih Pemilu 2019 (November 2023)

Sumber : Polling Institute, 23 November 2023



## 2. Banyak Pemilih Ganjar Pindah ke Anies dan Prabowo

Elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut satu, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tercatat terus meningkat.

Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pada September 2023 elektabilitas Anies-Cak Imin hanya 15%. Kemudian pada Oktober 2023 angkanya naik jadi 17,2%, dan terus menguat jadi 20,3% pada November 2023<sup>38</sup>.

Peneliti LSI Denny JA Adjie Al Faraby mengatakan, salah satu faktor yang mendorong elektabilitas Anies-Cak Imin adalah banyaknya pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang berpindah haluan.

Survei mereka menemukan, dari seluruh pemilih yang meninggalkan Ganjar-Mahfud, 40,2% di antaranya pindah mendukung Anies-Cak Imin. Ada juga 50,44% yang berbelok mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan 9,4% sisanya tidak tahu atau tidak jawab.

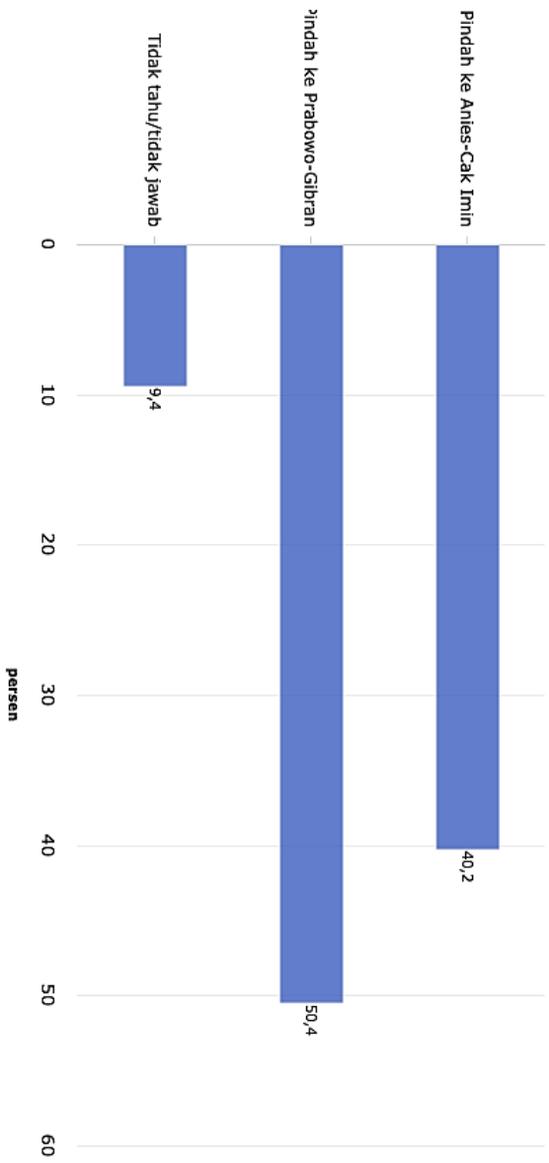
Pendukung yang pergi dari Ganjar-Mahfud cenderung banyak yang lari ke Anies-Cak Imin, walaupun yang lari ke Prabowo-Gibran masih lebih banyak (LSI Denny JA, Senin, 20/11/2023). Adjie melanjutkan, alasan lain yang mendorong elektabilitas Anies-Cak Imin adalah bertambahnya pendukung mereka dari segmen pemilih terpelajar, seperti mahasiswa, lulusan S1, hingga S2.

Pada September 2023 pendukung Anies-Cak Imin dari kalangan tamat D3 ke atas baru 27,8%. Angkanya kemudian naik jadi 31,9% pada Oktober 2023, dan 45,5% pada November 2023. Walaupun pemilih terpelajar ini kecil persentasenya, hanya kurang lebih 10 hingga 15%. Tapi memang terlihat bahwa ada kenaikan pemilihan Anies-Cak Imin di kalangan terpelajar.

---

<sup>38</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Banyak Pemilih Ganjar Pindah ke Anies dan Prabowo. diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.29 WIB

Survei ini dilakukan selama 6-13 November 2023 terhadap 1.200 responden yang tersebar di Indonesia. Metode penentuan responden menggunakan multi-stage random sampling. Pengumpulan data survei menggunakan metode wawancara tatap muka kuesioner, dengan tingkat kesalahan (margin of error) survei +/- 2,9%.



### 3. Anak Muda RI Lebih Suka Capres Berlatar Belakang Akademisi

Berdasarkan hasil survei nasional Katadata Insight Center (KIC), sebanyak 25,6% responden generasi milenial dan gen Z Indonesia lebih menyukai calon presiden (capres) berlatar belakang akademisi. Proporsi pilihan ini paling tinggi dibanding latar belakang lainnya.

Latar belakang capres yang paling disukai anak muda berikutnya pengusaha (11,1%), agamawan (10,6%), politisi (9,4%), sedangkan budayawan dipilih paling sedikit hanya 6%. Sisanya, 2% responden yang mengatakan latar belakang capres lainnya.<sup>39</sup>

Menurut Manager Survei KIC, Satria Triputra Wisnumurti dalam siaran pers, Selasa (14/11/2023). Dinyatakan, bahwa “Latar belakang sebelum menjadi politisi menjadi perhatian responden. Sebanyak 25% responden menyukai kandidat yang berasal dari dunia akademik, lalu militer (20,8%), dan aktivis (14,5%)”.

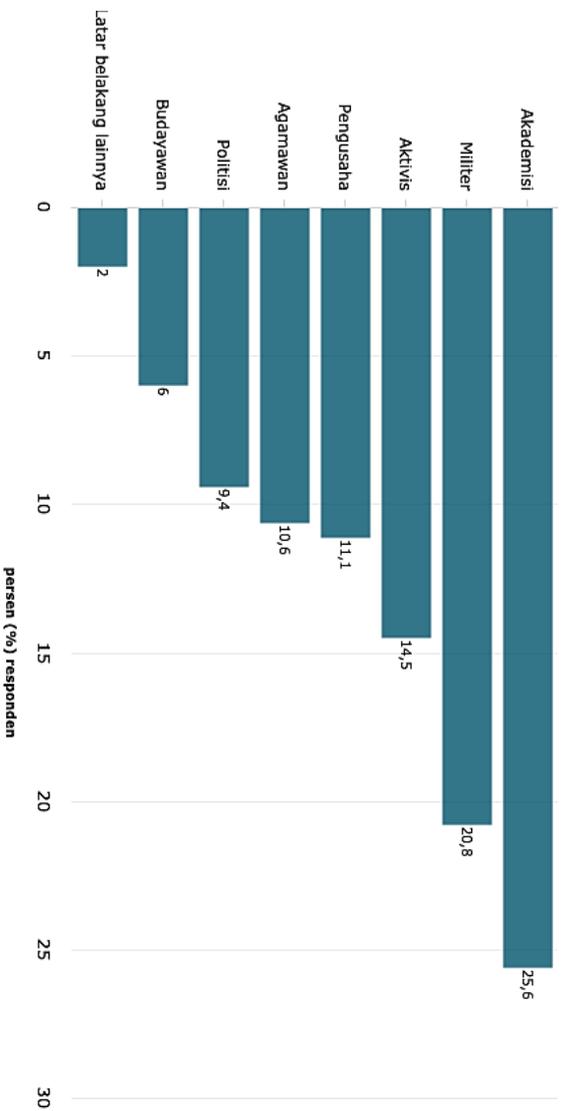
Survei KIC ini dilakukan pada 11-17 Oktober 2023 terhadap 1.005 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia secara proporsional. Seluruh responden adalah anak muda, yakni gen z usia 17-26 tahun (50,4%) dan milenial usia 27-42 tahun (49,6%), yang memiliki nomor telepon seluler.

Survei dilakukan menggunakan data collection Survey yang mampu menjangkau responden secara akurat dengan memanfaatkan kapabilitas telco data insight. Survei ini memiliki margin of error +/- 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

---

<sup>39</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Anak Muda RI Lebih Suka Capres Berlatar Belakang Akademisi, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.31 WIB

### Latar Belakang Capres yang Paling Disukai Anak Muda (Oktober 2023)



#### 4. Kinerja dan Visi Jadi Faktor Utama Anak Muda Pilih Presiden-Wapres

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi anak muda Indonesia, yakni gen Z dan milenial, sebelum memilih presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC), faktor utama yang dilihat anak muda adalah rekam jejak kinerja calon pasangan. Faktor ini dipilih oleh 35,5% responden melalui jawaban single answer atau hanya satu jawaban per satu responden.

Faktor terbesar lainnya adalah visi-misi dan program calon pasangan dengan persentase 29,8% responden. Sebelum memilih presiden dan wakil presiden, anak muda cenderung akan melihat kinerja rekam jejak (35,5%) dan visi-misi program (29,8%)," tulis tim riset dalam laporan Politik di Mata Anak Muda: Persepsi dan Kecenderungan Gen Z & Milenial terhadap Capres, Parpol, dan Kampanye Pemilu 2024.<sup>40</sup>

Selanjutnya, faktor kompetensi yang dipilih 12,4% responden. Lalu, karakter personal juga jadi pertimbangan 11,1% responden. Kemudian latar agama dianggap faktor utama oleh 7,1% responden. Sementara usia, yang menjadi polemik sebelum masa pencapresan, dianggap penting oleh 1,1% responden.

Selain faktor tersebut, terdapat penampilan, gender, asal daerah dan suku, dengan proporsi di bawah 1% seperti terlihat pada grafik. Tim riset menambahkan, ada perbedaan pola pilihan antara milenial dan gen Z.

Berdasarkan generasi, milenial lebih banyak yang mempertimbangkan faktor kompetensi dan karakter personal dibandingkan gen Z. Survei ini melibatkan 1.005 responden yang tersebar secara proporsional di Indonesia. Mayoritas responden berada di Pulau Jawa (54,4%), Sumatra

---

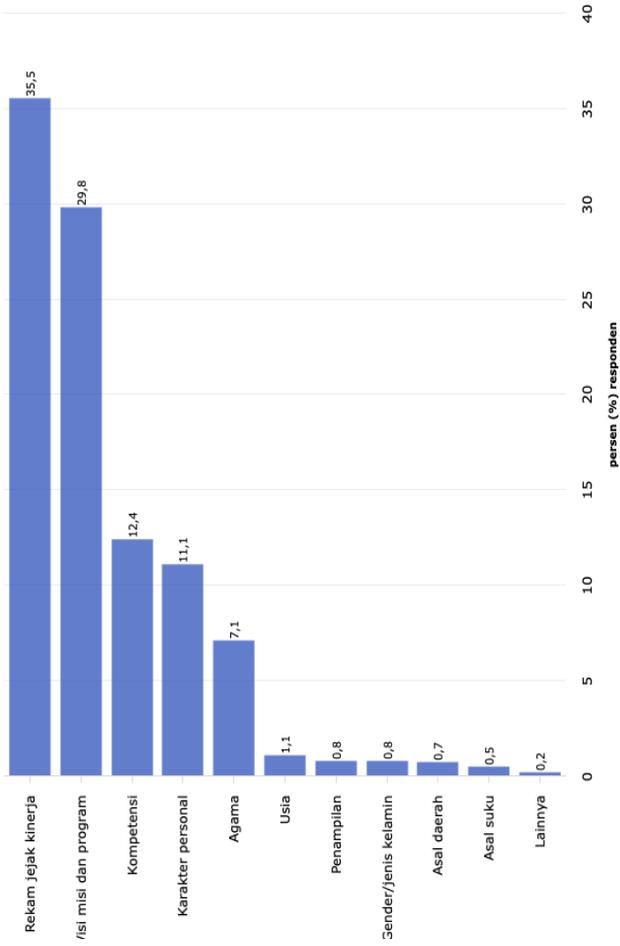
<sup>40</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/erlina-f-santika>, Kinerja dan Visi Jadi Faktor Utama Anak Muda Pilih Presiden-Wapres, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.33 WIB

(22,5%), dan Sulawesi (7,8%). Sementara, responden yang berasal dari Kalimantan, Bali-Nusa, dan Maluku Papua berada di rentang 3,6-6,4%.

Responden terdiri dari kelompok gen Z atau usia 17-26 tahun (50,4%), serta milenial atau usia 27-42 tahun (49,6%). Berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari 60,6% responden laki-laki dan 39,4% responden perempuan.

Pengambilan data dilakukan pada 11-17 Oktober 2023 secara online melalui data collection tSurvey dengan metode pengambilan sampel non-probability sampling. Survei ini memiliki tingkat kesalahan (margin of error) sekira 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Persentase Faktor yang Memengaruhi Pilihan Presiden-Wakil Presiden Menurut Responden (Oktober 2023)



#### **D. Kesimpulan**

Pulau Jawa menjadi kunci dan medan pertempuran paling sengit antara kandidat calon presiden dan wakil presiden dan partai politik tahun 2024. Pengalaman Pilpres 2019 lalu kemudian menjadi benchmark bagi para elite politik untuk menentukan siapa yang akan diusung dan siapa calon pendampingnya. Bibit, bebet, bobot-nya, benar-benar ditimbang betul

Mereka semua mengharapkan suara optimal di wilayah padat penduduk ini. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa mencapai 154,28 juta atau sekitar 56 persen dari total populasi tahun 2022 sebanyak 275,7 juta. Sementara dari jumlah populasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan sebanyak 204,8 juta daftar pemilih tetap (DPT), dengan jumlah 56,3 persen atau 115,37 adalah pemilih yang tinggal di Pulau Jawa. Jika melihat riwayat Pemilu 2019 lalu, Pulau Jawa adalah battleground yang cukup sengit antara pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Tren Jawasentris yang diidentikkan dengan Jawa pemimpin yang punya sopan santun, punya tata krama, punya keadaban yang itu dianggap mulia. Apakah mereka memaknai identitas itu dengan lebih rasional atau identitas itu mereka maknai dengan lebih primordial. Sehingga identitas tidak kemudian menjadi pertimbangan seperti *for granted*, tapi pemilih menilai rasional, melihat visi, misi, program.

Untuk pertimbangan mengapa Pulau Jawa Battleground, Arena Persaingan Politik Terbesar Pemilihan Umum 2024, karena Pulau Jawa merupakan arena persaingan terbesar bagi para politisi dalam berebut suara rakyat di Pemilu 2024, hal tersebut berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah diresmikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih di Pulau Jawa mencapai 115 juta orang. Porsinya sekitar 56% dari total pemilih nasional yang berjumlah 204,8 juta orang.

Dengan riwayat pertarungan tersebut, serta jumlah populasi yang mencapai lebih dari 56 persen dari total pemilih, maka sangat wajar jika pulau Jawa lagi-lagi menjadi medan pertempuran pada kandidat. Pengalaman Pilpres 2019 lalu kemudian menjadi benchmark bagi para elite politik untuk menentukan siapa yang akan diusung dan siapa calon pendampingnya menuju presiden 2024.

Adapun penyebab pelaksanaan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota legislative terpuruk dan tidak jujur dan adil (Jurdil), antara lain:

1. Praktik peredaran politik uang (money politic), dan pembagian bantuan sosial (banso) yang menggunakan anggaran APBN/APBD/BUMN/BUMD menjadi hal yang paling dikhawatirkan publik selama perhelatan Pemilu 2024.;
2. Ketidaknetralan penyelenggara negara, apartur negara dan ASN kepada calon presiden/wakil presiden tertentu;
3. Keberpihakannya aparatur penegak hukum khususnya MK, TNI/POLRI dan instansi lainnya kepada calon tertentu.

# BAB

# 14

## PERTEMUAN KE EMPAT BELAS DASYATNYA MONEY POLITIK DALAM PERTARUNGAN PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA 2024

### A. Dasyatnya Money Politik Dalam Pemilu 2024

Gegap gempita penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tersisa hitungan beberapa bulan ke depan<sup>41</sup>. Tak hanya pemilihan presiden dan wakil presiden, masyarakat juga memilih calon anggota legislatif tingkat DPR, DPD dan DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang. Para peserta mempersiapkan kampanye agar meraih jabatan politik

#### 1. Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024

Politik uang menjadi salah satu ancaman serius Pemilu serentak tahun 2024 mendatang<sup>42</sup>. Politik uang tidak lagi antara peserta dan pemilih, tetapi merambah ke penyelenggara pemilu.

Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi narasumber dalam webinar Politik Uang: Potensi, Pencegahan, dan Penindakan pada Kamis (9/2/2023).

---

<sup>41</sup> Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.76-78

<sup>42</sup> <https://dkpp.go.id/> Ratna Dewi: Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 16.22 WIB

“Politik uang kini merambah sampai pada penyelenggara Pemilu. Ini menjadi hal yang penting bagaimana melakukan pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi

DKPP memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan politik uang di kalangan penyelenggara. Menurutnya, putusan DKPP memberikan efek jera kepada penyelenggara yang terlibat politik uang.

Sebagai contoh, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Prabumulih dalam perkara 123-PKE-DKPP/III/2021 yang terbukti menerima uang dari salah satu calon Anggota Legislatif dengan menjanjikan sebanyak 20 ribu suara.

Pada perkara 65-PKE-DKPP/VI/2020, sambilan Ratna Dewi, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terbukti menerima uang dan menjanjikan perolehan suara bagi calon Anggota Legislatif. “Putusan DKPP ini menjadi warning sekaligus edukasi bagi penyelenggara agar bertindak berhati-hati dan sesuai kode etik pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” ungkap Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022 ini.

Tantangan lain Pemilu tahun 2024 adalah masyarakat telah menganggap lumrah politik uang. Mengutip hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2019, sebanyak 48% masyarakat beranggapan jika politik uang hal yang biasa. “Ini merupakan tantangan besar bagi seluruh stakeholder di tanah air, bagaimana membuat regulasi yang jelas sebagai salah satu syarat Pemilu yang demokratis. Tentu saja di dalamnya menyangkut bagaimana penindakan dan sanksi bagi pelaku politik uang.

## **2. Bahaya Politik Uang di Pesta Demokrasi 2024**

Upaya para peserta pemilu mempengaruhi pemilih agar memberikan suara kepada mereka merupakan hal wajar, sepanjang dilakukan dengan cara yang tidak

menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Namun jika menyimpang akan berdampak pada menurunnya kualitas dan esensi demokrasi. Kekhawatiran tersebut pernah diungkapkan oleh Prof. Dr. H Safii Ma'arif dalam (Karzi, 2015) bahwa proses kontestasi pemilihan umum untuk menduduki jabatan politik, baik itu pemilu ataupun pilkada sensitif terhadap penyelewengan tanpa pedoman moral dan regulasi yang menjadi payung hukum. Sebagaimana ditulis pada awal pendahuluan ini bahwa salah satu kecurangan yang biasa terjadi pada proses pemilu adalah politik uang. Politik uang adalah salah satu implementasi yang dapat melahirkan manipulasi politik. Politik uang sebagai induknya korupsi adalah persoalan fundamental dan acapkali terjadi di Indonesia<sup>43</sup>.

## **B. Politik Uang Menciptakan Peradaban Kotor di Pemilu 2024**

### **1. Politik Uang Menjamur di Pemilu 2024**

Politik uang (money politic)<sup>44</sup> masih akan mewarnai pemilu Indonesia 2024 karena banyaknya cukong yang ikut terlibat, masyarakat masih menganggap politik uang adalah hal yang lumrah sehingga sangat sulit dihilangkan. Juga karena regulasi yang ada menyulitkan pembuktian praktik politik uang. Praktik politik uang akan berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi. Manifestasi politik uang (money politics) masih menjadi kekuasaan utama yang mempengaruhi pilihan masyarakat di pemilu hingga kini. Munculnya kejadian itu, tidak terlepas dari rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Pada satu sisi

---

<sup>43</sup>Meri Carolina S, Tabah Maryanah, Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 48, No. 2, November 2022, h.143-144

<sup>44</sup> Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.78-81

para calon butuh dukungan suara, sedangkan pada sisi lain masyarakat pemilih cenderung melihat pemilu dan pemilihan sebagai kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Fakta ini berawal dari kurangnya kesadaran masyarakat maupun para calon dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Prasyarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa Pemilu 2019 dan pilkada 2020 lalu terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sangatlah berat<sup>45</sup>.

## **2. Politik Uang Perbuatan Demokrasi yang Menyimpang**

Money politics bukan sekadar penyimpangan, melainkan kebangkitan peradaban kotor budaya politik Indonesia. Hal ini karena orang-orang beranggapan bahwa politik transaksional dalam pilkada (pemilihan kepala daerah), Pilpres (pemilihan presiden), Pileg (Pemilihan legislative) dan pemilihan merupakan sesuatu yang biasa atau sepele. Sementara itu, bila semakin sering seseorang disodori uang/barang atau menyaksikan adanya praktik politik uang maka semakin permisif seseorang dengan money politics. "Semakin banyak menjalani praktik money politics atau melihat peristiwa dimaksud maka menjadikan praktik money politics menjadi hal yang lumrah"<sup>46</sup>. Politik uang dianggap sebagai hal yang lazim meskipun merupakan praktik politik negatif karena daya Tarik finansial mengalahkan kecerdasan intelektual kandidat <sup>47</sup> .

---

<sup>45</sup>Meri Carolina S, Tabah Maryanah, Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 48, No. 2, November 2022, h. 155.

<sup>46</sup>Burhanudin Muhtadi. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Parti-ID dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik, 10 No. 1, 47.

<sup>47</sup>Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2020). Journal of Governance. The Aristocrats Power on Local Politic InThe Regency of Bone 2013-2018, 5 (1), 31-46. <https://doi.org/https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7033>

Kemenangan kandidat atau calon bukan dilihat dari kompetensi atau kemampuan secara intelektualitas calon tetapi lebih melihat dari kemampuan ekonomi dan modal/uang yang dimiliki oleh calon tersebut untuk berkompetisi, dukungan pemilik modal dari pengusaha-pengusaha kaya dalam pencalonannya juga telah menjadi hal yang lazim banyak dilakukan aktor-aktor politik untuk mendukung biaya kampanye dan sosialisasi pemenangannya yang membutuhkan biaya sangat mahal.

Sebagian masyarakat menilai praktik politik uang dalam kontestasi politik merupakan hal wajar. Padahal, praktik itu mencederai demokrasi dan integritas pemilihan. Kesadaran warga untuk menolak praktik itu dibutuhkan.

Politik uang yang membudaya akan menurunkan kualitas demokrasi. Ini bisa dijelaskan dengan meninjau aspek sebagai berikut<sup>48</sup>:

a. Politik uang merendahkan martabat manusia.

Penggunaan politik uang oleh caleg dan partai politik untuk membeli suara rakyat sebenarnya telah merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat rakyatnya diukur dengan uang, dan nilai mereka yang sebenarnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apa yang akan terus naik sebagai calon pada periode berikutnya ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Propaganda. Karena masyarakat ditipu dengan menggunakan hak pilihnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saat itu. Degradasi harkat dan martabat manusia disebabkan oleh tidak dihargainya hak asasi manusia. Kandidat parlemen menyumbangkan uang dalam jumlah besar dengan harapan mereka akan

---

<sup>48</sup>Meri Carolina S, Tabah Maryanah, Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 48, No. 2, November 2022, h. 151-152.

memberikan suara dalam pemilihan, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28E (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

b. Politik Uang merupakan Perangkap Buat Rakyat.

Seseorang yang menjadikan Politik Uang sebagai sarana untuk menggapai maksudnya adalah memasang perangkap untuk menjebak orang. Setelah pemilihan kandidat tidak ada yang perlu diusahakan karena kandidat akan tenggelam dalam kesibukannya selama 5 tahun atau beberapa waktu mengumpulkan rupiah untuk memulihkan semua kerugian yang sudah dibayarkan untuk menyogok pemilih.

c. Politik Uang Melumpuhkan Kaderisasi Politik.

Kaderisasi Politik tidak akan membantu jika pemilu adalah rentan politik uang. Calon tidak merasa terbebani oleh pemilih karena mereka percaya bahwa keberhasilan meraih kursi adalah hasil dari jual beli suara. Akibatnya, sang calon akan begitu sibuk mempertahankan kekuasaan dalam jabatannya sehingga ia akan terus naik sebagai calon pada periode berikutnya ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.

d. Politik Uang akan Berujung pada Korupsi.

Korupsi yang meluas adalah bentuk penggelapan anggaran daerah di mana eksekutif dan legislatif bekerja sama. Badan legislatif dengan fungsi kontrol dan pengawasan tidak dapat berfungsi secara optimal. Poin ini terkait dengan poin kedua, bahwa motivasi korupsi adalah untuk menutupi kerugian yang terjadi dalam kampanye pemilu dimana kandidat menggunakan kebijakan moneter untuk membeli suara rakyat.

e. Politik Uang Mematikan Transfigurasi Masyarakat.

Perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhalangi jika sistem demokrasi tetap dikuasai oleh politik uang. Penyelenggaraan pemilu yang adil menjadi sangat penting, karena pemilu itu sendiri merupakan wahana yang dominan dari demokrasi, dan Serta perwujudan kehendak rakyat. Jika penyelenggaraan pemilihan parlemen tercemar dengan ketidakjujuran, maka niat sebenarnya masyarakat tidak akan terpenuhi.

### C. Teori Pertukaran

Sebelum penulis membahas Deretan Partai Pendukung Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2024, maka perkenankanlah penulis akan membahas Teori pertukaran<sup>49</sup> yang dicetuskan oleh George Caspar Homans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibout dan Harrold H. Kelly Menurut (Damsar & Indrayani, 2015) dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena politik uang dalam pemilu. Asumsi teori pertukaran adalah bahwa kita manusia adalah makhluk yang rasional, yang selalu memperhitungkan untung rugi. Manusia secara simultan berperan serta dalam memilih di antara perilaku-perilaku alternatif. Preferensi yang diambil akan merepresentasikan cost dan hasil. Pilihan kemudian diambil berdasarkan pada pertimbangan untung rugi.

Menurut teori pertukaran ini, dapat diperhitungkan bahwa isyarat money politics yang ada tidak dapat hilang dari korelasi sosial antara seseorang dengan si calon kepala daerah dalam pemilu.

Politik uang (money politic) masih akan mewarnai pemilu Indonesia 2024 karena banyaknya cukong yang ikut terlibat, masyarakat masih menganggap politik uang adalah hal yang

---

<sup>49</sup>Meri Carolina S, Tabah Maryanah, Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 48, No. 2, November 2022, h.144-145.

lumrah sehingga sangat sulit dihilangkan<sup>50</sup>. Juga karena regulasi yang ada menyulitkan pembuktian praktik politik uang. Praktik politik uang akan berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi. Manifestasi politik uang (money politics) masih menjadi kekuasaan utama yang mempengaruhi pilihan masyarakat di pemilu hingga kini. Money politics bukan sekadar penyimpangan, melainkan kebangkitan peradaban kotor budaya politik Indonesia. Hal ini karena orang-orang beranggapan bahwa politik transaksional dalam pilkada dan pemilihan merupakan sesuatu yang biasa atau sepele. Sementara itu, bila semakin sering seseorang disodori uang/barang atau menyaksikan adanya praktik politik uang maka semakin permisif seseorang dengan money politics.

Kemudahan yang dapat diperoleh dari praktik money politics yang terjadi pada saat pemilihan, kemudian menjadi pertimbangan rakyat untuk menetapkan preferensinya untuk menentukan pilihan kepala daerah, Presiden, anggota legislative, dalam suatu pemilihan. Oleh sebab itu, semakin tinggi imbalan politik uang, semakin besar kemungkinan perbuatan itu akan dilakukan kembali. Sebaliknya, makin besar biaya atau intimidasi hukuman, semakin kecil kemungkinan untuk mengulangi perilaku yang sama. Seperti yang diungkapkan Jeffri Arlinadar dan Jamaluddin Gaffar (M. Jeffri Arlinandes & Jamaluddin Gaffar, n.d.) bahwa pelanggaran terbanyak dalam pemilu didominasi oleh praktik politik uang, yang mencapai angka 52%. Kejadian demikian hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia dan disebarkan oleh media massa dengan 1.716 pemberitaan. Ironisnya, fenomena politik uang dianggap lumrah, baik bagi pemberi/cakada atau penerima/masyarakat karena dianggap sebagai sesuatu yang profitable bagi kedua belah pihak.

---

<sup>50</sup> Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.82-86

## 1. **Hindari Politik Uang dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya**

Tapi perlu diingat, meraih kemenangan dengan tanpa melanggar aturan. Salah satunya tidak menggunakan politik uang alias money politic. Larangan politik uang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, “Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa politik uang tersebut bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Kemudian, politik uang tersebut bertujuan agar peserta kampanye memilih pasangan calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengambil tindakan. Yakni berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Sementara, Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”.

Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan

rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pelanggaran dimaksud terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak menghilangkan sanksi pidana.

## **2. Tolak Politik Uang**

Fenomena politik uang menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program 'Hajar Serangan Fajar' mengimbau masyarakat ikut mengawal Pemilu dengan menentang dan menolak praktik politik uang yang dapat menjelma menjadi korupsi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan sudah bukan menjadi rahasia lagi jika setiap penyelenggaraan Pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah masih dikotori dengan politik uang. Apabila masyarakat dengan senang hati menerima politik uang, maka perilaku tersebut dapat memberatkan para kepala daerah serta wakil rakyat. Sebab, ongkos politik/demokrasi yang tergolong sangat mahal dapat memicu kepala daerah/wakil rakyat melakukan tindak pidana korupsi. "Menjelang pencoblosan banyak orang yang berbagi rezeki. Kami mendorong nanti tahun depan ketika pemilu tolong hindarkan diri dari perbuatan untuk menerima sesuatu dari calon (Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, hukumonline.com Senin, 28/8/2023).

Menurutnya, para wakil rakyat dan kepala daerah yang terpilih bakal berhitung ongkos yang telah dikeluarkan untuk mengikuti kontestasi jabatan politik. Ongkos tersebut pun bakal diupayakan agar kembali modal. Para kepala daerah yang terjaring KPK dalam perkara korupsi tak lepas dari praktik balik modal.

Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu mengatakan, praktik balik modal yang dilakukan kepala daerah terpilih dengan berbagai macam

hal. Misalnya, area pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang rawan terjadinya penggelapan aset akibat pengamanan yang lemah. Bahkan boleh jadi pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang rawan suap/gratifikasi proyek. “Pengadaan barang/jasa dan proses perizinan kenapa begitu sulit, kenapa banyak pekerjaan kontruksi yang tidak beres, ya karena tadi itu ada mark up, ada kualitas yang diturunkan untuk mengejar setoran.

Dihimpun dari data KPK, biaya politik calon bupati/wali kota rata-rata Rp.30 miliar, sementara gaji bupati/wali kota terpilih selama 5 tahun di bawah biaya politik. Begitu pula dengan biaya politik menjadi gubernur bisa mencapai Rp.100 miliar. Sedangkan untuk pemilihan presiden, biayanya jauh lebih besar lagi.

KPK pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Mantan Bupati Klaten Sri Hartini tahun 2016 silam. OTT tersebut terkait perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sri Hartini divonis hukuman 11 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

### **3. Sanksi Pidana Politik Uang**

Untuk sanksi pidana politik uang dibedakan tiga kelompok. Pasal 523 ayat 1 menyebutkan, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta”.

Kemudian Pasal 523 ayat 2 mengatur terhadap setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada

pemilih secara langsung ataupun tidak langsung disanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Sedangkan Pasal 523 ayat 3 menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta”.

#### **D. Partai Pendukung dan Potensi Kecurangan di Pemilihan Presiden 2024**

##### **1. Deretan Partai Pendukung Calon Presiden dan Wakil Prsiden 2024**

Tiga bakal calon presiden (bacapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024<sup>51</sup> saling berlomba mengumpulkan dukungan dari sejumlah partai politik. Ketiganya adalah bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan<sup>52</sup>.

Lantas, siapa capres yang punya pendukung paling besar dari partai politik?

Berdasarkan data yang dihimpun Katadata.co.id per 13 Agustus 2023, Prabowo memiliki pendukung terbanyak yaitu dari 5 partai politik. Di antaranya adalah Gerindra, PBB, Golkar, PAN, dan PKB.

Teranyar, Partai Golkar dan PAN menyatakan resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

---

<sup>51</sup> Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.87-91

<sup>52</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Deretan Partai Pendukung Bacapres 2024, Siapa Terbanyak, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.41 WIB

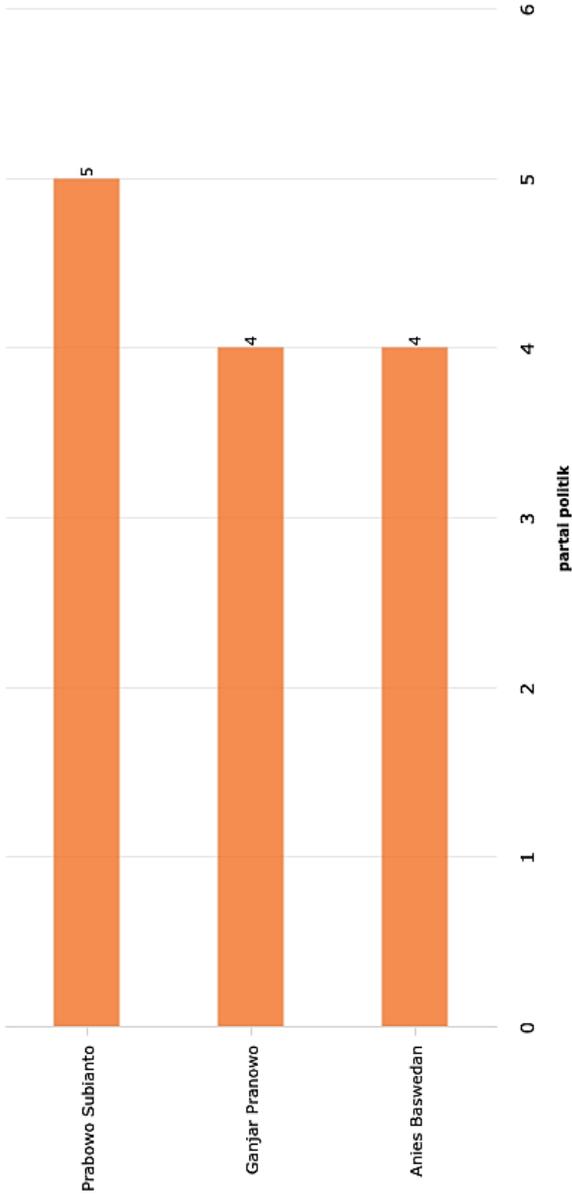
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, dukungan gerbong Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan terhadap Prabowo memperjelas bahwa Pilpres 2024 akan diikuti oleh tiga pasangan capres dan cawapres. “Dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo akan membuat peta Pilpres semakin jelas (Aboe Bakar Al-Habsy, Katadata.co.id, Minggu, 13/8/2023).

Menurut Aboe, adanya tiga pasang capres dan cawapres dapat meminimalkan polarisasi yang timbul di masyarakat akibat kontestasi. Ini cukup ideal. Jangan sampai pengalaman pemilu kemarin terulang ketika kontestasi hanya diisi dua paslon, yang terjadi yakni polarisasi di tengah masyarakat.

Sebelumnya, pelaksanaan Pilpres 2019 hanya diikuti oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Jokowi memenangkan Pilpres dan menjadi presiden RI hingga 2024 mendatang. Berikut adalah sejumlah partai yang mendukung para bakal Calon Presiden & Calon Wakil Presiden RI Tahun 2024:

- a. Prabowo Subianto: Golkar, PAN, PKB, PBB, PSI dan Partai Gerindra.
- b. Ganjar Pranowo: PDIP, PPP, dan partai non-parlemen yaitu Hanura dan Perindo.
- c. Anies Baswedan: PKS, Partai NasDem, Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Meski demikian, ketiga kandidat capres tersebut belum juga menunjuk calon wakil presiden (cawapres) hingga saat ini.



## 2. Pihak yang Dinilai Berpotensi Curang pada Pemilu 2024

Laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) berjudul Debat Capres, Netralitas Pemilu, dan Elektabilitas edisi Desember 2023 menunjukkan, ada beberapa pihak yang dinilai publik berpotensi melakukan kecurangan pada Pemilu 2024.<sup>53</sup>

Sebanyak 17,1% dari total responden menilai bahwa partai politik menjadi pihak yang paling berpotensi melakukan kecurangan pada pemilu tahun depan.

Berikutnya disusul oleh tim sukses calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) sebesar 15,9% dan penyelenggara pemilu 13,6%. Rupanya bukan presiden dan aparat negara yang paling dicurigai masyarakat (Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, Minggu,10/12/2023).

Proporsi responden yang menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi curang pada Pemilu 2024 hanya 2,3%. Meskipun begitu, menurut Djayadi, kecurangan dari ketiga pihak tersebut bisa saja dikaitkan dengan aparat negara maupun Presiden.

Lalu Capres dan Cawapres turut jadi pihak yang dicurigai 4,2% responden melakukan kecurangan pada pesta demokrasi tahun depan. Adapun pihak yang paling sedikit dicurigai yakni pemerintah daerah, pemerintah pusat, Polri, TNI, dan lainnya dengan proporsi kurang dari 5%.

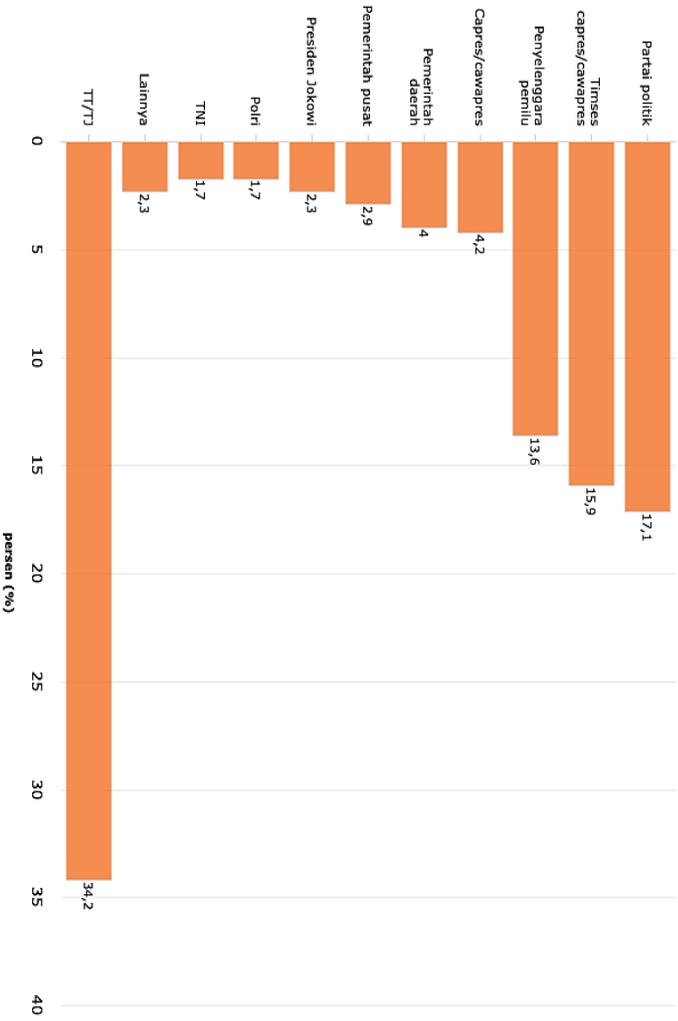
Sementara proporsi responden yang tidak tahu atau tidak menjawab cukup tinggi, yaitu 34,2%. Survei ini dilakukan pada 3-5 Desember 2023 terhadap 1.426 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Responden merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, mewakili sekitar 83% dari total populasi nasional.

---

<sup>53</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad>, Ini Pihak yang Dinilai Berpotensi Curang pada Pemilu 2024 Menurut Survei LSI, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.33 WIB

Penarikan sampel menggunakan teknik pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD) yang sudah divalidasi dan melalui proses screening. Responden yang terpilih kemudian diwawancarai lewat telepon oleh pewawancara terlatih. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,6%, tingkat kepercayaan 95%, dengan asumsi sampel random sampling.

Proporsi Pihak yang Dinilai Paling Potensial Melakukan Kecurangan pada Pemilu 2024 (Desember 2023)



### **3. Lembaga Survei Indonesia Nilai Ganjar-Mahfud Paling Berpotensi Curang di Pemilu 2024**

Lembaga Survei Indonesia (LSI) memaparkan hasil jajak pendapat terkait pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dinilai paling berpotensi melakukan kecurangan di Pemilu 2024.<sup>54</sup>

Dari tiga pasangan calon, Ganjar Pranowo dan Mahfud FD menempati posisi teratas pasangan capres-cawapres yang paling berpotensi melakukan kecurangan di Pemilu 2024. Proporsinya mencapai 20,6%.

Kemudian, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempati posisi kedua pasangan yang berpotensi melakukan kecurangan dengan proporsi sebesar 14,4%. Sementara, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai memiliki potensi kecurangan di Pemilu 2024 paling kecil, yaitu hanya 5,4%.

Menurut masyarakat (potensi kecurangan) terjadi di pasangan Ganjar-Mahfud, kedua Prabowo-Gibran, dan sedikit sekali kemungkinan Anies-Muhaimin melakukan curang (Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI dalam konferensi pers secara online di akun YouTube LSI, Minggu, 10/12/2023). Namun, mayoritas atau sebanyak 59,6% responden lebih memilih menjawab tidak tahu/tidak menjawab terkait pertanyaan pasangan capres-cawapres yang berpotensi melakukan kecurangan.

Survei itu juga menemukan, ada sejumlah pihak yang dinilai publik paling berpotensi melakukan kecurangan pada Pemilu 2024. Hasilnya, partai politik menempati posisi teratas dengan proporsi 17,1%, diikuti tim sukses capres-cawapres sebesar 15,9%, penyelenggara pemilu 13,6%, dan capres-cawapres 4,2%.

---

<sup>54</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Responden Survei LSI Nilai Ganjar-Mahfud Paling Berpotensi Curang di Pemilu 2024, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.31 WIB.

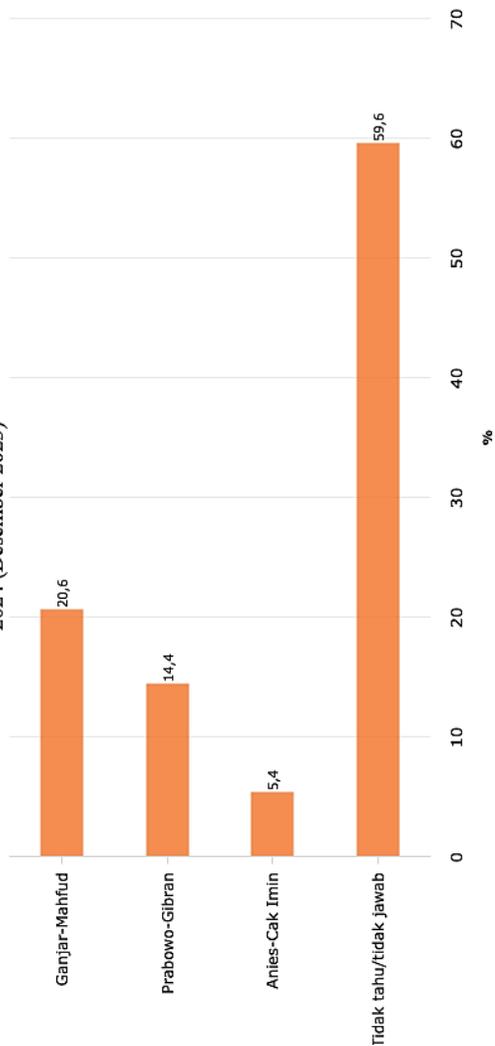
Survei LSI tersebut dilakukan pada 3-5 Desember 2023 atau jelang beberapa hari menjelang debat pertama capres-cawapres pada 12 Desember 2023.

Survei ini menyasar 1.426 responden dengan sebaran mewakili demografi populasi di seluruh wilayah Indonesia. Responden merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari populasi nasional.

Responden terpilih diwawancarai lewat telepon oleh pewawancara yang telah dilatih. Adapun penarikan sampel survei menggunakan metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Sampel survei dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Tingkat kesalahan (margin of error) survei diperkirakan sekitar 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%.

Persepsi Publik Terhadap Pasangan Capres-Cawapres yang Paling Potensial Melakukan Kecurangan di Pemilu 2024 (Desember 2023)



## E. Gerakan Kekuatan Politik Uang di Area Kekuasaan

### 1. Praktek Politik Uang Jadi Hal yang Paling Dikhawatirkan Publik saat Pemilu

Praktik peredaran politik uang menjadi hal yang paling dikhawatirkan publik selama perhelatan Pemilu 2024<sup>55</sup>. Ini selaras dengan hasil survei Populi Center terbaru yang dipublikasikan pada Kamis (9/11/2023).

Survei yang dihimpun dalam laporan Starting Point: Posisi Elektorial Jelang Kampanye Pemilu 2024 menunjukkan bahwa isu itu dikhawatirkan oleh 37,2% responden.

Kekhawatiran berikutnya adalah bentrok antar-pendukung calon yang dipilih 19,8% responden. Isu selanjutnya ada berita bohong atau hoaks sebesar 11,9%. Artinya politik uang, bentrok antar-pendukung calon, dan berita hoaks ini menjadi isu krusial yang perlu kita cermati dan perlu diantisipasi agar kekhawatiran publik tidak terjadi (CenterVenter Hartanto Rosojati, Populi dalam konferensi persnya secara daring, Kamis,9/11/2023)<sup>56</sup>.

Ada pula 6,6% responden yang khawatir atas penyalahgunaan fasilitas pejabat atau pemerintah selama jalannya pemilu.

Disusul oleh responden yang mengkhawatirkan politisasi agama/etnis (5,5%) serta ancaman atau intimidasi untuk memilih calon tertentu (4,2%). Kemudian kekhawatiran pemilu terkait netralitas ASN/PNS, netralitas TNI/Polri, serta hal lainnya seperti kecurangan dan pemilu dua putaran memiliki proporsi kurang dari 3%. Sementara, terdapat 4,3% responden yang merasa tidak ada kekhawatiran. Mereka menilai pemilu akan berjalan secara

---

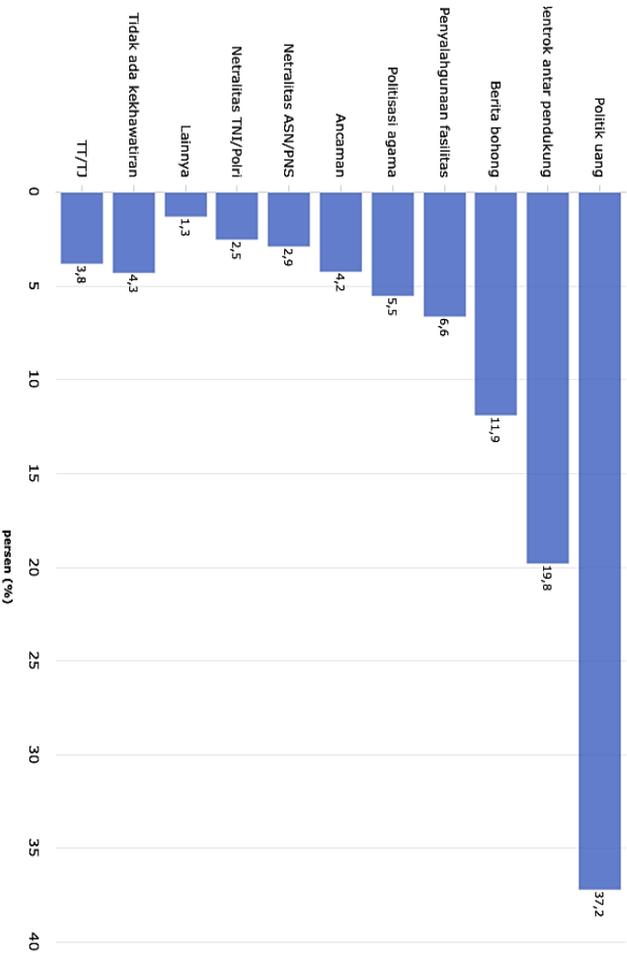
<sup>55</sup> Karso, A.Junaedi 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, h.92-95

<sup>56</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad>, Praktik Politik Uang Jadi Hal yang Paling Dikhawatirkan Publik saat Pemilu, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.37 WIB

aman dan damai. Lalu 3,8% lainnya tidak tahu atau tidak jawab.

Survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Sampel diambil menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling. Pengambilan data dilakukan pada 29 Oktober-5 November 2023 menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face) melalui aplikasi Populi Center. Tingkat kesalahan survei (margin of error) sebesar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Proporsi Hal yang Paling Dikhawatirkan Responden Terkait Jalannya Pemilu 2024 (Oktober-November 2023)



## 2. Provinsi Rawan Politik Uang di Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut, politik uang jadi satu dari lima isu kerawanan pemilihan umum (pemilu) tertinggi yang terjadi di tingkat provinsi. Tercatat, ada 22 kasus tersebut yang diperoleh Bawaslu melalui pemetaan kerawanan Pemilu 2024.

Berdasarkan pemetaannya, Maluku Utara menduduki posisi tertinggi tingkat kerawanan politik uang, yang memperoleh skor maksimal 100 poin. Kemudian Lampung menyusul di peringkat kedua dengan perolehan skor 55,56.

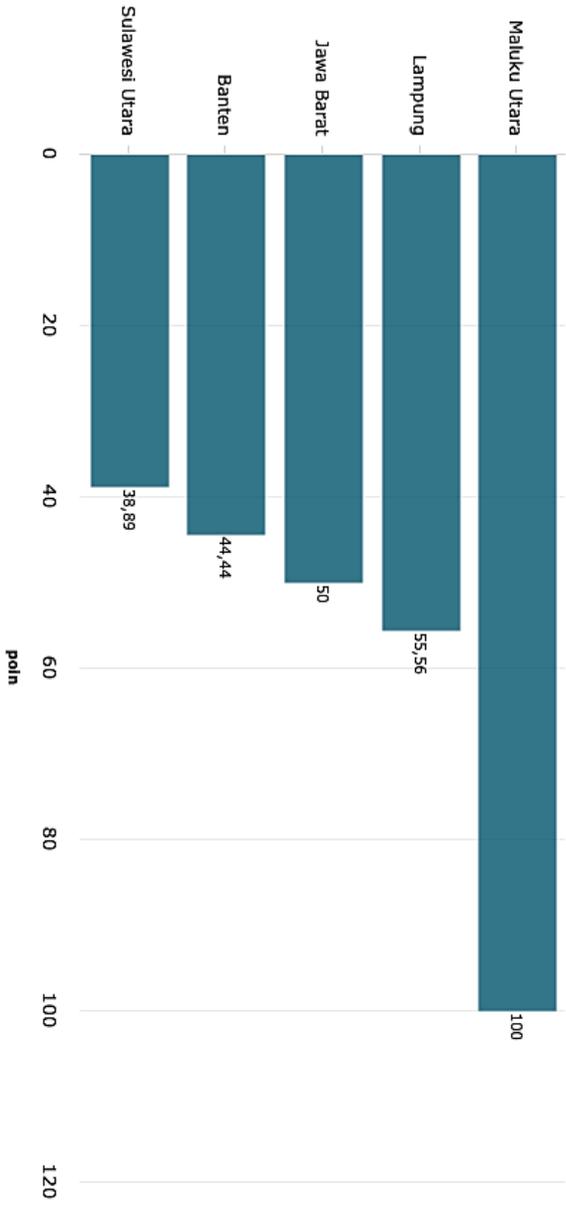
Adapun Jawa Barat di peringkat ketiga sebagai provinsi yang rawan isu politik uang, dengan skor 50 poin. Diikuti oleh Banten dan Sulawesi Utara yang masing-masing diberikan skor 44,44 poin dan 38,89 poin<sup>57</sup>.

Bercermin dari penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2022, Bawaslu mengategorikan modus politik uang oleh calon atau partai politik menjadi tiga bentuk, yakni memberi langsung, memberi barang, dan memberi janji.

Modus memberi langsung, salah satunya berupa pembagian uang, voucher, atau uang digital dengan imbalah memilih. Pemberian uang nominalnya Rp.20 ribu sampai Rp.200 ribu. Murah ya? Padahal buat masa depan Indonesia, tapi inilah potret yang dikumpulkan.

---

<sup>57</sup> <https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad>, Ini 5 Provinsi Rawan Politik Uang di Pemilu 2024, Maluku Utara Teratas, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.39 WIB



## F. Kesimpulan

Gegap gempita penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tersisa hitungan beberapa bulan ke depan. Tak hanya pemilihan presiden dan wakil presiden, masyarakat juga memilih calon anggota legislatif tingkat DPR, DPD dan DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang. Para peserta mempersiapkan kampanye agar meraih jabatan politik.

Fenomena politik uang menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program 'Hajar Serangan Fajar' mengimbau masyarakat ikut mengawal Pemilu dengan menentang dan menolak praktik politik uang yang dapat menjelma menjadi korupsi.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) memaparkan hasil jajak pendapat terkait pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dinilai paling berpotensi melakukan kecurangan di Pemilu 2024. Dari tiga pasangan calon, Ganjar Pranowo dan Mahfud FD menempati posisi teratas pasangan capres-cawapres yang paling berpotensi melakukan kecurangan di Pemilu 2024. Proporsinya mencapai 20,6%.

Kemudian, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempati posisi kedua pasangan yang berpotensi melakukan kecurangan dengan proporsi sebesar 14,4%. Sementara, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai memiliki potensi kecurangan di Pemilu 2024 paling kecil, yaitu hanya 5,4%.

Praktik peredaran politik uang menjadi hal yang paling dikhawatirkan publik selama perhelatan Pemilu 2024. Ini selaras dengan hasil survei Populi Center terbaru yang dipublikasikan pada Kamis (9/11/2023). Survei yang dihimpun dalam laporan Starting Point: Posisi Elektorial Jelang Kampanye Pemilu 2024 menunjukkan bahwa isu itu dikhawatirkan oleh 37,2% responden.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut, politik uang jadi satu dari lima isu kerawanan pemilihan umum (pemilu) tertinggi yang terjadi di tingkat provinsi. Tercatat, ada 22 kasus tersebut yang diperoleh Bawaslu melalui pemetaan kerawanan Pemilu 2024.

Berdasarkan pemetaannya, Maluku Utara menduduki posisi tertinggi tingkat kerawanan politik uang, yang memperoleh skor maksimal 100 poin. Kemudian Lampung menyusul di peringkat kedua dengan perolehan skor 55,56. Jawa Barat di peringkat ketiga sebagai provinsi yang rawan isu politik uang, dengan skor 50 poin. Banten dan Sulawesi Utara yang masing-masing diberikan skor 44,44 poin dan 38,89 poin.

Ada empat faktor yang membuat politik uang sulit diberantas, yakni:

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor politik. Money politics dilakukan karena calon legislatif (caleg) tidak memiliki program tetapi ingin menang.
3. Faktor Hukum. Lemahnya regulasi money politics pada pemilu tahun ini merupakan langkah mundur dibandingkan dengan pilkada.
4. Faktor budaya. Di Indonesia, tidak pantas menolak hadiah, dan praktik pengembalian hadiah sudah mapan. Alat budaya ini digunakan oleh para politisi untuk mengimplementasikan kebijakan moneter.

Untuk sanksi pidana politik uang dibedakan tiga kelompok. Pasal 523 ayat 1 menyebutkan, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta".

Kemudian Pasal 523 ayat 2 mengatur terhadap setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih

secara langsung ataupun tidak langsung disanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Sedangkan Pasal 523 ayat 3 menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta”.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Junaedi Karso 2023, Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil, Penerbit Cv.Eureka Media Aksara- Purbalingga
- Abdullah, T. (1974). Islam di Indonesia, Jakarta: Tinta Mas.
- Abdullah, T. (1987). Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES,
- Ahmad, A. M. (1978). Al-Fikr al-Siyasi Li al-imam Muhamamd Abduh. al-Maiat al Misriyyat al -Ammat li al-Kitab.
- Al-Attas, S. M. A. N., Djojosuwarno, K., & Mahzar, A. (1981). Islam dan Sekularisme. Pustaka. Al-Faruqi, I. I. R., & Lubis, T. (1984). Islamisasi Pengetahuan. Pustaka.
- Al-Ghazali (1320 H). Al-Iqtishad fi al-'Itiqad. Kairo: Tanpa Penerbit.
- Ali, F. (1986). Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, Jakarta: Gramedia.
- Al-Maududi, A. A'la. (1995). Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam. Diterjemahkan oleh Hikmat, Asep.Bandung: Mizan.
- al-Maududi, Abul 'Ala (1996). Khilafah dan Kerajaan, terjemah oleh Muhammadal-Baqir dari al-Khilafah wa al-Mulk. Mizan.
- Al-Mawardi. (Tanpa Tahun) al-Ahkam al- Sulthaniyah. Dar al-Fikr.
- Almod, Gabrield and James S. Coleman. (1960). *The Politics of Developing Area*. Princeton: Princeton University Press.
- Almond, Gabriel A. & James S. Coleman. 1970, *The Politics of the Developing Areas*. NewYersey : Princeton.
- Arkoun, M. (1994). Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan danJalan Baru. INIS.

- Ash-Shiddieqy, H. (1969). *Asas-asas Hukum Tatanegara Menurut Syariat Islam*. Matahari Masa.
- Azhar, M. (1997). *Filsafat Politik, Perbandingan Islam dan Barat*. RajaGrafindo Persada.
- Azra, A. (1995). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Azra, A. (1999). *Renaissans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Benda, H.J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Berita dan Pendapat, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Perss. Ingleson, J. (1983). *Jalan ke Pengasingan*, Jakarta: LP3ES.
- Boland, B.J. (1985). *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti.
- Bruinessen, M.V. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Budiardjo, Miriam. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cristiadi, J. (200). *Kompas*, 8 Januari 2008
- Crouch, H. (1986). *Militer dan Politik Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Emerson, D.K. (2001). *Indonesia Beyond Soeharto*, Jakarta: Gramedia.
- Djawamaku, H. Anton. "Dialektika Struktur dan Kultur dalam Proses Pembaharuan Politik Order. Baru". *Analisa*. 1984-1988. Effendi, Djohan.

- Drs. Toto Pribadi, Ali Muhyidin, S.Ip, ISIP4213/ Modul 1 Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik*
- Easton, David. (1984). *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Easton, David. (1992). *Approaches to The Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Effendi, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Erawan, M. (1991). *Paguyuban Pasundan Di Tengah-Tengah Kancah Perjuangan Bangsa, Bandung: Mandalawangi*.
- Erawan, M. Dkk. (2000). *Paguyuban Pasundan Kiprah Perjuangannya dari Zaman ke Zaman (1914-2000)*, Bandung: PB Paguyuban Pasundan.
- Esposito, J. L. (1996). *Ancaman Islam Mitos atau Realitas?* Mizan.
- Feith, H. (1986). *Pemikiran Politik Indonesia: 1945-1965*, Jakarta: LP3ES.
- Geertz, C. (1989). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, cet III, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hadaad, Ismid (ed.). (1981). *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Mas`oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. (1991). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haikal, M. H. (1993). *Pemerintahan Islam*. Pustaka Firdaus.
- Heywood, Andrew. (2000). *Key Concepts in Politics*. Hampshire: Palgrave.
- Heywood, Andrew. (1997). *Politics*. Hampshire: Palgrave.
- Huntington, S.P (1996). *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, diterjemahkan oleh M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam.
- Ikatan Perss Mahasiswa Indonesia, (1972). *Pemilihan Umum 1971: Seri*

- Huwaiddi, F. (1996). *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat*, terjemahan dari *al-Islam wa al-Dimuqratiyah*. Mizan.
- Kadi, S. (2000). *TNI-AD Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*, Jakarta: Grafiti.
- Kurasawa, A. (1985). *Mobilisasi dan Kontrol*, Jakarta: Gramedia.
- Kadir, A. Gau. 2014. "Dinamika Partai Politik di Indonesia." *Sosiohumaniora*, Volume 16 No. 2 134.
- Kamali, M. H. (1996). *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Mizan.
- Kamil, S. (2002). *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*. GayaMedia Pratama.
- Kamil, S. (2013). *Pemikiran Politik Islam Tematik, Agama dan Negara*. Kencana Predana Media Group.
- Khan, Q. (1983). *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Pustaka.
- Komara, Endang. 2015. "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi." *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 119-120.
- Koran Kompas, 22 Juni 2016. Opini "Post-sekularisme dan Post-Islamisme" oleh M. Dawam Rahardjo.
- Muhtadi, B. (2012). *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. KPG.
- Ma'arif, A. S. (1985). *Islam dan Masalah kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Politik dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES.
- Ma'arif, A. S. (1988). *Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Mas'oed, M. (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES.
- Muhaimin, Y. (1982). *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966*
- Murtopo, A. (1970). *Strategi Politik*, Jakarta: CSIS.

- Murtopo, A. (1970). *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*, Jakarta: CSIS.
- Nadrilun. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Nasution, H. dkk (2003). *Eksikloped Islam*. Ikhtiar Baru Van Houve.
- Niel, R. Van (1984). *Munculnya Elit Modern Indoensia*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Noor, D. (1987). *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Rajawali.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta : Rajawali.
- Noor, D. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Notosusato, N. (ed). (1985). *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pulungan, J. S. (1994). *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. RajaGrafindo Persada.
- Pulungan, J. S. (1994). *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Negara Madinah ditinjau dari Pandangan Al- Quran*. Raja Grapindo Persana.
- Qaradhawi, Y. (1997). *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rahman, F. (1982). *Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual (terj.)*. Pustaka.
- Rais, A. (1987). *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta*. Mizan.
- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun (eds.). (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Rauf, Maswadi. (2000). *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Diknas.

- Rendy Adiwilaga, dkk. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Ridha, R. (1341H). *al-Khilafah au al-Imamah al-udzma*. Al-Manar.
- Ruhenda, dkk. 2020. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* Volume 1, Issue 2 62-64.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, Toto Pribadi, dan Zulkifli Hamid. (1995). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Syadzali, M. (1993). *Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. UI-Press.
- Taimiyah, Ibnu. (Tanpa Tahun). *Al-Siyasah al-Syariah*. Kairo: Dar al-Kutub al- Arabi.
- Thaba, A.A. (1986). *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Umar, M. (2004). *Islam dan Demokrasi di Indonesia: Kemenangan Abangan dan Sekuler*. INSED.
- Winters, J.A. (1999). *Dosa-Dosa Politik Orde Baru*, Jakarta: Djambatan. Woodward, M.R. (1999). *Islam Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yulianto, A. (2000). *Hubungan Sipil-Militer Pasca Orde Baru*, Jakarta: Rajawali Press.
- Zainuddin, A. R. (1992). *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Ibnu Khaldun*. Gramedia.

## **Jurnal**

- Fauzan Ali Rasyid, *Politik Islam Dan Demokrasi di Indonesia*, *HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, IX, 2 (Desember 2008), h.75-85

Ira Gamurti, Latifa Hanum Siregar, Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara, Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Vol. 1 No.1 Maret Tahun 2021, h.33-36

Muhammad Zulifan, Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 171-195

### Online

<http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014>

Perolehan\_suara\_parpol.pdf, diakses kembali pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.25 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilka> da /  
15/12/14/nzb8bk361-ini-parpol-yang-calonnya-mera jai-  
hasil-pilkada, diakses kembali pada tanggal 12 Februari  
2024, pukul 21.27 WIB.

<http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014>

Penetapan\_Hasil\_Pileg.pdf, diakses kembali pada tanggal  
12 Februari 2024, pukul 21.26 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad>,

Larangan Praktik Politik Dinasti, Bagaimana Publik Memandangnya, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.55 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Isu  
Dinasti Politik Mencuat Jelang Pemilu, Bagaimana Tanggapan Warga, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 21.57 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/adi-ahdiat>, Ini Daftar  
Tokoh Terkait Politik Dinasti menurut Warganet, diakses  
pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 22.00 WIB

[https://kabar24.bisnis.com/read/20231127/15/1718336/jawa-  
jadi-battleground-para-capres-di-kampanye-pilpres-2024](https://kabar24.bisnis.com/read/20231127/15/1718336/jawa-jadi-battleground-para-capres-di-kampanye-pilpres-2024),  
diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 13.01 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027091219-617-865967/jawa-masih-jadi-kunci-di-pilpres-2024>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 13.11 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/adi-ahdiat>, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Berdasarkan Pulau/Kawasan, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.15 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/adi-ahdiat>, Jumlah Pemilih Pemilu 2024 di 38 Provinsi Indonesia, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.18 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/nabilah-muhamad>, Banyak Pemilih Ganjar Pindah ke Anies dan Prabowo, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.25 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Banyak Pemilih Ganjar Pindah ke Anies dan Prabowo, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.29 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Anak Muda RI Lebih Suka Capres Berlatar Belakang Akademisi, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 23.31 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/erlina-f-santika>, Kinerja dan Visi Jadi Faktor Utama Anak Muda Pilih Presiden-Wapres, diakses pada tanggal 23 Desember 2023

<https://dkpp.go.id/> Ratna Dewi: Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 16.22 WIB

Meri Carolina S, Tabah Maryanah, Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 48, No. 2, November 2022, h.143-144

Burhanudin Muhtadi. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Parti-ID dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10 No. 1, 47.

Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2020). *Journal of Governance*,. The Aristocrats Power on Local Politic InThe Regency of Bone 2013-2018, 5 (1), 31-46.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7033>

<https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>,  
Deretan Partai Pendukung Bacapres 2024, Siapa Terbanyak, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.41 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad>, Ini Pihak yang Dinilai Berpotensi Curang pada Pemilu 2024 Menurut Survei LSI, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.33 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Responden Survei LSI Nilai Ganjar-Mahfud Paling Berpotensi Curang di Pemilu 2024, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.31 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad>, Praktik Politik Uang Jadi Hal yang Paling Dikhawatirkan Publik saat Pemilu, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.37 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad>, Ini 5 Provinsi Rawan Politik Uang di Pemilu 2024, Maluku Utara Teratas, diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.39 WIB

## TENTANG PENULIS



**A. Junaedi Karso** lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household*

*Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty, (*International Jurnal of Social Science Humanities Research*, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (*IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research*, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (*East African Scholar Journal of Economics, business and Management*, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (*International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus)*, 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (*Journal L Sociale*, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (*Journal La Bisecoman*, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (*South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences*, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (*East African Scholar Journal of Education and Literature*, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (*Journal La Sociale*, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (*International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus)*, 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (*Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS)*, 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (*IAR Journal of Humanities and Social Sciences*, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises,

(Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service through Digital Technology-based Licensing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rule <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa>, 2021).

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim

Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk), Seputar Linatas Kejahatan Realita Antara & Kamuplase Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Siapa Diuntungkan Dan Siapa Yang Buntung Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat Atau Cukong Dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi Di Indonesia; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024 Meraung Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; dan Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998,

Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem

Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “How to Perform While Transform” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppel Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppel Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppel Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email [Bintang.lyatiara66@gmail.com](mailto:Bintang.lyatiara66@gmail.com), juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.